

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
DANA KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN
JALAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus: Kelurahan Gedawang Banyumanik
Semarang)**

TESIS

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**DYAH PURBANDARI MULAT UTAMI
L4D005075**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
DANA KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN
JALAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus: Kelurahan Gedawang Banyumanik Semarang)**

**Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Konsentrasi Manajemen Prasarana Perkotaan**

Oleh:

**DYAH PURBANDARI MULAT UTAMI
L4D005075**

**Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 24 September 2008**

**Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik**

Semarang, 24 September 2008

Pembimbing II

Pembimbing I

Ir. Mardwi Rahdriawan, MT

Ir. Retno Widjajanti, MT

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 24 September 2008

DYAH PURBANDARI MULAT UTAMI
NIM : L4D005075

*Ilmu Menata Pengetahuan,
Kearifan Menata Kehidupan.
(Immanuel Kant (1724 – 1804), filsuf Jerman)*

*Agar Anda terus bisa merasakan bahagia
maka isilah tangan Anda dengan melakukan,
Isilah hati Anda dengan semangat.
Isilah pikiran Anda dengan tujuan.
Isilah memori Anda dengan pengetahuan.
Dan Isilah masa depan Anda dengan harapan.
(Frederick E. Crane, New York)*

Tesis ini kupersembahkan untuk :
*Suamiku tercinta Ir. Djoko Darmawan, MT dan anak-anakku
tersayang Ananda Rizki Darmawan dan Farandy Anggarajati Darmawan
karena kesabaran, pengorbanan, dorongan dan doa yang terus menerus,
kalian adalah sumber inspirasi bagiku.
Ibunda yang sangat aku kasihi, karena tanpa do'a restu Ibu,
aku tidak akan mampu berbuat apa-apa.
Mas Heru, mas Arief, Iin, Wulan serta pak Pipiek dan mbak Atie terimakasih
atas doa dan dukungannya selama aku menempuh pendidikan ini.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini berjudul : “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan, studi kasus: Kelurahan Gedawang Banyumanik Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dan tingkat partisipasinya, sehingga dapat menjadi masukan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan bantuannya.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ir. Retno Widjajanti, M.T, selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan materi dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan tesis ini hingga selesai;
2. Ir. Mardwi Rahdriawan, M.T, selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan materi, arahan dan dorongan dalam penyusunan tesis ini;
3. Bp. Yudi Basuki, ST, MT, selaku dosen penguji, yang memberikan masukan dan arahan demi sempurnanya tesis ini;
4. Bp. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku dosen penguji utama yang memberikan kritik, saran dan petunjuk untuk penyempurnaan tesis ini;
5. Bp. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc., selaku Ketua Studi S2 MTPWK Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

Program S-2 yang penulis tempuh selama ini tidak terlepas dari peran serta dalam segala hal dari lembaga atau instansi dan beberapa individu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih pula kepada:

6. Pusbikte Departemen Pekerjaan Umum, atas pemberian bea siswa selama menempuh program S-2 di Universitas Diponegoro;
7. Seluruh Pengajar pada Program Pasca Sarjana dan Staf Administrasi kerjasama Departemen PU dengan MTPWK Universitas Diponegoro;
8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yang telah memberi kesempatan dan ijin bagi penulis untuk melanjutkan jenjang S-2, dan segenap pimpinan dan staf BPIK atas segala dukungan dan pengertiannya;
9. Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini pimpinan dan staf Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang dan Kelurahan Gedawang;
10. Teman-teman seangkatan Modular Tahun 2005.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan baik moril maupun materiil dari pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu. Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih untuk suami tercinta Djoko Darmawan, anakku Ananda Rizki dan Farandy Anggarajati tersayang, juga ibunda terkasih atas semua pengorbanan, kesabaran, pengertian dan segala doanya.

Semarang, September 2008
Dyah Purbandari Mulat Utami

ABSTRAK

Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Semarang dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini bermunculan perumahan-perumahan dengan penduduk pendatangnya secara pesat yang tumbuh berdampingan dengan pemukiman penduduk asli. Perbedaan karakteristik masyarakat itu kemudian muncul dalam mengelola dana Kontigensi yang berasal dari Pemerintah Kota Semarang sebagai bantuan langsung kepada masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana.

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dan tingkat partisipasinya pada pemukiman penduduk asli (RW I) dan penduduk pendatang/perumahan (RW IV) di Kelurahan Gedawang dalam mengelola dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan.

Pada penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di kedua pemukiman tersebut, dengan menampilkan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Proses analisis yang dilakukan meliputi analisis bentuk peran serta masyarakat, analisis pengelolaan dana Kontigensi dan analisis tingkat partisipasi yang dilakukan pada kedua pemukiman tersebut.

Dengan pendekatan penelitian dan proses analisis terungkap bahwa di RW I bentuk peran serta masyarakat yang dominan berupa tenaga diwujudkan dengan kerja bakti pembangunan jalan sendiri (swakarya) dan pengelolaan dana kontigensi yang paling optimal pada tahap perencanaan dengan pelibatan warga dalam penyusunan Proposal pada pertemuan 'Jumpa Warga' serta tingkat partisipasi (menurut teori Tangga Partisipasi Nabeel Hamdi) sudah mencapai tahap Pengendalian Penuh (tertinggi), sedangkan di RW IV bentuk peran serta masyarakat yang dominan berupa dana diwujudkan dengan kerelaan warga membayar iuran Rp.25.000,-/bulan untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana/prasarana/sosial dan pengelolaan dana kontigensi yang paling optimal pada tahap pembangunan dengan kerelaan warga membayar iuran pembangunan Rp.100.000,-/KK (swadana) serta tingkat partisipasi mencapai tahap Pengendalian Terbagi (cukup tinggi).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa RW I dengan karakteristik masyarakat yang homogen, sederhana dan 'guyub', tingkat partisipasi sudah mencapai tahap Pengendalian Penuh karena dana Kontigensi dikelola dengan melibatkan warga mulai tahap perencanaan dalam penyusunan Proposal dan rencana teknisnya dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan dilaksanakan dengan kerja bakti (swakarya). Namun karena dilaksanakan swakarya, maka kualitas hasil pembangunan kurang memenuhi persyaratan teknis. Sedangkan di RW IV dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan sudah mapan, tingkat partisipasi mencapai tahap Pengendalian Terbagi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana Kontigensi pada tahap perencanaan/penyusunan Proposal dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan diserahkan kepada pemborong. Dalam hal ini kualitas hasil pembangunan telah memenuhi persyaratan teknis jalan. Berdasarkan hal itu, maka dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang, bahwa dengan karakteristik masyarakat seperti RW I, dana Kontigensi dapat dialokasikan untuk kegiatan pembangunan namun harus ada bimbingan teknis sehingga hasilnya dapat memenuhi persyaratan kualitas jalan. Sedangkan pada perumahan dengan karakteristik masyarakat seperti RW IV, dana Kontigensi dapat dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan/perbaikan karena jalan sudah tersedia dan iuran warga (dana) tidak terlalu besar.

Kata kunci: peran serta masyarakat, dana Kontigensi, tingkat partisipasi, Kota Semarang.

ABSTRACT

In Gedawang political district administration Banyumanik subdistrict, in the last ten years, there have been spring up the housing complexes that grow fastly with their coming inhabitants live together with the native inhabitants. The different of the society characteristics appears in managing the Kontigensi fund from the Semarang city government as the direct aid to the society in accordance to their need building the environment roads.

The aim of this study is to know the form of the community participation and how great their participation of the native inhabitants and the coming inhabitants in Gedawang political district administration in managing the Kontigensi fund in the environment roads building.

In this study, the writer uses the quantitative descriptive approach as the writer tries to describe sistematically, factually, and accurately to the condition and phenomenon of the society which happens in both residents, the writer shows data in numeral form, from the collecting data, data interpretation and shows it in the tabel formation. The analysis process done by the writer including the analysis of the participation of the community, the analysis of the management of the Kontigensi fund, the analysis of the participation grade, and the analysis of the form of society participation in managing the Kontigensi fund in building the environment roads done in both settlements.

Write the research approach and analysis process it is revealed that in the native habitants resident (RW I) with homogen community characteristics, simple, and mutually helpfull, the building of the environment roads succeed well because of the participaton of the community is high enough untill the full control. This is because it is supported by high planning phase value and the community release the priority of their needs therefore the Kontigensi fund can be managed very well that can be seen through their willingness and their attendance in the voluntary labor service or work together by preferring carrying out their own roads building (swakarya). While the coming inhabitants (RW IV) with their heterogeneous characteristics and established, in facts the building of their environments roads succeed well by their good participations that is reached shared control. The Kontigensi fund for building the environment roads is managed by fund sharing which is collected from all the community and in the implementation, it is submitted to the contractor. The inhabitants release that they do not have expertise to carry out the building of the roads by themselves and they do not have enough time to conduct the voluntary labor service not to conduct the meeting.

Based on the result of this study can to conclude that the community participation in managing the Kontigensi fund in the environment roads building is so influence by region and community characteristics, nevertheless by the aim of the Semarang city government with the Kontigensi fund is build of the environment roads to be existence.

Key word: the form of the community participation, the Kontigensi fund, great participation, Semarang City

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN 11

1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Permasalahan	15
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	16
1.3.1 Tujuan	16
1.3.2 Sasaran	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Ruang Lingkup	17
1.5.1 Ruang Lingkup Substansi	18
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial	20
1.6 Posisi Penelitian	22
1.7 Keaslian Penelitian	23
1.8 Kerangka Pemikiran	24
1.9 Metode Penelitian	27
1.9.1 Pendekatan Penelitian	27
1.9.2 Kebutuhan Data	27
1.9.3 Teknik Pengumpulan Data	31
1.9.4 Metoda Analisis	32
1.9.5 Teknik Analisis	33
1.9.6 Kerangka Analisis	36
1.9.7 Teknik Sampling	38
1.10 Sistematika Pembahasan	41

BAB II KAJIAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI

PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 33

2.1 Peran Serta Masyarakat	43
2.1.1 Pengertian	43

2.1.2 Bentuk dan Jenis Peran Serta Masyarakat	45
2.1.3 Persyaratan Peran Serta Masyarakat	46
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh	48
2.1.5 Bidang untuk Peran Serta Masyarakat	48
2.1.6 Partisipasi Dalam Budaya Masyarakat.....	50
2.2 Pengukuran Tingkat Partisipasi	53
2.3 Dana Kontigensi	57
2.3.1 Kelembagaan Dana Kontigensi.....	58
2.3.2 Pengelolaan Dana Kontigensi	59
2.4 Rangkuman Kajian Literatur	61

BAB III GAMBARAN UMUM

KELURAHAN GEDAWANG BANYUMANIK SEMARANG 65

3.1 Kondisi Fisik Wilayah	65
3.1.1 Kondisi Geografis	65
3.1.2 Kondisi Prasarana Jalan	67
3.2 Karakteristik Masyarakat	70
3.2.1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga.....	71
3.2.2 Adat Istiadat Masyarakat.....	71
3.2.3 Kondisi Perekonomian.....	73
3.2.4 Kondisi Sosial	80
3.3. Dana Kontigensi di Kelurahan Gedawang	82
3.3.1 Dana Kontigensi di RW I.....	84
3.3.2 Dana Kontigensi di RW IV	85

BAB IV ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI

PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 87

4.1 Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat	87
4.1.1 Bentuk Peran Serta Masyarakat RW I	87
4.1.2 Bentuk Peran Serta Masyarakat RW IV	95
4.1.3 Kesimpulan Bentuk Peran Serta Masyarakat.....	103
4.2 Analisis Pengelolaan Dana Kontigensi	104
4.2.1 Pengelolaan Dana Kontigensi di RW I	105
4.2.2 Pengelolaan Dana Kontigensi di RW IV	111
4.2.3 Kesimpulan Pengelolaan Dana Kontigensi.....	119
4.3 Analisis Tingkat Partisipasi	120
4.3.1 Tingkat Partisipasi di RW I.....	121
4.3.2 Pada Pemukiman Penduduk Pendetang (RW IV).....	122
4.3.3 Kesimpulan Tingkat Partisipasi	124
4.4 Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan	124

Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan 124

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 129

5.1 Kesimpulan 129

5.2 Rekomendasi 132

DAFTAR PUSTAKA 134

LAMPIRAN-LAMPIRAN130

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prasarana kota merupakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana lingkungan atau prasarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman. Pembangunan prasarana pada hakekatnya merupakan tugas dan tanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Walaupun demikian dalam operasionalnya dapat melibatkan peran aktif pihak swasta maupun masyarakat.

Pembangunan bertumpu pada masyarakat (*community base development*) adalah merupakan suatu pola pembangunan yang sudah mulai dikenal di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu proses pembangunan yang bertumpu pada masyarakat sebagai bentuk konkritnya adalah peran serta (*participation*) masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan ini dapat diaplikasikan disegala bentuk dan sektor pembangunan, termasuk juga perwujudan pembangunan prasarana perkotaan (Sarwono, Buletin Tata Ruang BKTRN, 2004:3).

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengembangan wilayahnya, dewasa ini sedang giat-giatnya menggalakkan pembangunan prasarana kotanya melalui pengucuran dana yang disebut Dana Kontigensi. Dana Kontigensi adalah salah satu kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penganggaran bantuan yang disampaikan langsung kepada masyarakat, yang karena skala prioritasnya belum dapat direalisasikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. Dengan dana

Kontigensi ini diharapkan masyarakat bukan lagi sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) tetapi sebagai pemilik kepentingan (Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang, 2007). Pemerintah Kota Semarang sangat mengharapkan tersedianya prasarana kota yang memadai di berbagai pelosok kota Semarang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Prasarana kota tersebut bisa berwujud penyediaan jalan, air bersih, saluran sanitasi dan lain sebagainya.

Kecamatan Banyumanik adalah salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan Kota Semarang dan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000-2010, salah satu fungsi atau peruntukannya sebagai pengembangan permukiman. Akibat dari peruntukan tersebut, di Banyumanik banyak berkembang kawasan-kawasan permukiman yang didirikan oleh pengembang (*property*), sehingga sedikit banyak mengubah lahan pertanian maupun perkebunan untuk didirikan perumahan. Kelurahan Gedawang adalah salah satu kelurahan di dalam Kecamatan Banyumanik yang mengalami perkembangan jumlah permukiman dengan bergesernya penggunaan tanah tersebut. Dengan tumbuhnya kawasan permukiman baru tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan ketersediaan prasarana, salah satunya adalah prasarana jalan.

Dana Kontigensi yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota Semarang, ternyata disikapi masyarakat secara beragam meski jumlah dana yang diterima hampir sama dan penyediaan prasarana yang sama, yaitu prasarana jalan. Dalam satu wilayah kelurahan saja, ada beberapa bentuk pengelolaan dana tersebut. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh karakteristik masyarakatnya, seperti: kultur buda-

ya masyarakat setempat, tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah penduduk dan lain sebagainya.

Pada kawasan permukiman dengan penduduk asli seperti pada Rukun Warga (RW) I Kelurahan Gedawang yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh maupun pedagang dengan tingkat pendidikan yang rendah, dana Kontigensi yang telah mereka terima selama 8 (delapan) tahun itu (mulai tahun 2001-2008) dikelola secara bersama. Bentuk pengelolaannya dengan melibatkan segenap masyarakat yang ada melalui pertemuan, pembangunan dan pemeliharaan yang berupa kerja bakti. Pertemuan warga atau di RW I Kelurahan Gedawang disebut Jumpa Warga dilakukan tiap Sabtu Malam minggu pertama untuk pertemuan tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Sabtu malam minggu kedua untuk pertemuan tingkat RW.

Dana Kontigensi yang turun dianggap sebagai stimulan, sehingga dapat membangkitkan semangat kegotong-royongan atau kebersamaan mereka. Pembangunan jalan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, dibangun secara bertahap sesuai dengan penggal jalan yang telah direncanakan. Sedangkan pembangunan atau peningkatan jembatan direncanakan dan dibangun sesuai tingkat atau skala prioritas.

Pada permukiman penduduk pendatang yang menempati kawasan perumahan baru yang terletak di RW IV Kelurahan Gedawang (Perumahan Gedawang Permai I, Gedawang Permai II, Villa Gedawang, Puri Gedawang Permai dan Perumahan Gedawang Indah), yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pegawai dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, Dana

Kontigensi yang mereka peroleh dikelola dengan melibatkan masyarakat pula yaitu dengan melakukan iuran bagi tiap Kepala Keluarga, namun dalam pelaksanaan pembangunan lebih banyak diserahkan kepada Pihak ketiga (pemborong). Hal ini dikarenakan kesibukan penduduk tersebut yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan jalan secara swadaya.

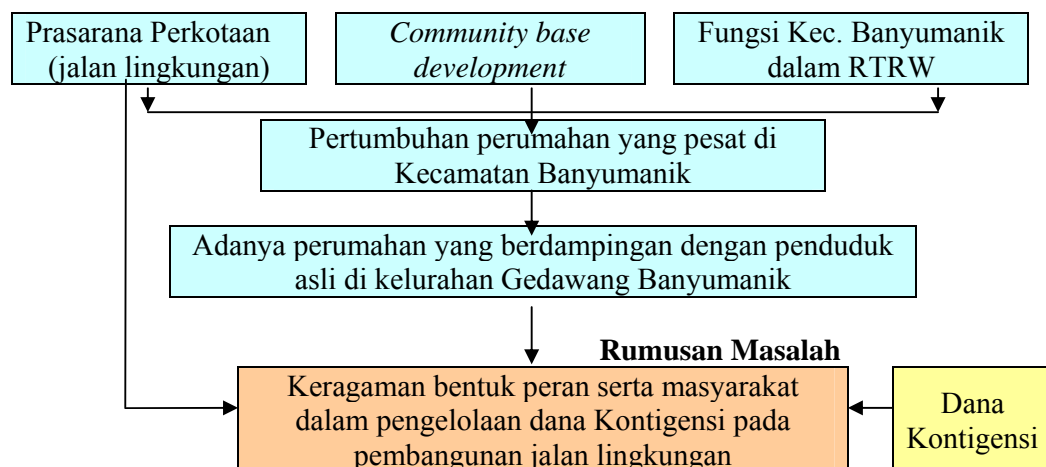
Dengan melakukan survei sementara berupa wawancara dengan salah satu perangkat desa (Bagian Pembangunan Kelurahan Gedawang) dan data dari Buku Pembangunan tahun 2001-2008, dapat dilihat perbedaan pengelolaan dana untuk pembangunan jalan lingkungan antara pemukiman penduduk asli dengan pemukiman penduduk pendatang. Dengan dana Kontigensi yang sama yaitu sejumlah Rp.7.000.000,- dan panjang ruas jalan yang sama 200 meter, pada pemukiman penduduk asli hanya swadaya Rp.1.500.000,- sedangkan pada pemukiman penduduk pendatang harus swadaya Rp.6.500.000,-. Perbedaan tersebut dikarenakan dalam proses pembangunan jalan pada pemukiman penduduk asli melibatkan masyarakat (peran serta masyarakat) yang berupa tenaga (kerja bakti), pikiran (pertemuan pada Jumpa Warga), biaya (untuk konsumsi makanan dan minuman) dan waktu. Sedangkan pada pemukiman penduduk pendatang/perumahan dalam proses pembangunan jalan diserahkan pada pihak ketiga (pemborong), dikarenakan keterbatasan waktu dan tidak adanya keahlian dalam pembangunannya.

Dengan beragamnya bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana Kontigensi pada pembangunan jalan seperti tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan bantuan kepada masyarakat diharapkan sesuai dengan karakteristik masyarakat, sehingga akan lebih tepat, efektif dan efi-

sien. Dari sisi lain, Pemerintah Kota Semarangpun berharap selain tersedianya prasarana juga terwujudnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunannya dan terpeliharanya rasa kegotong-royongan yang akhirnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap yang mereka bangun akan lebih besar, sehingga prasarana tersebut diharapkan mendapat pemeliharaan dari masyarakat.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan bahwa Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan studi kasus Kelurahan Gedawang Banyumanik Semarang, yaitu: terjadinya keragaman bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan, karena adanya perbedaan karakteristik masyarakat yang menjadi obyek penelitian (pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang), namun pembangunan jalan tetap terwujud atau berhasil dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.1
KERANGKA PERMASALAHAN

Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: “bagaimana bentuk dan tingkat peran serta masyarakat pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang di Kelurahan Gedawang Banyumanik Semarang, dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan?”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Melihat latar belakang dan perumusan masalah seperti tersebut diatas, maka dibuatlah tujuan dan sasaran penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk dan tingkat peran serta masyarakat pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang di Kelurahan Gedawang dalam pengelolaan Dana Kontigensi dari Pemerintah Kota Semarang pada pembangunan jalan lingkungan.

1.3.2 Sasaran

Sasaran untuk mencapai tujuan penelitian diatas adalah:

1. Identifikasi fisik dan karakteristik masyarakat pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang di Kelurahan Gedawang;
2. Identifikasi dan analisis bentuk peran serta masyarakat pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang di Kelurahan Gedawang dalam pembangunan jalan lingkungan;
3. Identifikasi dan analisis pengelolaan Dana Kontigensi pada kedua pemukiman tersebut;
4. Mengkaji tingkat peran serta masyarakat pada kedua pemukiman tersebut da-

lam pengelolaan Dana Kontigensi;

5. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Semarang dan pada lingkup Kelurahan maupun Kecamatan tentang bentuk peran serta masyarakat yang dominan dalam suatu pemukiman, sehingga Dana Kontigensi yang dialokasikan sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Masukan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan bantuan Dana Kontigensi baik itu untuk prasarana jalan maupun sarana dan prasarana lainnya, sebaiknya disesuaikan dengan bentuk peran serta masyarakat yang dominan serta disesuaikan pula dengan karakteristik masyarakatnya.
2. Masukan bagi pihak Kelurahan, bahwa dengan peran serta masyarakat yang tinggi baik itu dalam bentuk pikiran, tenaga, barang/material dan dana dalam pengelolaan Dana Kontigensi, maka selain dapat mewujudkan sarana dan prasarana juga tetap terjaga kegotong-royongan di masyarakat, baik itu gotong-royong dalam bentuk tenaga (kerja bakti atau swakarya) maupun dalam bentuk dana (swadana).

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup substansi yang berisi mengenai materi yang akan dibahas dalam penelitian ini dan ruang lingkup spasial atau disebut juga ruang lingkup wilayah yang merupakan lokasi penelitian ini.

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi

Definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau merupakan informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lainnya yang ingin menggunakan variabel yang sama (Singarimbun dan Effendi, 1987:46).

Definisi operasional dalam penelitian Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan ini adalah:

- Bentuk peran serta masyarakat pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman pendatang, yang berupa: pikiran, tenaga, barang/material dan dana.
- Pengelolaan dana Kontigensi yang dilakukan pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang, yang berupa tahapan pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan/perbaikan.
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Gedawang pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang, yang memperoleh alokasi Dana Kontigensi pada tahun 2008.
- Penduduk asli Kelurahan Gedawang adalah penduduk yang memiliki ciri hidup kemasyarakatan orang Jawa, seperti semangat gotong-royong, kebersamaan dan keakraban dan semangat tolong menolong (Sujamto, 1997:96). Penduduk asli ini adalah penduduk yang sejak lahir hingga kini masih tinggal di Kelurahan Gedawang dan memiliki riwayat tinggal di Kelurahan Gedawang selama lebih dari 10 tahun.

Karakteristik pemukiman penduduk asli adalah apabila jumlah penduduk yang tinggal dalam satu RW tersebut memiliki 80% penduduk asli.

- Penduduk pendatang adalah penduduk yang sudah kurang memiliki ciri hidup kemasyarakatan seperti diatas, sehingga memiliki kecenderungan dalam hidup bermasyarakat lebih individualis. Penduduk pendatang ini adalah yang memiliki riwayat tinggal di Kelurahan Gedawang kurang dari 10 tahun. Hal ini diasumsikan dengan keberadaan perumahan-perumahan yang ada di Kelurahan Gedawang yang baru berdiri 10 tahun yang lalu.

Karakteristik pemukiman penduduk pendatang adalah apabila jumlah penduduk yang tinggal dalam satu RW tersebut memiliki 80% penduduk pendatang.

Ruang lingkup substansial pada penelitian ini adalah:

1. Kondisi fisik yang meliputi aspek geografis dan kondisi prasarana jalan, dan kondisi karakteristik masyarakat pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang yang meliputi aspek kondisi penduduk dan budayanya, kondisi perekonomian dan kondisi sosial;
2. Bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan lingkungan pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang yang berupa pikiran, tenaga, barang/material dan dana dalam pengelolaan Dana Kontigensi;
3. Pengelolaan dana Kontigensi yang dilakukan oleh pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang yang pada tahun 2008 memperoleh Dana Kontigensi untuk pembangunan jalan lingkungan, mulai dari perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan.

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial

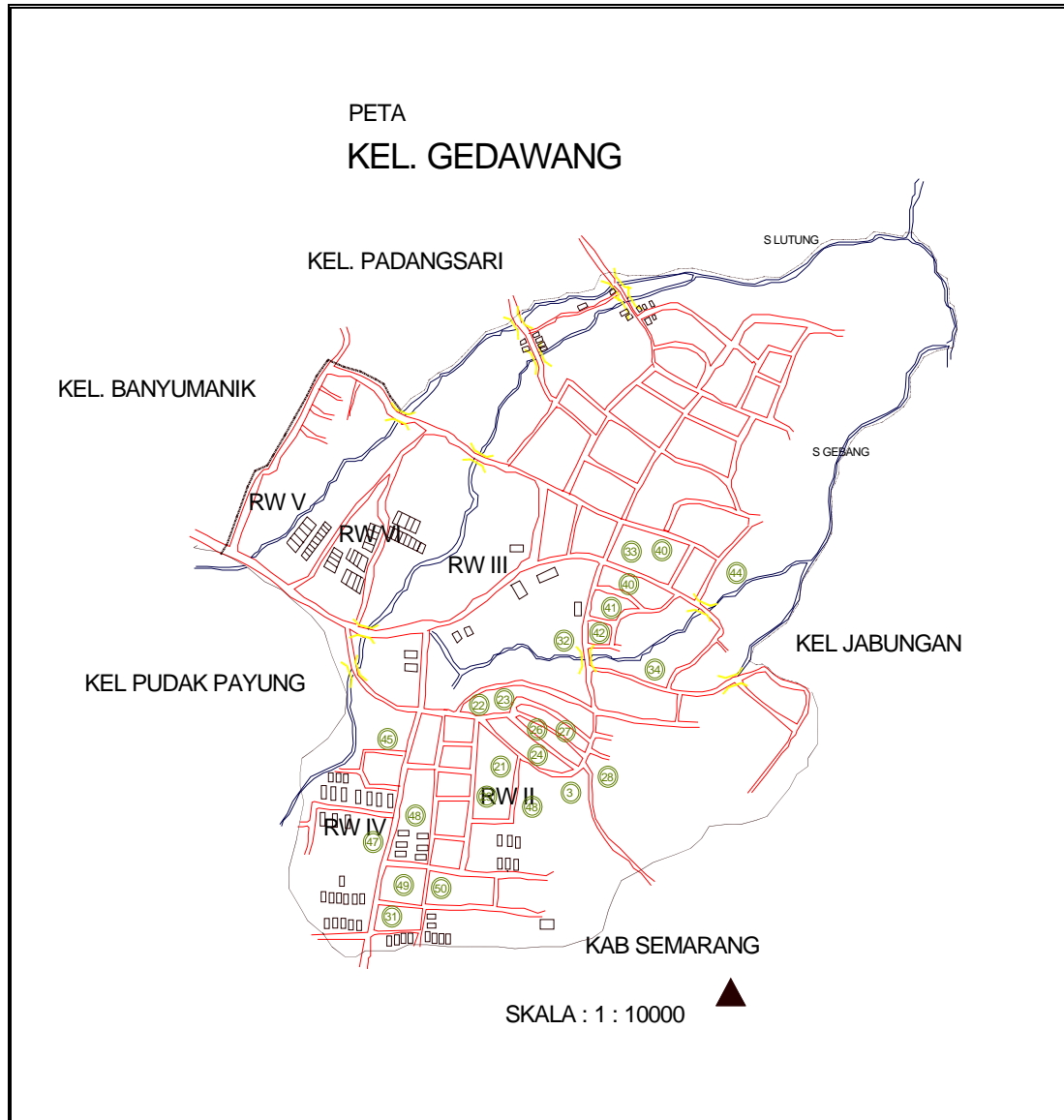
Ruang lingkup spasial pada penelitian ini mengambil studi kasus pada Kelurahan Gedawang Banyumanik Semarang dengan pertimbangan adanya perkembangan permukiman penduduk pendatang yang berdampingan dengan permukiman penduduk asli, sehingga dapat diperoleh secara jelas perbedaan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi yang mereka peroleh pada pembangunan jalan lingkungan.



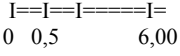
Secara administratif, pemukiman penduduk asli diwakili oleh RW yang memiliki karakteristik pemukiman penduduk asli (jumlah penduduk asli dalam RW tersebut sebesar 80%) yaitu RW I dan pemukiman penduduk pendatang diwakili oleh RW yang memiliki karakteristik pemukiman penduduk pendatang (jumlah penduduk pendatang dalam RW tersebut sebesar 80%) yaitu RW IV.

Secara fisik Kelurahan Gedawang yang memiliki luas wilayah 232,764 ha, mempunyai batas-batas:

- Sebelah Utara : Kelurahan Padangsari
- Sebelah Timur : Kelurahan Jabungan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kelurahan Banyumanik dan Pudukpayung

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2. Peta Kelurahan Gedawang.

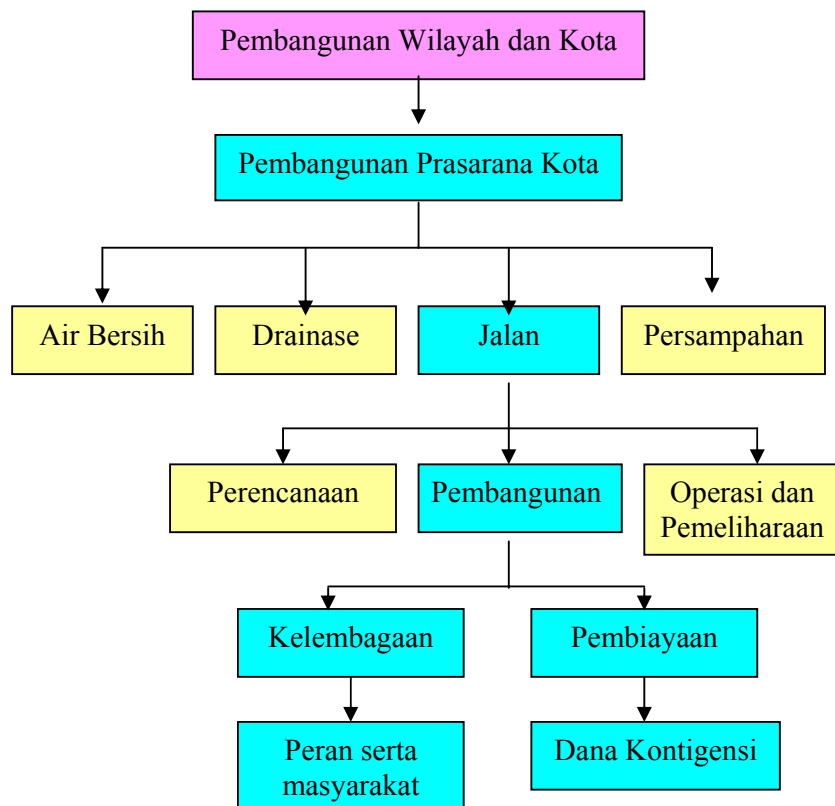


 PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008 TESIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (Studi Kasus: Kel.Gedawang Semarang)	JUDUL PETA: PETA KELURAHAN GEDAWANG	UTARA 
	LEGENDA	SKALA
	- - - : batas kelurahan = = = : jalan - - - : sungai H : jembatan □ : rumah	
		NO. GAMBAR 1.2 SUMBER Kelurahan Gedawang Semarang, 2008.

1.6 Posisi Penelitian

Posisi penelitian Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan ini dalam bidang keilmuan adalah dalam kerangka ilmu pembangunan wilayah dan kota yang membahas tentang pengelolaan dana yang dilakukan oleh masyarakat (peran serta masyarakat) dalam pembangunan prasarana kota dalam hal ini jalan lingkungan.

Untuk lebih jelasnya tentang posisi penelitian dalam bidang keilmuan dapat dilihat pada gambar 1.3.



Sumber: Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.3
POSISI PENELITIAN

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian ini asli belum pernah dibuat sebelumnya mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kontigensi Pada Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan. Apabila mengenai Peran Serta Masyarakat, dalam penelitian pasti sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini difokuskan pada peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana Kontigensi. Sedangkan Dana Kontigensi hanya ada di kota Semarang yang berupa bantuan langsung dari Walikota Semarang kepada Kelurahan-kelurahan yang membutuhkan.

Adapun studi yang pernah ada tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana bantuan/program dari Pemerintah adalah:

- Andri Andriansyah 2004, dalam rangka penyusunan tesis S2 di FT Jurusan Pembangunan Wilayah dan Kota yang berjudul Hubungan Sentralitas Dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Proyek P2MD di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitiannya adalah analisa kuantitatif dengan tabulasi silang didukung dengan deskripsi kualitatif. Hasil penelitiannya adalah efisiensi dan optimalisasi proyek yang mempertimbangkan lokasi proyek (sentralitas) dan bentuk peran serta masyarakat, pada sentralitas tinggi diberikan proyek yang bersifat stimulan, sedangkan yang rendah bisa dengan padat karya.
- Wan Evrizal 2004, dalam rangka penyusunan tesis S2 di FT Jurusan Pembangunan Wilayah dan Kota yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Prasarana Pasca Pelaksanaan Program P2D di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Metode penelitiannya dengan pendekatan partisipatif

dan deskripsi analitik. Hasil penelitiannya adalah tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan mata pencaharian dan jumlah pendapatan.

- Mardwi Rahdriawan, MT dan Dwi Wahyuningsih 2006, dalam Jurnal Teknik vol.27, berjudul Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan di Kelurahan Salaman Mloyo Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan *concurrent nested strategy* sebagai penerapan metode campuran. Hasil penelitiannya adalah pemberdayaan yang dilakukan di lokasi penelitian cukup efektif (0,8) ditandai berjalannya kapasitas organisasi baik di tingkat kelurahan dan di tingkat komunitas.

1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah proses berpikir dalam penyusunan penelitian ini, diawali dengan permasalahan: adanya keragaman bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Gedawang Banyumanik Semarang. Untuk memecahkan permasalahan tersebut dibuatlah tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk dan tingkat peran serta masyarakat di Kelurahan Gedawang pada masing-masing pemukiman yaitu pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan tersebut.

Sasaran dari penelitian ini adalah upaya untuk mencapai tujuan diatas, yaitu teridentifikasinya kondisi fisik dan karakteristik masyarakat (aspek geografis, kultur budaya, ekonomi, sosial dan prasarana jalan), teridentifikasinya bentuk peran serta masyarakat (pikiran, tenaga, barang/material dan dana) dan teridentifikasinya pengelolaan dana Kontigensi pada kedua pemukiman tersebut (pa-

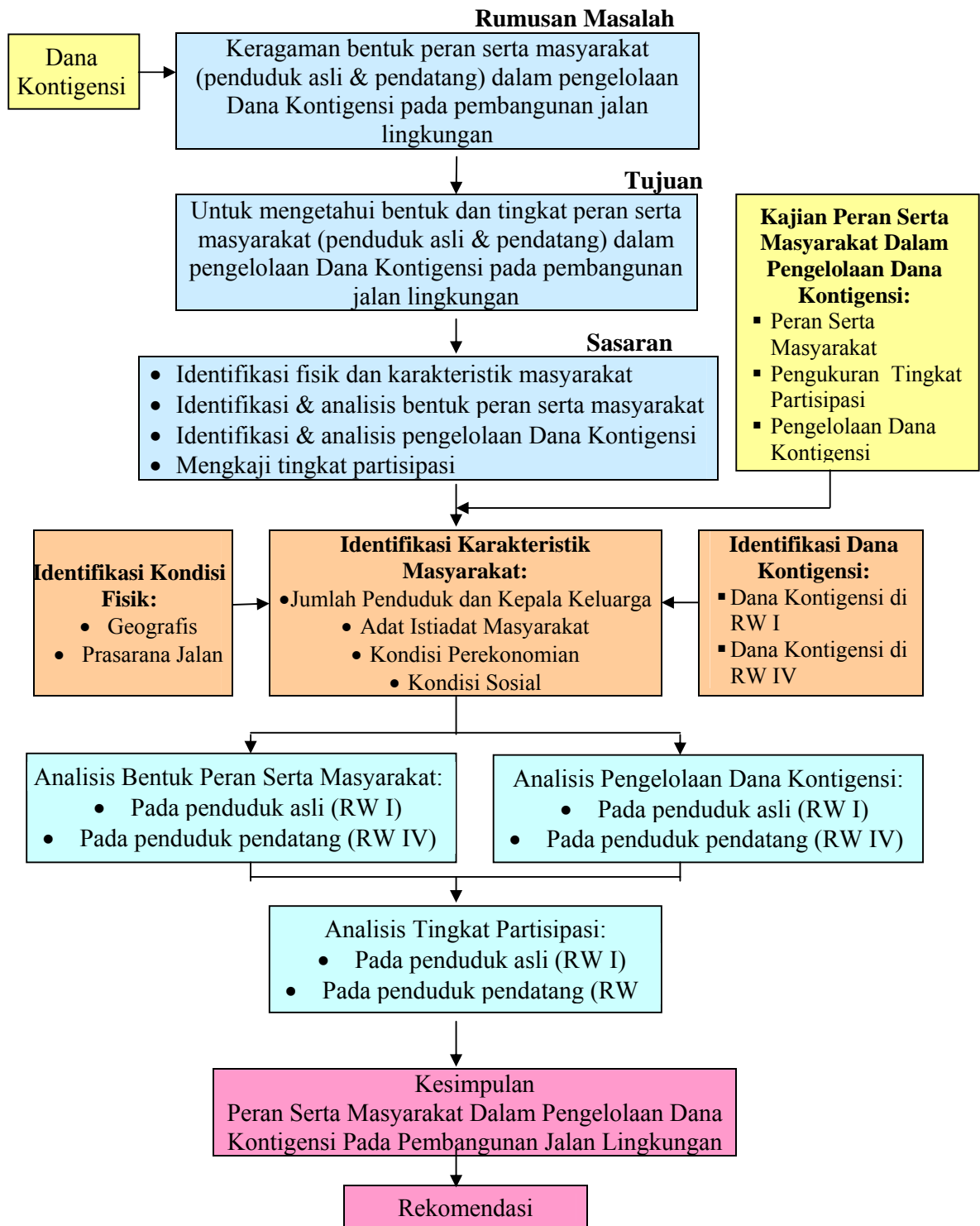
da tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan).

Dalam penelitian ini didukung dengan kajian literatur yang relevan, yaitu kajian peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan, yang terdiri dari: literatur peran serta masyarakat, literatur pengukuran tingkat partisipasi dan literatur pengelolaan Dana Kontigensi.

Untuk mencapai sasaran maka dibuatlah variabel dari ketiga identifikasi tersebut yaitu variabel kondisi fisik dan karakteristik masyarakat pada kedua pemukiman tersebut, variabel bentuk peran serta masyarakat, dan variabel pengelolaan Dana Kontigensi.

Kemudian disusunlah metoda penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan kerangka analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung di lapangan, menyebarkan kuesioner dan wawancara. Sedangkan teknik analisis yang berupa kerangka analisis terdiri dari analisis bentuk peran serta masyarakat, analisis pengelolaan Dana Kontigensi dan analisis tingkat partisipasinya.

Dari hasil proses analisis tersebut maka diperoleh kesimpulan penelitian yaitu bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang di Kelurahan Gedawang. Dari hasil kesimpulan tersebut maka dibuatlah rekomendasi tentang pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan yang ditujukan pada wilayah penelitian dan Pemerintah Kota Semarang. Untuk lebih jelas mengenai kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.4.



GAMBAR I.4
KERANGKA PEMIKIRAN

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*. Pendekatan *deskriptif kuantitatif* adalah penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di Kelurahan Gedawang dalam pengelolaan dana Kontigensi yang didapatkan dalam penelitian. Hal ini juga didukung dengan adanya variabel, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena variabel yang diteliti adalah sudah dan sedang terjadi.

Sedangkan pendekatan ini lebih condong ke kuantitatif karena akan banyak menggunakan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel.

1.9.2 Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Sugianto, et al, 2001:16-17). Dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, kuesioner dan wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Data tersebut biasanya digunakan peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, pelengkap atau diproses lebih lanjut (Sugianto, et al, 2001:19). Dalam hal ini data dapat diperoleh dari Kelurahan Gedawang, berupa peta, data monografi dan Buku Pembangunan. Adapun daftar kebutuhan data secara lengkap dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan wawancara.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di pemukiman berkarakteristik penduduk asli dan di pemukiman berkarakteristik penduduk pendatang. Dalam penelitian ini observasi hanya dilakukan pada kondisi dan perkembangan jalan, untuk memperlihatkan bentuk riil peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada dua pemukiman tersebut.

b. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap sumber data, yaitu pemukiman berkarakteristik penduduk asli dan pemukiman berkarakteristik penduduk pendatang di Kelurahan Gedawang. Kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui data dan informasi tentang identifikasi fisik dan karakteristik masyarakatnya, identifikasi bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan identifikasi pengelolaan Dana Kontigensi.

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber data atau tatap muka. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang bentuk peran serta

masyarakat pada kedua pemukiman tersebut dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang;
2. Kepala Kelurahan Gedawang;
3. Kepala Bagian di kantor Kelurahan Gedawang;
4. Ketua RW dan Ketua RT dengan karakteristik penduduk asli dan penduduk pendatang yang mendapatkan Dana Kontigensi pada tahun 2008 untuk pembangunan jalan lingkungan;
5. Tokoh masyarakat pada kedua pemukiman tersebut yang diharapkan mengetahui tentang Dana Kontigensi.

1.9.4 Metoda Analisis

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif (distribusi frekwensi) dengan data dari hasil kuesioner yang telah disebarkan ke responden pada dua pemukiman penduduk (pemukiman penduduk asli dan pendatang) Kelurahan Gedawang berdasarkan tabel kebutuhan data.

Menurut Schubeler (1996:32) peran serta dalam pembangunan prasarana lebih merupakan proses dan bukan produk. Dengan demikian untuk mengukur bentuk peran serta yang dominan pada suatu karakteristik masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi dapat dilihat dari proses kegiatannya.

Bentuk peran serta masyarakat diperoleh dengan metoda kuantitatif melalui penjumlahan hasil (distribusi frekwensi) sub variabel pikiran, tenaga, barang dan dana dengan masing-masing indikator penilaiannya. Demikian pula untuk pe-

ngelolaan Dana Kontigensi diperoleh dengan metoda kuantitatif melalui penjumlahan hasil (distribusi frekwensi) sub variabel tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dengan masing-masing indikator penilaiannya. Masing-masing indikator memiliki jawaban skala 1 sampai 5 (skala Likert) dimana setengah jawaban soal positif, setengah jawaban lagi negatif dan jawaban ditengah sebagai jawaban netral. Skala jawaban terdiri dari: sangat rendah (1), rendah (2), sedang (3), tinggi (4) dan sangat tinggi (5).

1.9.5 Teknik Analisis

Teknik analisis pengolahan data dari kuesioner ini meliputi analisis bentuk peran serta masyarakat, analisis pengelolaan Dana Kontigensi dan analisis tingkat partisipasi, yang masing-masing dilakukan pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang. Untuk lebih jelasnya teknik analisis ini dapat dilihat pada uraian dan tabel berikut ini:

a. Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat

Analisis bentuk peran serta masyarakat dengan mengambil sub variabelnya yaitu pikiran, tenaga, barang/material dan dana dilakukan pada dua pemukiman, yaitu pada pemukiman penduduk asli (RW I) dan pemukiman penduduk pendatang (RW IV).

Untuk lebih jelas tentang proses analisis penilaian terhadap bentuk peran serta masyarakat dapat dilihat pada tabel I.2 berikut ini:

TABEL I.2
PENILAIAN TERHADAP BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT

NO.	BENTUK PERAN SERTA	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
I.	Pikiran			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam rapat 2. Frekwensi usulan warga dalam rapat 3. Pelibatan warga dalam perencanaan jalan			
II.	Tenaga			
	1. Kerelaan warga dalam kerja bakti 2. Kehadiran warga dalam kerja bakti 3. Pembangunan dilaksanakan orang lain			
III.	Barang			
	1. Jenis sumbangan barang/material 2. Jumlah warga yang menyumbang 3. Kerelaan warga untuk menyumbang			
IV.	Dana			
	1. Besaran sumbangan 2. Jumlah warga yang menyumbang uang 3. Keaktifan membayar iuran			

Sumber : Hasil Analisis, 2008

b. Analisis Pengelolaan Dana Kontigensi

Analisis pengelolaan Dana Kontigensi adalah kegiatan pembangunan jalan lingkungan yang dibangun dengan menggunakan Dana Kontigensi pada tahun 2008 ini. Analisis ini dengan menggunakan variabel sesuai dengan tahapan pada dana Kontigensi dari Pemerintah Kota Semarang yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan/perbaikan yang dilakukan pada dua pemukiman penduduk, yaitu pada pemukiman penduduk asli (RW I) dan pemukiman penduduk pendatang (RW IV).

Untuk mengetahui proses analisis penilaian terhadap pengelolaan Dana Kontigensi dapat dilihat pada tabel I.3.

TABEL I.3
PENILAIAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI

NO.	PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
I.	Tahap Perencanaan			
	1. Manfaat Dana Kontigensi 2. Jumlah usulan warga dalam pertemuan 3. Kesesuaian lokasi pembangunan dengan aspirasi warga 4. Frekwensi kehadiran warga 5. Kerelaan warga untuk hadir			
II.	Tahap Pembangunan			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam kerja bakti pembangunan jalan 2. Kerelaan warga untuk hadir 3. Sumbangan yang diberikan 4. Besaran iuran pembangunan jalan 5. Ketepatan warga dalam membayar iuran			
III.	Tahap Pemeliharaan/Perbaikan			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam kerja bakti pemeliharaan jalan 2. Kerelaan warga untuk hadir 3. Sumbangan yang diberikan 4. Besaran iuran pembangunan jalan 5. Ketepatan warga dalam membayar iuran			
	JUMLAH			Total Nilai

Sumber : Hasil Analisis, 2008

c. Analisis Tingkat Partisipasi

Analisis Tingkat Partisipasi masyarakat adalah proses analisis dengan menggunakan variabel tidak ada, tidak langsung, konsultatif, pengendalian terbagi dan pengendalian penuh

Proses analisis Tingkat Partisipasi ini diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada Penilaian Terhadap Pengelolaan Dana Kontigensi (Tabel I.3) sehingga diperoleh Total Nilai (karena pengelolaan Dana Kontigensi merupakan satu paket kegiatan yaitu perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan). Setelah diketahui

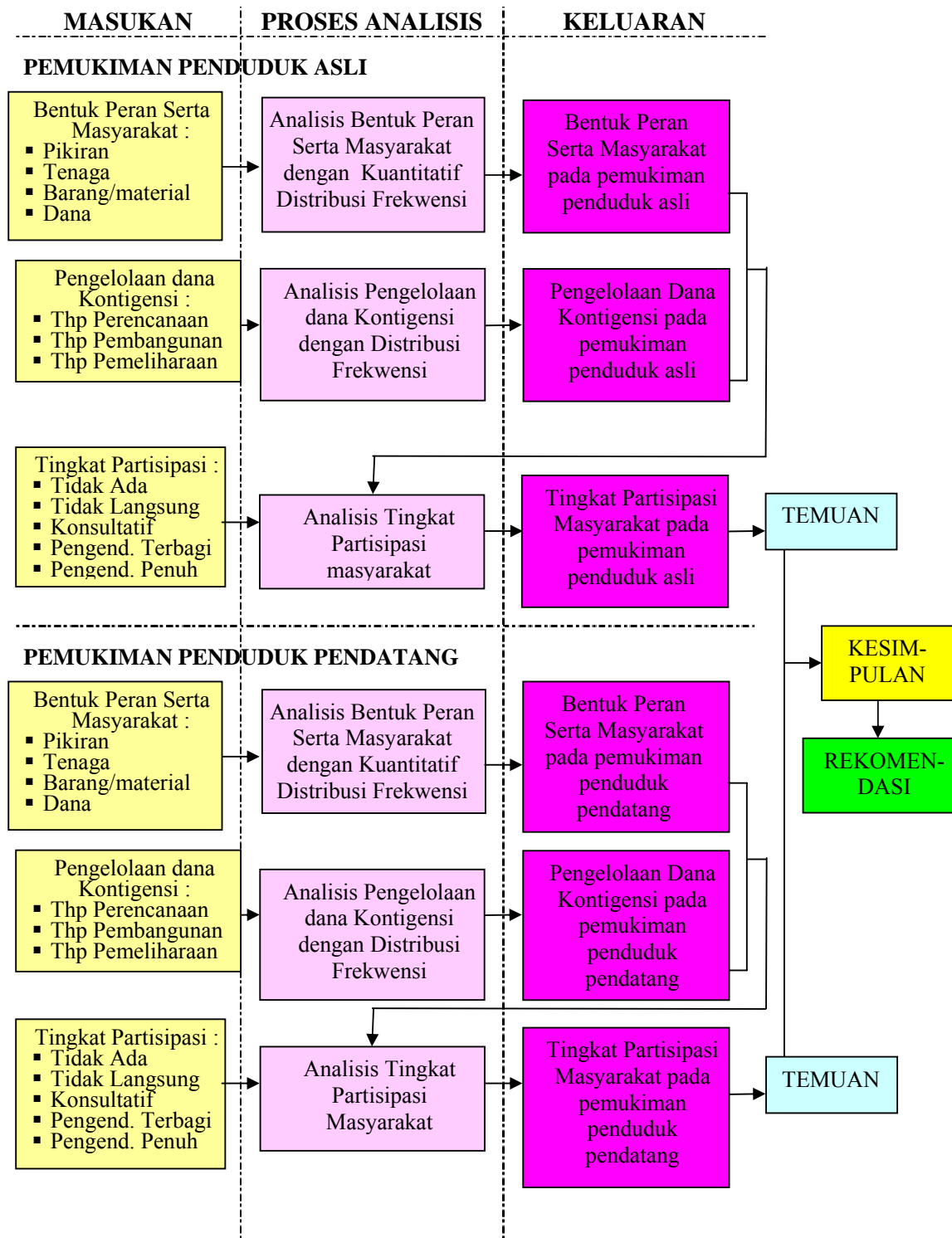
Total Nilai yang diperoleh maka dapat diketahui posisi Tingkat Partisipasi pada masing-masing pemukiman penduduk, yaitu pada pemukiman penduduk asli (RW I) dan pemukiman penduduk pendatang (RW IV) dengan menggunakan acuan teori Tangga Partisipasi Nabeel Hamdi, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab II.

1.9.6 Kerangka Analisis

Kerangka analisis adalah merupakan proses dari pengumpulan data (data fisik wilayah dan karakteristik masyarakat, observasi, kuesioner dan wawancara) yang kemudian dianalisis dengan alat analisis (analisis kuantitatif) sehingga diperoleh hasil atau keluaran berupa bentuk peran serta masyarakat, pengelolaan Dana Kontigensi dan tingkat partisipasi pada dua pemukiman penduduk, yaitu pemukiman penduduk asli (RW I) dan pemukiman penduduk pendatang (RW IV).

Hasil dari masing-masing tingkat partisipasi pada kedua pemukiman tersebut (penduduk asli dan penduduk pendatang) kemudian diinterpretasikan menjadi temuan penelitian dengan dilandasi dari kondisi, potensi dan permasalahan wilayah dan karakteristik penduduknya. Dari temuan penelitian tersebut kemudian disusun kesimpulan mengenai potensi masing-masing pemukiman dan solusi yang tepat dalam pengalokasian Dana Kontigensi serta rekomendasi yang dapat diberikan baik itu kepada wilayah Kelurahan Gedawang maupun kepada Pemerintah Kota Semarang.

Untuk lebih jelasnya kerangka analisis penelitiannya dapat dilihat pada gambar 1.5.



Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 1.5
KERANGKA ANALISIS

1.9.7 Teknik Sampling

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun, 1995:152), sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari ukuran tentang sesuatu, hal ini berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nasir, 1999:327).

Populasi penelitian ini adalah pemukiman dengan karakteristik masyarakatnya penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang, dalam hal ini lingkungannya adalah Rukun Warga (RW) dan pada tahun 2008 mendapat bantuan Dana Kontigensi untuk pembangunan jalan lingkungan. Karakteristik kedua pemukiman tersebut adalah:

- RW dengan karakteristik masyarakatnya penduduk asli: RW I
- RW dengan karakteristik masyarakatnya penduduk pendatang: RW IV

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *area probability sample* dilengkapi dengan *proportional sample*. *Area probability sample* atau sampel wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Sedangkan *proportional sample* dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan sampel wilayah. Adakalanya banyaknya subjek yang terdapat pada setiap wilayah tidak sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing wilayah (Arikunto, 1998:126-127).

Mengenai jumlah warga yang akan dijadikan sampel, untuk penelitian deskriptif kuantitatif ini dapat dipakai ukuran minimum dari Gay (dalam Sevilla,

1993:163) dengan batas ketelitian 10%. Untuk menentukan jumlah ukuran sampel dipakai formulasi dari Slovin (dalam Sevilla, 1993:161) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d² = presisi yang ditetapkan (batas ketelitian)

Berdasarkan data jumlah KK pada Kelurahan Gedawang 1.146 orang, maka jumlah KK sebagai populasi adalah:

- Jumlah KK RW IV (mewakili pemukiman pendatang) = 230 KK
- Jumlah KK RW I (mewakili pemukiman asli) = (1.146-230):5 RW=183 KK

Diketahui: N = jumlah populasi adalah jumlah Kepala Keluarga di RW I dan RW IV, N = (183+230) = 413 orang.

d² = 10%

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel :

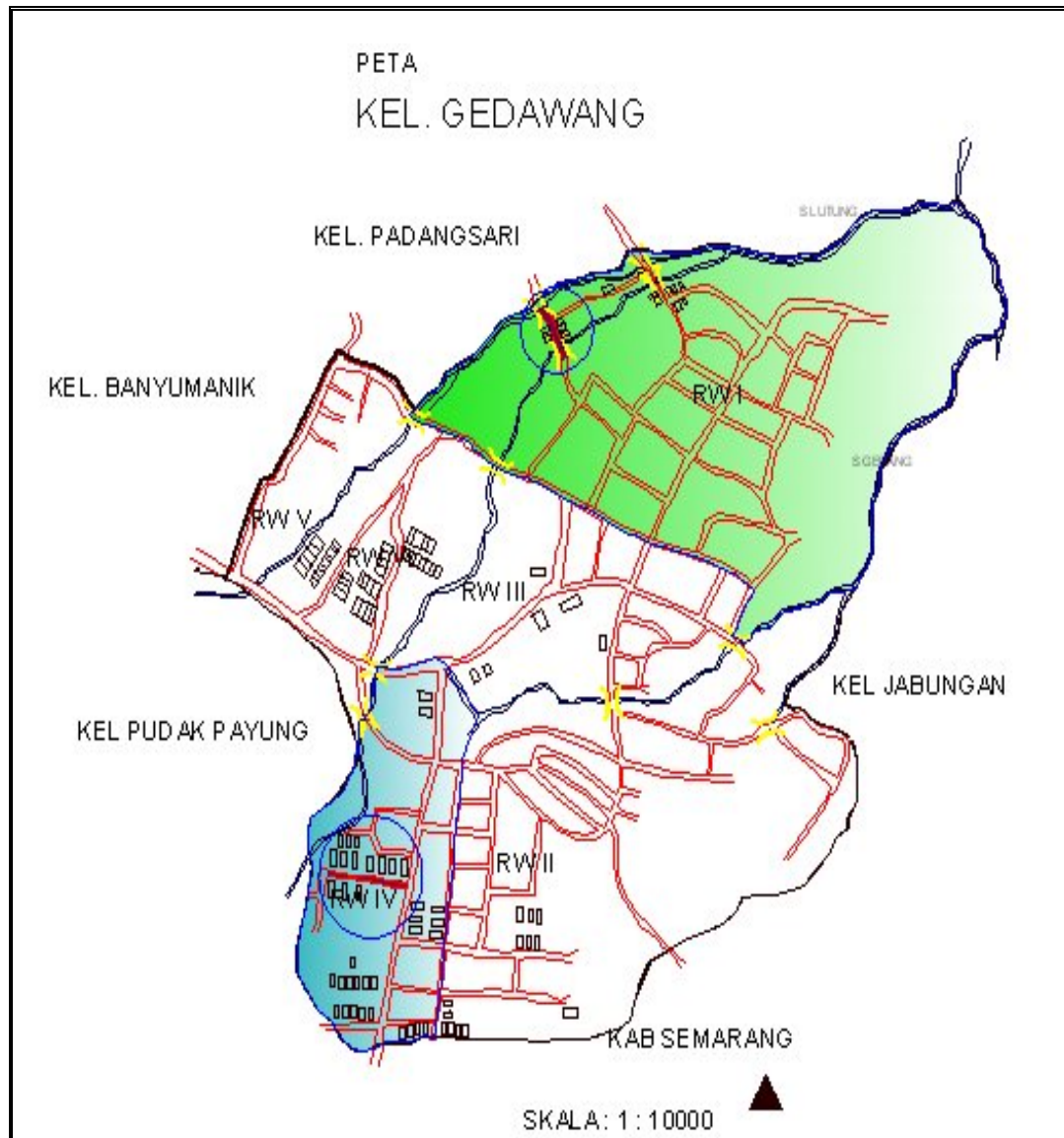
$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1} = \frac{413}{413 \cdot 0,1^2 + 1} = \frac{413}{(413) \cdot (0,01) + 1} = \frac{413}{5,13} = 80 \text{ responden}$$







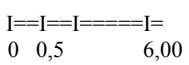
Dari jumlah 80 responden tersebut, maka jumlah masing-masing pemukiman penduduk dapat dilihat pada tabel I.4 dan lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.6 Peta Penentuan Sampel

TABEL I.4
PERHITUNGAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

Jenis Pemukiman	Jumlah Populasi (N)	Proporsional (P=N/ΣN)	Jumlah Sampel n=P*80
Penduduk Asli (RW I)	183	44.3	35
Penduduk Pendatang (RW IV)	230	55.7	45
Jumlah	413	100	80

Sumber : Data Sekunder diolah, 2008



 PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008 TESIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (Studi Kasus: Kel.Gedawang Semarang)	JUDUL PETA:	UTARA
	PETA PENENTUAN SAMPEL	
	LEGENDA	SKALA
	- - - : batas kelurahan == : jalan --- : sungai  : jembatan  : RW I (35 sampel)  : RW IV (45 sampel)  : lokasi Dana Kontigensi	 0 0,5 6,00
		NO. GAMBAR 1.6
		SUMBER Data Sekunder Diolah, 2008.

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, maka dari jumlah 80 responden secara proporsional jumlah responden pada RW I adalah 35 responden dan jumlah responden pada RW IV adalah 45 responden. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nantinya, pembagian kuesioner pada masing-masing responden di setiap populasi yang ingin diteliti hanya akan diberikan kepada responden yang benar-benar bersedia atas kemauan sendiri. Hal ini dilakukan supaya kuesioner tersebut terisi akurat dan obyektif.

1.10 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Tesis ini adalah:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, posisi penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II Kajian Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan, menguraikan tentang teori peran serta masyarakat yang didalamnya memuat pengertian, bentuk dan jenis peran serta masyarakat, persyaratan peran serta masyarakat, faktor-faktor yang berpengaruh, bidang peran serta masyarakat dan partisipasi dalam budaya masyarakat, kemudian teori tentang pengukuran tingkat Partisipasi, teori tentang pengelolaan dana kontigensi dan rangkuman kajian literatur yang berisi variabel penelitian.
- Bab III Gambaran Umum Kelurahan Gedawang, berisi tentang kondisi fisik wilayah yang menguraikan aspek geografis dan kondisi prasarana, serta kon-

disi karakteristik masyarakat yang menguraikan kondisi penduduk dan budayanya, keadaan ekonomi dan sosial.

- Bab IV Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan. Bab ini berisi tentang analisis bentuk peran serta masyarakat pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang, analisis pengelolaan dana Kontigensi pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang, analisis tingkat peran serta masyarakat pada pemukiman penduduk asli dan pemukiman penduduk pendatang dan diakhiri dengan analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan secara keseluruhan dan temuan penelitian.
- Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN

2.1 Peran Serta Masyarakat

2.1.1 Pengertian

Peran Serta atau istilah lain yang merupakan sinonim adalah “keikutsertaan, keterlibatan dan partisipasi” sampai saat ini belum terdapat satu kesepakatan mengenai definisi, sedangkan teori-teori yang dipergunakan pada umumnya langsung menyangkut pada penerapannya atau aplikasinya. (Sastropetro, 1985:-11) Namun pendapat dan rumusan-rumusan yang terdapat secara umum menyatakan, bahwa partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya saja.

Peran serta masyarakat dikaji lebih lanjut oleh Allport (dalam Sastropetro, 1985:12-13), menyatakan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Atau misalnya anda berpartisipasi/ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan anda pun berkenan untuk melakukannya.

Peran serta dari sudut pandang Pemerintah adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin. Alasan-alasan efektifitas dan efisiensi ada-

nya peran serta masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut (Rukmana, 1993:214)

- a. Peran serta masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas;
- b. Peran serta masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Selain itu memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbang sumber daya mereka seperti uang dan tenaga;
- c. Peran serta masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus diikutsertakan dalam aktifitas pembangunan. Peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan prasarana dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka (Schubeler, 1996:32).

Berdasarkan hal tersebut maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang mempengaruhi kualitas dan kelancaran pelayanan prasarana. Kegiatan tersebut dapat berupa perawatan dan pengembangan fisik prasarana yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsi prasarana dalam mendukung aktifitas masyarakat.

2.1.2 Bentuk dan Jenis Peran Serta Masyarakat

Bentuk-bentuk dan jenis-jenis peran serta masyarakat dikemukakan oleh Davis (dalam Sastropetro, 1985:16) adalah sebagai berikut:

a. Bentuk-bentuk Peran Serta:

1. Pikiran (*psychological participation*).
2. Tenaga (*physical participation*).
3. Pikiran dan tenaga (*psychological dan physical participation*).
4. Keahlian (*participation with skill*).
5. Barang/material (*material participation*).
6. Uang (*money participation*).

b. Jenis-jenis Peran Serta:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan dari individu/instansi yang berasal di luar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga)
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti seperti rapat desa yang menentukan anggarannya).
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan tenaga ahli setempat.
6. Aksi massa.
7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri.
8. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Telah dijelaskan diatas, bahwa berbicara mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana, maka hal-hal yang harus diperhatikan yaitu (Schubeler, 1996:32): peran serta lebih merupakan proses bukan produk, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, peran serta dapat dilakukan pihak lain dan pentingnya unsur kesediaan masyarakat. Sehingga dari berbagai pandangan yang ada maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi dapat dikategorikan dalam:

- a. Bentuk peran serta yaitu pikiran, tenaga, barang/material dan dana;
- b. Bentuk kegiatan yaitu peran serta dilakukan bersama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan peran serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau diserahkan pihak lain;
- c. Peran serta dapat dikenali dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

2.1.3 Persyaratan Peran Serta Masyarakat

Selain mengemukakan tentang bentuk-bentuk dan jenis-jenis peran serta masyarakat, Davis juga mengemukakan tentang persyaratan untuk melaksanakan peran serta masyarakat secara efektif, sebagai berikut:

- a. Waktu

Untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu. Waktu termaksud adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa atau pimpinan. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai *apa* dan *bagaimana* serta *mengapa* diperlukan peran serta. Pesan-pesan itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu usaha dan kegiatan untuk menumbuhkan pengertian yang sama antara pe-

mrakarsa atau pimpinan yang disebut sebagai “komunikator” dan penerima pesan “komunikasikan”. Pesan itu disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti, lambang itu harus dapat saling dimengerti dan dipahami. Penyebaran pesan dilakukan melalui sarana atau media tertentu seperti udara, radio, televisi, surat kabar, surat dan sebagainya, sehingga komunikasikan dapat menerima dan menafsirkannya serta memahami apa yang dimaksud oleh komunikasikan.

- b. Bilamana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan “memanjakan” yang akan menimbulkan efek negatif.
- c. Subyek partisipasi hendaklah relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya atau interestnya.
- d. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, dalam arti kata, yang bersangkutan memiliki luas lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikasikan, dan walaupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikasikan.
- e. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang bisa dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif/berhasil.
- f. Para pihak yang bersangkutan bebas di dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- g. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya dida-

sarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat (Sastropoetro, 1985:20) adalah:

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
- b. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama.
- c. Kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara.
- d. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat peran serta, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan (Slamet, 1994:137-143) akan sangat berpengaruh pada peran serta.

2.1.5 Bidang untuk Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dalam peran sertanya dalam proses pembangunan dapat dilakukan dalam beberapa bidang, yaitu:

- a. Dalam proses pengambilan keputusan dan/atau proses perencanaan.
Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan/ide-ide kreatif, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.
- b. Dalam proses pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi yang diberikan masyarakat dapat berupa uang, tenaga, keahlian maupun barang/material.
- c. Dalam proses pemeliharaan.
Apabila terjadi kerusakan jalan, maka partisipasi yang diberikan masyarakat dapat berupa uang, tenaga, keahlian maupun barang/material.

Karakteristik prasarana merupakan kondisi dan kinerja prasarana untuk dapat mendukung aktifitas masyarakat. Prasarana yang secara teknis sederhana dan melayani dalam skala kecil misalnya lingkungan, dapat dikembangkan oleh organisasi masyarakat lokal dengan biaya yang langsung dikelola di tingkat lokal. Masyarakat akan berperan serta untuk memelihara dan mengelola prasarana yang telah dibangun bila mereka mendapat manfaat langsung dari prasarana tersebut atau berhubungan dengan kinerja prasarana (Ndraha, 1990:105).

Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak atau pengaruh positif pada pemanfaatannya yang langsung dirasakan masyarakat. Hal tersebut dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki terhadap yang mereka bangun, yang pada akhirnya akan tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang berupa perbaikan prasarana lingkungan tersebut (Yudhohusodo dkk, 1991:148).

2.1.6 Partisipasi Dalam Budaya Masyarakat

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1981:193). Kebudayaan dapat dibedakan dalam tiga sistem yaitu sistem budaya, sistem sosial dan kebudayaan fisik.

- Sistem budaya yaitu kompleks ide-ide dan gagasan manusia yang menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi masalah kehidupan manusia. Gagasan ini saling berkait satu sama lain menjadi sistem yang berpola (*“habit of thinking”*). Beberapa masalah kehidupan manusia adalah masalah tentang hubungan manusia dengan alam, masalah manusia dengan sesamanya, masalah hakekat kerja, dan masalah dalam memandang waktu. Dalam realita, sistem budaya tidak bisa diraba dan diamati, ia terletak pada pemikiran sekelompok masyarakat seperti halnya filsafat suatu masyarakat.
- Sistem sosial yaitu tindakan berpola (*“habit of doing”*) dari sekelompok masyarakat. Sistem sosial ini terdiri dari pola aktifitas manusia yang saling berinteraksi dari waktu ke waktu membentuk adat tata perilaku. Sistem ini dapat diobservasi, difoto, didokumentasi dan diamati tetapi tidak bisa diraba misalnya ritual-ritual agama ataupun budaya yang berlangsung dalam suatu daerah.
- Kebudayaan fisik, merupakan keseluruhan hasil fisik, perbuatan dan karya manusia dalam sekelompok masyarakat. Oleh karena itu sifatnya paling kongkret dapat berupa benda-benda, bangunan atau karya fisik yang dapat diraba.

Bagi daerah di Jawa Tengah khususnya kota Semarang, budaya masyarakat daerah itu tidak lain adalah kebudayaan Jawa. Dalam lingkup yang lebih ke-

cil, kebudayaan Jawa itu juga ber-Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kebudayaan Jawa itu beragam (sub kultur Negari-gung, sub kultur Dulangmas dan sub kultur Pesisir) akan tetapi esensinya tetap sama. Dan esensi atau ciri-ciri utama budaya Jawa adalah religius, non doktriner, toleran, akomodatif serta optimistik (Sujamto, 1997:14). Ciri-ciri utama tersebut telah melahirkan corak, sifat dan kecenderungan yang khas bagi orang Jawa, antara lain:

1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai *Sangkan Paraning Dumadi*, dengan segala sifat, kekuasaan dan kebesaran-Nya;
2. Bercorak idealistis, percaya kepada sesuatu yang bersifat immateriil (keben-
daan) dan hal-hal yang bersifat kodrati serta cenderung kearah mistik;
3. Mengutamakan cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia;
4. Bersifat konvergen (menyatu), universal dan terbuka;
5. Cenderung pada gotong-royong, *guyub*, rukun dan damai;
6. Luwes, lentur, mengutamakan rasa ketimbang rasio.

Partisipasi dalam budaya Jawa dicontohkan dalam semangat gotong-ro-
yong dan konsep *Manunggaling Kawulo-Gusti* (MKG). Konsep MKG dalam bu-
daya Jawa biasa dipakai dalam 2 (dua) konteks, yaitu sosio kultural atau sosio
politik dan konteks mistik atau religiospiritual. Dan konteks sosio kultural/sosio
politik dalam MKG merupakan indikator tentang semangat partisipasi dalam bu-
daya Jawa dan semangat gotong-royong merupakan penyangganya (Sujamto,
1997:143).

Rembug desa, gugur gunung, sambatan, kenduren dan lain-lain yang
lazim di dalam tradisi Jawa (terutama di desa-desa jaman dulu) adalah wujud-

wujud nyata dari semangat gotong-royong itu. Hakekat MKG adalah gotong-royong yang melibatkan pihak atasan (dahulu disebut *gusti*) dan pihak bawahan (dahulu disebut *kawula*).

Pimpinan jaman dulu yang sangat sadar tentang pentingnya partisipasi rakyat adalah Sri Mangkunagara I (R.M. Said dan dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa) dengan ajarannya yang terkenal sebagai Tri Dharma:

1. *Rumangsa melu handarbeni*;
2. *Wajib melu hangrungkebi*;
3. *Mulat sarira hangrasa wani*.

Tri Dharma sebagai salah satu warisan budaya Jawa menunjukkan betapa pentingnya partisipasi rakyat dalam urusan kenegaraan. Agar rakyat (*kawula*) merasa *wajib melu hangrungkebi* (merasa terpanggil untuk ikut berjuang dan bila perlu berkorban), maka terlebih dahulu harus ditumbuhkan kesadaran *rumangsa melu handarbeni* (merasa ikut terlibat dalam mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan). Dan tentang Dharma yang ketiga, yaitu *Mulat sarira hangrasa wani* adalah ajaran yang mengandung nilai kebenaran yang bersifat universal dan apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh (mawas diri) akan memberikan ketenangan batin yang merupakan syarat untuk menyatukan pikiran, perasaan dan kemauan (*manunggaling cipta, rasa lan karsa*).

Dewasa ini bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam kegiatan pembangunan ada beberapa bentuk. Pada tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan/ide-ide kreatif, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Pada tahap pembangunan dan tahap peme-

liharaan partisipasi yang diberikan masyarakat dapat berupa uang, tenaga maupun barang/material.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan menurut Cohen (dalam Suparlan, 1993:206-207) menyatakan bahwa gotong royong di kota telah menjadi suatu sebutan yang diartikan sebagai kerjasama antar tetangga. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat berbeda-beda antara kelompok yang satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masyarakat yang berbeda.

Pada karakteristik masyarakat dengan penduduk yang masih asli, mereka memiliki ciri hidup kemasyarakatan orang Jawa, seperti semangat gotong-royong, kebersamaan dan keakraban, semangat tolong menolong dan *asih ing sesami* (mencintai sesama) (Sujamto, 1997:96). Sedangkan karakteristik masyarakat dengan penduduk pendatang sudah kurang memiliki ciri-ciri tersebut, mereka cenderung hidup individualis, lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

2.2 Pengukuran Tingkat Partisipasi

Pemerintah Indonesia secara formal menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan unsur yang paling penting dalam menciptakan keberhasilan pembangunan (Soetrisno, 1995:45). Partisipasi dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, namun dengan sumber dana yang terbatas tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sebanyak mungkin (Rukmana, 1993:214)

Menurut Nabeel Hamdi dan Reinhard Goethert, sebagai bantuan untuk menguji alat dan teknik, tahapan kegiatan pembangunan dan program pemba-

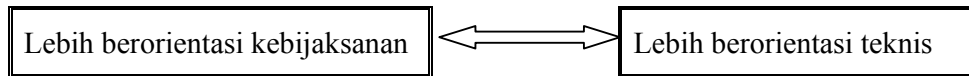
ngunan dihubungkan dalam matriks pada ketelitian tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi digambarkan dengan alat yang disebut Matriks, mulai dari tidak berperan serta, berperan serta tidak langsung, masyarakat sebagai konsultatif, pengendalian terbagi sampai dengan tahap pengendalian penuh oleh masyarakat (sumbu tegak) dan tahapan kegiatan pembangunan mulai dari inisiatif warga, proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan hingga pemeliharaan (sumbu datar).

Matriks tersebut mengasumsikan 3 alasan yang mendasar (Sunarti, 2003: jurnal Tata Loka), yaitu:

- Partisipasi masyarakat bukan merupakan hasil akhir (produk) tetapi lebih sebagai alat atau proses untuk mengarahkan terhadap pembangunan di masyarakat. Ini bukan untuk menyatakan bahwa partisipasi masyarakat pada hakekatnya tidak diperlukan, tetapi malahan akan condong terhadap hasil yang lebih nyata dari proses partisipasi itu sendiri;
- Kepentingan kota dan masyarakat adalah sama-sama legitimasi dan saling memperkuat satu sama lain, sehingga dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan sangat menunjang pembangunan kota;
- Ketepatan teknik beragam menurut derajat tingkat partisipasi yang ada di lingkungan masyarakat pada kegiatan pembangunan, pencapaiannya dikaitkan dengan tahapan-tahapan pembangunan/proyek.

Dalam matriks akan diperoleh lima tingkatan partisipasi menurut derajat keterlibatan masyarakat (lihat Tabel II.1).

TABEL II.1
TINGKAT PARTISIPASI DAN TAHAPAN PROGRAM



Tingkat Partisipasi	Tahapan Program				
	Inisiatif	Rencana	Rancangan	Pelaksanaan	Pemeliharaan
Tidak Ada (None)					
Tidak Langsung (Indirect)					
Konsultatif (Consultative)					
Pengendalian Terbagi (Shared Control)					
Pengendalian Penuh (Full Control)					

Sumber : Nabeel Hamdi dan Reinhard Goethert, *Action Planning for Cities. A Guide to community practice*, John Wiley & Son, 1997 hal.66.

Hubungan tingkat partisipasi dan tahapan program tersebut adalah :

1. Tidak Ada (*none*): tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan tersebut.
2. Tidak langsung (*indirect*): hampir sama dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat, tetapi masih adanya penyampaian informasi atau ketersediaan data. Jadi pada Partisipasi tidak langsung ini ada dua faktor yang dibutuhkan untuk keberhasilan partisipasi ini, yaitu: ketersediaan data yang dapat dipercaya dan memadai serta keahlian dalam mengumpulkan dan mengolah data.
3. Konsultatif (*consultative*): keterlibatan masyarakat secara prinsip dalam menghimpun informasi atau data dan menentukan tindakan yang sesuai menurut mereka. Disini ada beberapa bentuk konsultasi, dari informasi yang dihimpun sampai pengambilan keputusan, dari konsultasi kelompok besar sam-

pai survei individu dan wawancara. Pada tingkatan ini masyarakat berperan sebagai kelompok kepentingan tetapi sedikit dipertimbangkan sebagai *stakeholders*.

4. Pengendalian Terbagi (*shared control*): pada tahapan ini masyarakat dan program pembangunan berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan. Pengambilan keputusan terbagi dalam kelompok yang kecil-kecil untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Pembahasan-pembahasan perlu untuk memasukkan kelompok-kelompok inti dari para pelaku (*stakeholders*) yang mewakili bermacam-macam kepentingan di dalam masyarakat.
5. Pengendalian penuh (*full control*): masyarakat mendominasi dan program pembangunan hanya sebagai penyedia sumber daya (dana). Peran pemerintah hanya melakukan pengamatan atau memberikan sesuatu secara teknis membantu ketika diperlukan. Secara kepemilikan, hal ini terbagi partisipasinya, tapi lebih utuh pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan adalah salah satu tujuan dari partisipasi masyarakat, dan tingkat ini mewakili impian dan praktek partisipasi.

Pada Tahapan Program menurut Nabeel Hamdi seperti yang telah diuraikan diatas, terbagi menjadi lima tahapan, yaitu inisiatif, rencana, rancangan, pelaksanaan/pembangunan dan pemeliharaan. Namun dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan tahapan program pada pengelolaan dana Kontigensi dari Pemerintah Kota Semarang pada setiap pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pembangunan dan tahap pemeliharaan/perbaikan.

2.3 Dana Kontigensi

Pemerintahan di Indonesia baik itu di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan pembangunannya biasanya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini dilaksanakan secara bertahap untuk menampung aspirasi dari masyarakat, biasanya dimulai di kebutuhan tingkat Kelurahan kemudian hasil dari tingkat Kelurahan di musyawarahkan di tingkat Kecamatan untuk disusun skala prioritasnya. Dari tingkat Kecamatan baru kemudian dimusyawarahkan di tingkat Kabupaten/Kota untuk disusun Daftar Skala Prioritas pembangunannya (DSP).

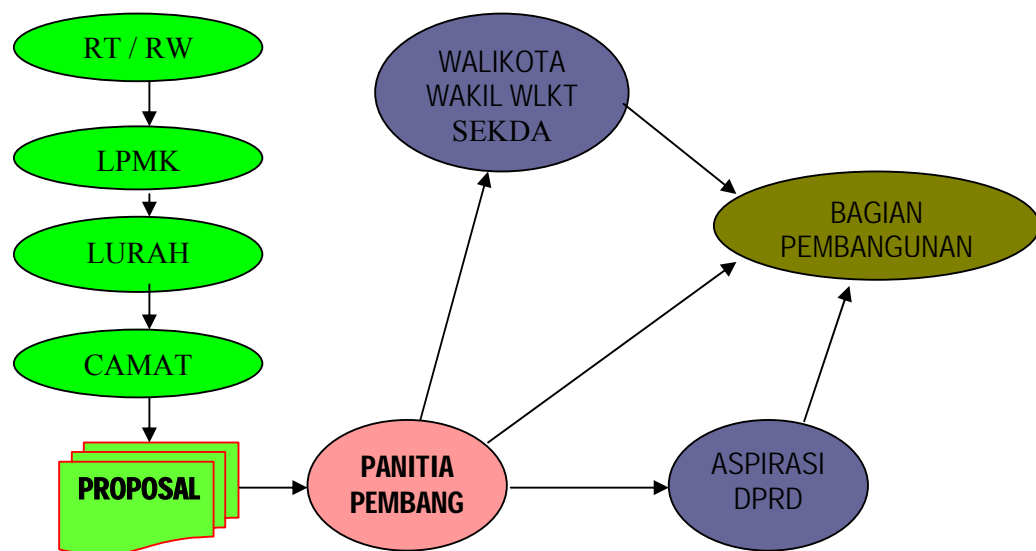
Sejak tahun 2001, pemerintah kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan kotanya selain melalui Musrenbang kota, juga menganggarkan dananya dalam bentuk dana Kontigensi. Dana Kontigensi adalah merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Semarang dalam ikut mewujudkan pembangunan fisik yang digagas, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat di lingkungan permukimannya. Dana Kontigensi ini adalah merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penganggaran bantuan yang kegiatannya disampaikan langsung kepada masyarakat, yang karena skala prioritasnya belum dapat direalisasikan dalam Musrenbang Kota.

Harapan atau tujuan pemerintah kota Semarang dengan adanya penganggaran bantuan Dana Kontigensi ini adalah terlaksananya kegiatan/pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri (swadaya) yang hasilnya akan cepat terwujud dan segera dapat dirasakan manfaatnya. Karena dilaksanakan sendiri, maka diharapkan dapat terjaganya kegotong-royongan masyarakat.

Bentuk dan macam bantuan dana Kontigensi mulai tahun 2001-2008 meliputi :

- Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Umum Wilayah, seperti: penyediaan air bersih, jalan lingkungan, saluran/gorong-gorong, talud, dan lain-lain.
- Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah.
- Bantuan Pembangunan Rehab.Gedung Sekolah, seperti: TK, SD, MI, SMP, MTS, dan lain sebagainya.

2.3.1 Kelembagaan Dana Kontigensi



Sumber: Bag.Pembangunan Setda Kota Semarang, 2008

GAMBAR 2.1
KELEMBAGAAN DANA KONTIGENSI

Dana Kontigensi kota Semarang ini dikelola langsung oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang dan dibawah pengawasan langsung Walikota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya Bagian Pembangunan Setda ini membentuk Panitia Pembangunan yang bertugas merencanakan, menyeleksi,

mengawasi dan mengevaluasi penggunaan Dana Kontigensi. Untuk lebih jelas tentang kelembagaan yang menangani Dana Kontigensi ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

2.3.2 Pengelolaan Dana Kontigensi

a. Tahap Perencanaan (Proses Pengajuan Dana Kontigensi)

Proses pengajuan/permohonan bantuan Dana Kontigensi dari masyarakat yang berawal dari RT/RW/Kelurahan dituangkan dalam bentuk proposal yang memuat antara lain:

1. Pendahuluan, yang berisi: latar belakang (maksud dan tujuan pokok-pokok permasalahan yang ada yang ingin diselesaikan/dipecahkan), lokasi (memuat secara jelas dan detail letak kegiatan yang akan dimohonkan bantuan, seperti: jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dilengkapi dengan denah lokasi), dan target (sasaran riil yang ingin dicapai serta manfaat dari hasil yang dicapai).
2. Kinerja Proyek, yang berisi: Indikator Masukan (besarnya biaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud termasuk besarnya swadaya masyarakat), Indikator Keluaran (volume pekerjaan yang akan dilaksanakan: panjang, lebar, tinggi, luas), Indikator Hasil (tersedianya hasil pekerjaan), Indikator Manfaat (tingkat manfaat yang merupakan nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah) dan Indikator Dampak (meningkatkan arus barang dan ekonomi).
3. Organisasi Proyek atau disebut Panitia Pembangunan, yang terdiri dari: Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi jika diperlukan (disahkan oleh RT, RW, Kelurahan dan LPMK setempat).

4. RAPP (Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan), berisi tentang: kebutuhan bahan dan upah tenaga sesuai harga setempat dan dilengkapi dengan gambar rencana dan foto 0% lokasi yang akan diusulkan serta membuat target waktu pelaksanaan (*time schedule*).

b. Tahap Pembangunan (Setelah Dana Terealisasi)

Setelah penyusunan proposal Panitia Pembangunan segera mengajukannya ke Walikota melalui Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang. Apabila Walikota menyetujui proposal tersebut maka:

1. Panitia Pembangunan wajib melaksanakan pekerjaan 7 (tujuh) hari setelah bantuan diterima.
2. Panitia Pembangunan wajib melaporkan hasil pekerjaan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak bantuan diterima.
3. Laporan pelaksanaan pembangunan menyebutkan jumlah dana yang digunakan, sumber dana, jenis dan volume pekerjaan serta dilampiri foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100%.

c. Tahap Pemeliharaan

Setelah tahap pelaksanaan pembangunan tersebut selesai maka segera dilakukan serah terima pekerjaan dari Panitia Pembangunan di masing-masing RW atau Kelurahan ke Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang. Setelah pihak Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang mnyetujui maka untuk kemudian diserahkan kembali ke Kelurahan setempat untuk dilakukan pemeliharaannya.

2.4 Rangkuman Kajian Literatur

Pelaksanaan pembangunan hanya dapat berhasil dengan baik apabila mendapat dukungan masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan bila masyarakat meyakini bahwa pembangunan itu sejalan dengan aspirasinya. Untuk itu rasa memiliki dan keterlibatan atau *rumangsa melu handarbeni (sense of belonging)* harus benar-benar ditumbuhkan di masyarakat. (Sujamto, 1997:118). Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong royong merupakan modal utama dalam kelangsungan pembangunan nasional. Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan memberikan pengaruh positif pada pemanfaatannya yang langsung dirasakan masyarakat. Hal ini dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki yang pada akhirnya akan tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana tersebut (Yudhohusodo dkk, 1991:148)

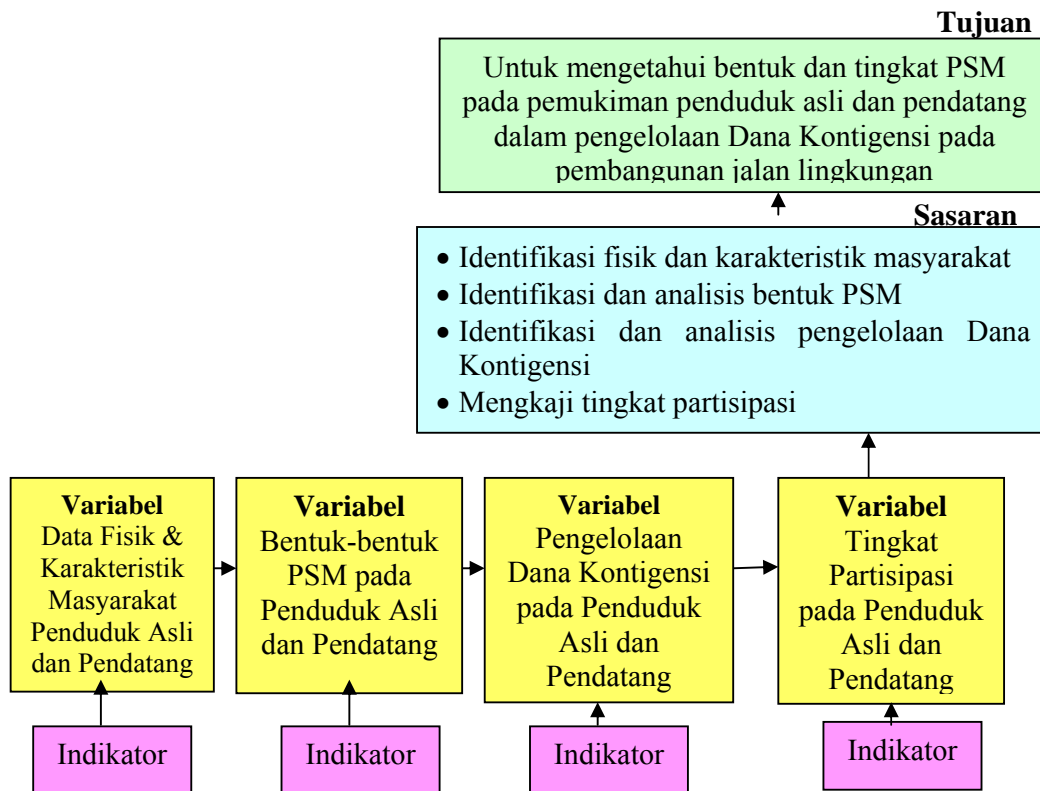
Kelurahan Gedawang yang memiliki dua karakteristik masyarakat yang berbeda yaitu masyarakat pemukiman asli dan pendatang, tentunya dalam pengelolaan Dana Kontigensi juga memiliki bentuk peran serta masyarakat yang berbeda pula. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka secara diagram digambarkan sistematis pencapaian tujuan penelitian. Didalam Proses Pencapaian Tujuan Penelitian tersebut dijabarkan 4 buah variabel penelitian, 17 buah sub variabel, dan indikator penelitiannya, yaitu:

- Kondisi Fisik dan Karakteristik Masyarakat, meliputi: data fisik wilayah (aspek geografis, prasarana jalan) dan data karakteristik penduduk (adat istiadat

budayanya, kondisi perekonomian dan sosial).

- Bentuk Peran Serta Masyarakat, berupa: pikiran, tenaga, barang/material dan dana.
- Pengelolaan Dana Kontigensi, dimulai dari tahap perencanaan, tahap pembangunan dan tahap pemeliharaan.
- Tingkat Partisipasi, dimulai dari jenjang tidak ada partisipasi masyarakat, partisipasi tidak langsung, masyarakat sebagai konsultatif, partisipasi pada tingkat pengendalian terbagi dan partisipasi penuh oleh masyarakat.

Untuk lebih jelas tentang proses pencapaian tujuan penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2.



Sumber : Hasil Analisis, 2008

GAMBAR 2.2
PROSES PENCAPAIAN TUJUAN PENELITIAN

Dari variabel dan sub variabel tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk indikator seperti yang diuraikan pada tabel II.2.

TABEL II.2
VARIABEL DAN INDIKATOR
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA
KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR
Data Fisik dan Karakteristik Masyarakat Penduduk Asli dan Pendetang	Aspek geografis	Data geografis, topografi, luas & pembagian wilayah
	Prasarana jalan	Data dan kondisi jalan di Gedawang
	Penduduk dan budayanya	Jumlah penduduk, kondisi dan tradisi pada dua lokasi pemukiman Gedawang
	Kondisi Perekonomian	Mata pencaharian, jumlah penghasilan, kondisi dan kepemilikan rumah.
	Kondisi Sosial	Tingkat pendidikan, kegiatan pengelolaan Dana Kontigensi di dua lokasi pemukiman.
Bentuk Peran Serta Masyarakat pada Pemukiman Penduduk Asli dan Pendetang	Pikiran	Usulan, saran dan kritik, ide-ide kreatif dalam pengelolaan Dana Kontigensi.
	Tenaga	Sumbangan tenaga dan keaktifan warga dalam kerja bakti.
	Barang/Material	Sumbangan berupa jenis dan jumlah material/bahan.
	Dana	Sumbangan berupa uang (jumlah warga, besaran dan keaktifan membayar).
Pengelolaan Dana Kontigensi pada Pemukiman Penduduk Asli dan Pendetang	Tahap perencanaan	Jumlah warga yang hadir dan jumlah usulannya, frekwensi, kerelaan dan keaktifan warga.
	Tahap pembangunan	Jumlah warga yang hadir, frekwensi, kerelaan dan keaktifan warga, jenis sumbangan dan iuran.
	Tahap pemeliharaan/Perbaikan	Jumlah warga yang hadir, frekwensi, kerelaan dan keaktifan warga, jenis sumbangan dan iuran.
Tingkat Partisipasi pada Pemukiman Penduduk Asli dan Pendetang	Tidak ada	Tidak ada keterlibatan masyarakat pada program pemerintah dalam pembangunan.
	Tidak langsung	Dalam program tersebut masyarakat hanya terlibat pada pemberian informasi atau data.
	Konsultatif	Masyarakat berperan sebagai konsultatif dalam pemberian informasi dan pengambilan keputusan.
	Pengendalian Terbagi	Masyarakat dan program pembangunan berinteraksi secara bersama.
	Pengendalian Penuh	Masyarakat berperan penuh atau mendominasi pembangunan.

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari kajian literatur diatas maka diperoleh temuan-temuan bahwa:

- Karakteristik suatu masyarakat (kondisi penduduk dan budaya, perekonomian dan sosial) akan sangat berpengaruh dalam bentuk peran serta masyarakat yang diberikan pada kegiatan pembangunan (Cohen dalam Suparlan, 1993: 206-207).
- Pada karakteristik masyarakat dengan pemukiman penduduk asli, bentuk peran serta (pikiran, tenaga, barang/material dan dana) yang diberikan tentunya berbeda dengan bentuk peran serta yang diberikan pada pemukiman penduduk pendatang.
- Dalam pengelolaan dana Kontigensi untuk pembangunan jalan yang terdiri dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan, akan sangat berbeda antara karakteristik masyarakat berpenduduk asli dan penduduk pendatang. Pada pemukiman penduduk asli, jalan lingkungan yang dibangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya sehingga menumbuhkan rasa ikut memiliki yang pada akhirnya akan tumbuh kesadaran untuk memelihara.
- Tingkat Partisipasi adalah upaya untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan jalan dengan menggunakan Dana Kontigensi.
- Dengan diperolehnya tingkat partisipasi dan bentuk peran serta pada suatu karakteristik masyarakat, maka dapat menjadi masukan bagi kebijakan Pemerintah Kota Semarang (Kelurahan, Kecamatan dan Walikota) dalam pemberian Dana Kontigensi dengan mempertimbangkan bentuk partisipasi yang dominan dalam suatu masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

KELURAHAN GEDAWANG BANYUMANIK SEMARANG

Kelurahan Gedawang merupakan salah satu kelurahan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Banyumanik Semarang. Kelurahan ini terletak paling ujung selatan Kota Semarang sehingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang.

Secara historis Kelurahan Gedawang ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu tetapi masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Semarang, dan baru pada tahun 1976 masuk kedalam wilayah Kota Semarang karena adanya pemekaran wilayah kota Semarang. Secara administratif Kelurahan Gedawang dengan luas wilayah 232,764 ha, terbagi dalam 6 Rukun Warga (RW I–RW VI).

3.1 Kondisi Fisik Wilayah

3.1.1 Kondisi Geografis

Keadaan geografis Kelurahan Gedawang merupakan daerah pegunungan karena posisinya terletak di bagian atas kota Semarang dengan perbedaan keadaan topografinya sangat tinggi, sehingga dalam satu RW saja ada tempat yang curam, dataran dan bukit. Penggunaan tanahnya sebagian besar berupa perkebunan dan pertanian. Di kelurahan ini juga banyak sungai yang melintas, yaitu sejumlah 5 sungai (sungai Lutung, sungai Gebang, sungai Pakel, sungai Jaten dan sungai Licik). Dengan banyaknya sungai yang melintas di kelurahan tersebut mengakibatkan wilayah tersebut seperti terisolir. Hal ini didukung dengan keadaan alam

yang masih berupa kebun maupun hutan.

Sungai yang menjadi pembatas dengan wilayah atau kelurahan lain seperti sungai Gebang, sungai Licik dan sungai Jaten, semula hanya dibangun jembatan dari kayu. Sungai Gebang menghubungkan dengan Kelurahan Jabungan, sungai Liak menghubungkan dengan Kelurahan Padangsari dan sungai Jaten menghubungkan dengan Kelurahan Pudukpayung.

Secara administratif luas wilayah masing-masing RW di Kelurahan Gedawang dengan luas wilayah 232,764 ha yang terbagi dalam 6 Rukun Warga (RW I – RW VI) dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini.

TABEL III.1
LUAS WILAYAH TIAP RW

No.	RW	Luas Wilayah (Ha)
1.	RW I	83,106
2.	RW II	41,588
3.	RW III	55,614
4.	RW IV	22,940
5.	RW V	21,716
6.	RW VI	7,800
	Jumlah	232,764

Sumber : Data Monografi Kelurahan, Maret 2008

a. Kondisi Geografis Pemukiman Penduduk Asli (RW I)

Kondisi geografis di RW I sangat menggambarkan kondisi wilayah Kelurahan Gedawang, yaitu adanya 4 (empat) sungai yang mengalir di wilayah RW tersebut (sungai Licik, Jaten, Lutung dan Gebang). Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan topografi yang sangat tajam, di satu sisi ada sungai dengan tebing yang curam dan disisi lain terdapat pegunungan dengan lereng yang tajam pula.

Wilayah RW I ini merupakan wilayah yang semula terisolir dan kurang berkembang karena kondisi geografis tersebut. Keadaan alamnyapun cenderung masih terjaga kelestariannya, hal ini ditunjukkan dengan masih banyak wilayah yang berupa hutan (pohon jati, mahoni) maupun kebun (jagung, ketela pohon, durian, rambutan, nangka, dan lain-lain). Dengan melihat Tabel III.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa RW I merupakan wilayah yang paling luas di Kelurahan Gedawang, yaitu 83,106 ha atau sekitar 36% dari luas wilayah kelurahan.

b. Kondisi Geografis Pemukiman Penduduk Pendatang (RW IV)

Dibandingkan dengan kondisi geografis pada RW I, maka kondisi geografis pada RW IV sangat berbeda jauh, karena di wilayah RW IV ini tidak ada sungai yang melalui wilayah tersebut sehingga keadaan topografinya relatif datar saja. Didukung dengan topografi yang datar tersebut, maka banyak pengembang yang membangun *property* (perumahan) di wilayah tersebut.

Kondisi alam di wilayah RW IV juga sangat berbeda jauh dengan RW I karena di wilayah tersebut sudah banyak pengembang yang membangun perumahan. Hutan dan perkebunan juga sudah tidak mendominasi wilayah tersebut. Dengan melihat Tabel III.1, maka dapat diketahui bahwa RW IV hanya memiliki luas wilayah 22,94 ha atau sekitar 10 % dari luas wilayah Kelurahan Gedawang.

3.1.2 Kondisi Prasarana Jalan

Pada awalnya sebelum adanya dana Kontigensi dari Pemerintah Kota Semarang, kondisi jalan di Kelurahan Gedawang hanya berupa jalan tanah atau batu demikian juga dengan jembatan yang masih berupa jembatan kayu. Hanya ruas-ruas jalan utama saja yang sudah di aspal. Namun setelah adanya Dana Kontigensi

mulai tahun 2001, mulai dilakukanlah pembangunan jalan. Setahap demi setahap, penggal demi penggal jalan mulai ditingkatkan. Istilah betonisasi (jalan dibangun dengan beton) dan pavingisasi (jalan dibangun dengan paving) mulai dikenal masyarakat Gedawang.

Dengan kegotong-royongan dan adanya Dana Kontigensi maka secara bertahap pula jembatan juga ditingkatkan kualitasnya. Jembatan yang tadinya hanya berupa jembatan kayu dan hanya dapat dilewati orang dan sepeda, lambat laun dibangun menjadi jembatan beton, sehingga hubungan dengan wilayah lain menjadi terbuka.

a. Kondisi Prasarana Jalan Di Pemukiman Penduduk Asli (RW I)

Kondisi prasarana jalan di RW I sangat tergantung dengan kondisi topografi daerahnya. Pada daerah yang relatif datar maka dapat dibuat jalan yang lebar untuk ukuran masyarakat Gedawang (± 3 meter), namun untuk jalan dengan topografi yang curam (turun naik sangat tajam) maka hanya dibuat jalan setapak yang hanya bisa dilewati orang dan kendaraan roda 2.

Berkaitan dengan kondisi topografi wilayah di RW I yang sangat beragam (turun naik sangat tajam) ini maka pernah muncul permasalahan mengenai Dana Kontigensi. Mestinya pembangunan jalan dilaksanakan dengan betonisasi, namun ternyata dana yang turun berupa pavingisasi maka jalan naik turun tajam tersebut dibangun dengan paving. Hal ini mengakibatkan jalanan jadi licin, karena paving tersebut tertutup oleh pepohonan yang masih rimbun.

Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan kondisi salah satu jalan di RW I (jalan menanjak) yang pembangunan jalannya menggunakan Dana Konti-

gensi dapat dilihat pada Gambar 3.1 sampai dengan Gambar 3.4.



Sumber : Hasil Observasi, Januari 2008

**GAMBAR 3.1
KONDISI JALAN DI RW I
SEBELUM DILEBARKAN**



Sumber : Hasil Observasi, April 2008

**GAMBAR 3.2
KONDISI JALAN DI RW I
SESUDAH DILEBARKAN**



Sumber : Hasil Observasi, Juni 2008

**GAMBAR 3.3
KONDISI JALAN DI RW I
DALAM PROSES PAVINGISASI**



Sumber : Hasil Observasi, Juli 2008

**GAMBAR 3.4
KONDISI JALAN DI RW I
SETELAH DIPAVING dan DIBERI
PEMBATAS**

b. Kondisi Prasarana Jalan di Pemukiman Penduduk Pendatang (RW IV)

Pembangunan prasarana jalan di RW IV selama ini masih menjadi tanggungan pihak pengembang perumahan, karena sebagai penyedia fasilitas perumahan maka pengembang juga dituntut untuk menyediakan prasarana, seperti jalan, air bersih, jaringan listrik, drainase serta sarana pemukiman. Namun untuk

perumahan yang sudah lama seperti perumahan Gedawang Pesona Asri, Gedawang Permai I dan Gedawang Permai II, pengembang sudah tidak lagi menyediakan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang telah rusak sehingga pada tahun 2008 ini RW IV juga mengajukan permintaan bantuan dana (dana Kontigensi) dalam pembangunan jalan lingkungannya. Untuk lebih jelas kondisi jalan di RW IV yang pada tahun 2008 ini pembangunan jalannya menggunakan Dana Kontigensi dapat dilihat pada Gambar 3.5 dan 3.6.



Sumber : Hasil Observasi, April 2008

GAMBAR 3.5
KONDISI JALAN DI RW IV
SEBELUM DIPAVING



Sumber : Hasil Observasi, Juni 2008

GAMBAR 3.6
KONDISI JALAN DI RW IV
SETELAH DIPAVING

3.2 Karakteristik Masyarakat

Tinjauan karakteristik masyarakat ini disesuaikan dengan lingkup substansi yaitu yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana Kontigensi di RW I dan RW IV Kelurahan Gedawang. Karakteristik masyarakat tersebut antara lain: jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga, adat istiadat masyarakat, kondisi perekonomian dan kondisi sosialnya.

3.2.1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga

Berdasarkan data monografi Kelurahan Gedawang bulan Maret 2008, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Gedawang berjumlah 4.319 orang, terdiri 2.155 laki-laki dan 2.164 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.146 KK. Namun dalam pembagiannya tiap RW tidak dirinci langsung menurut jenis kelaminnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga masing-masing RW di Kelurahan Gedawang dapat dilihat pada Tabel III.2.

TABEL III.2
JUMLAH PENDUDUK DAN KK TIAP RW

No.	RW	Jumlah Penduduk (Orang)	Jumlah KK	Jumlah RT
1.	RW I	696	183	5
2.	RW II	875	224	8
3.	RW III	632	207	8
4.	RW IV	922	230	11
5.	RW V	868	214	5
6.	RW VI	326	88	4
	Jumlah	4.319	1.146	41

Sumber : Data Monografi Kelurahan, Maret 2008

3.2.2 Adat Istiadat Masyarakat

Kelurahan Gedawang adalah merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Banyumanik yang masih memiliki adat istiadat kebudayaan Jawa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya acara *resik-resik desa*, *gugur gunung*, *selamatan*, *punggahan*, *pujukan* dan masih adanya kegiatan kunjungan ke *Punden* atau makam yang dikeramatkan pada malam Jumat wage bulan Sapar.

Pada acara *Punden* tersebut, hampir seluruh masyarakat Gedawang maupun di luar Gedawang, berbondong-bondong mengunjungi makam *mbah Kramat*

(makam yang dikeramatkan tersebut) sambil membawa tumpeng berupa nasi dengan ayam bakar. Acara *Punden* tersebut merupakan wujud syukur warga karena dengan adanya *mbah Kramat*, maka berdirilah desa Gedawang.

a. Adat Istiadat Masyarakat Penduduk Asli (RW I)

. Masyarakat penduduk RW I dapat dikatakan pemukiman asli, karena lebih dari 80 % didominasi oleh penduduk asli Gedawang. Ciri-ciri utama budaya masyarakat Jawa masih tercermin pada penduduk RW I kelurahan Gedawang ini, seperti: percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai *Sangkan Paraning Dumadi*, idealistis, percaya kepada sesuatu yang bersifat immateriil (kebendaan) dan hal-hal yang bersifat kodrati serta cenderung kearah mistik, mengutamakan cinta kasih, *gotong-royong*, *guyub*, rukun dan damai, luwes, lentur, dan *asih ing sesami* (mencintai sesama) (Sujamto, 1997:96).

Masyarakat di RW I merupakan cerminan karakteristik masyarakat Gedawang. Hal ini ditunjukkan dengan adat istiadat kebudayaan Jawa yang masih tetap dipegang, *seperti resik-resik desa*, *gugur gunung*, *selamatan*, *punggahan*, *pudunan* dan lain-lain, dan selama ini masih berjalan baik. Sifat dan semangat gotong-royong, kebersamaan dan keakraban sangat terasa di pemukiman ini.

b. Adat Istiadat Masyarakat RW IV

Masyarakat penduduk RW IV Kelurahan Gedawang menurut jumlah penduduknya didominasi penduduk pendatang (sekitar 80% dari jumlah penduduknya merupakan penduduk pendatang). Perumahan yang telah ada disana yaitu Perumahan Gedawang Pesona Asri, Puri Gedawang Permai I dan Puri Gedawang Permai II, Perumahan Villa Gedawang, Puri Gedawang Indah dan Widya Geda-

wang. Perumahan tersebut ada yang telah berdiri sejak tahun 1998.

Kalau penduduk di RW I cenderung homogen, karena kebanyakan berasal dari desa Gedawang itu sendiri, maka penduduk pada RW IV cenderung heterogen karena berasal dari berbagai wilayah Jawa maupun Indonesia dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini tentunya membedakan antara ciri-ciri masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Latar belakang budaya yang berbeda tersebut tentu sedikit banyak memberikan andil dalam bentuk peran serta masyarakatnya dalam pengelolaan Dana Kontigensi.

3.2.3 Kondisi Perekonomian

Kondisi ekonomi suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan demografi dan geografinya. Dengan kondisi geografis yang berupa pegunungan dan banyaknya sungai yang mengalir di wilayahnya dan kondisi kependudukan dengan pendidikan yang relatif masih rendah, maka mata pencaharian penduduk Kelurahan Gedawang cenderung hanya mengerjakan lahan perkebunan mereka.

TABEL III.3
PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No.	Jenis Mata Pencaharian	Tk. Kel (orang)	RW I (orang)	RW IV (orang)
1.	Petani sendiri	409	72	9
2.	Buruh tani	340	51	9
3.	Nelayan	-	-	-
4.	Pengusaha	-	-	64
5.	Buruh Industri	524	86	74
6.	Buruh Bangunan	389	63	13
7.	Pedagang	957	147	37
8.	Pengangkutan	6	-	2
9.	Pegawai Negeri Sipil/ABRI	345	4	84
10.	Pensiunan	165	2	-
11.	Lain-lain	534	62	169
	Jumlah	3.669	487	461

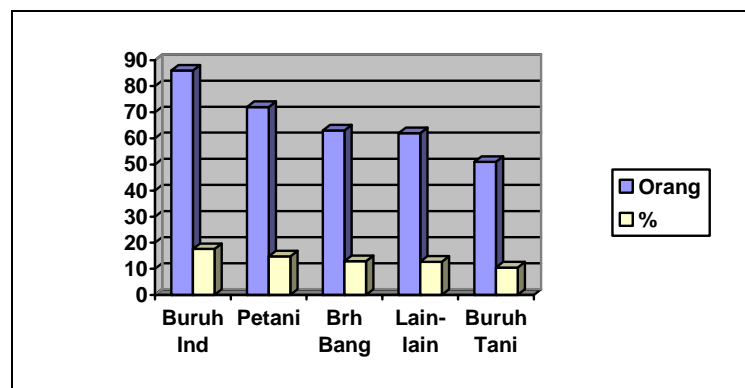
Sumber : Data Monografi Kelurahan, Maret 2008

Sehingga mata pencaharian masyarakat Gedawang didominasi jenis kegiatan pedagang (957 orang), petani sendiri (409 orang), buruh tani (340 orang), buruh industri (524 orang) dan lain-lain (534 orang). Untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian penduduk Kelurahan Gedawang, di RW I dan di RW IV, dapat dilihat pada tabel III.3.

A. Mata Pencaharian dan Jumlah Pendapatan Penduduk

1. Mata Pencaharian dan Jumlah Pendapatan Penduduk RW I

Dengan melihat tabel data mata pencaharian penduduk diatas, maka jumlah penduduk yang bekerja di RW I sejumlah 70% dari jumlah penduduk (696 orang) atau 487 orang. Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut kebanyakan sebagai pedagang sejumlah 147 orang atau sebesar 30%, buruh industri sejumlah 86 orang atau sebesar 17,6%, petani sendiri sejumlah 72 orang atau sebesar 14,8%, buruh bangunan sejumlah 63 orang atau sebesar 12,9%, lain-lain (buruh rumah tangga, wiraswasta, dan lain-lain) sejumlah 62 orang atau sebesar 12,7% dan buruh tani sejumlah 51 orang atau sebesar 10,5%. Untuk mengetahui lebih jelas prosentase mata pencaharian penduduk RW I dapat dilihat pada Gambar 3.7.



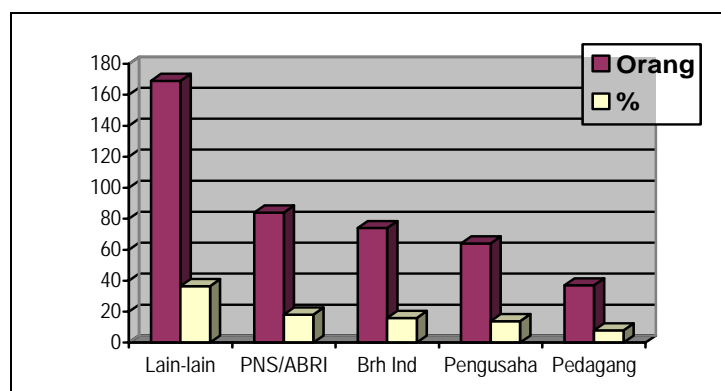
Sumber : Data primer diolah, 2008

GAMBAR 3.7
PROSENTASE PENDUDUK RW I MENURUT MATA PENCAHARIAN

Selain berdasarkan data mata pencaharian penduduk, maka juga dilakukan peninjauan dengan survei responden dalam hal tingkat pendapatan penduduk. Dengan melakukan survei responden pada RW I, maka sebagian besar berpenghasilan Rp.1 juta–Rp. 1,5 juta sejumlah 20 responden atau sebesar 57,2%, berpenghasilan diatas Rp.1,5 juta sejumlah 4 responden atau sebesar 11,4% dan berpenghasilan Rp.500 ribu–Rp. 1 juta sejumlah 11 responden atau sebesar 31.4%.

2. Mata Pencaharian Penduduk RW IV

Pada penduduk RW IV dengan jumlah penduduk 922 orang, sedangkan yang bekerja hanya sejumlah 461 orang atau 50% dari jumlah penduduk karena kebanyakan penduduk RW IV merupakan keluarga muda dan yang bekerja kebanyakan suami istri. Dengan melihat tabel III.3, maka kebanyakan penduduk RW IV bekerja di bidang lain-lain sejumlah 169 orang atau sebesar 36,6%, pegawai negeri sipil/ABRI/dosen sejumlah 84 orang atau sebesar 18,2%, Buruh Industri sejumlah 74 orang atau sebesar 16%, pengusaha sejumlah 64 orang atau sebesar 13,9% dan pedagang sejumlah 37 orang atau sebesar 8%. Untuk lebih jelasnya prosentase mata pencaharian penduduk RW IV dapat dilihat pada Gambar 3.8.



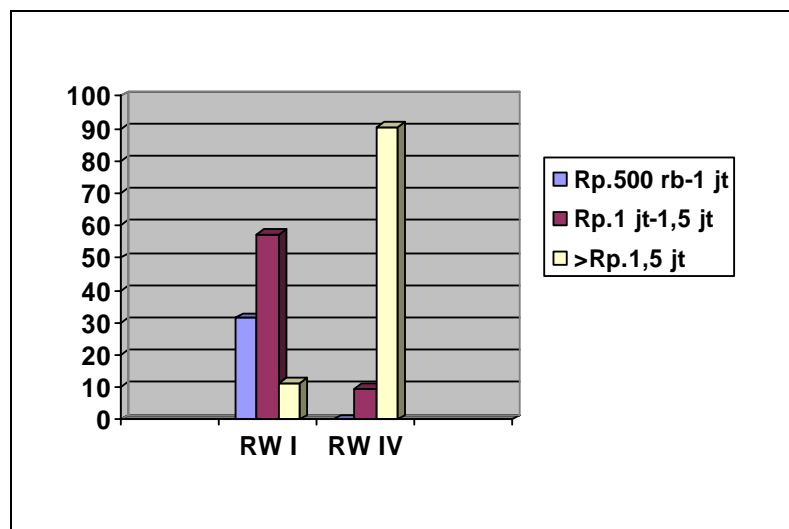
Sumber : Data primer diolah, 2008

GAMBAR 3.8
PROSENTASE PENDUDUK RW IV MENURUT MATA PENCAHARIAN

Berdasarkan data mata pencaharian tersebut dan survei responden, dalam hal tingkat pendapatan penduduk RW IV sebagian besar berpenghasilan Rp.1 juta – Rp. 1,5 juta yaitu sejumlah 5 responden (11,1%) dan berpenghasilan diatas Rp.1,5 juta sejumlah 40 responden (88,9%).

Dengan melihat data tingkat pendapatan baik itu pada penduduk di RW I maupun penduduk RW IV maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk RW I memiliki penghasilan rendah dan penduduk RW IV memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di RW I ada keterbatasan penduduk dalam penyediaan dana untuk kegiatan pembangunan maupun pemeliharaan jalan dan pada RW IV tidak mengalami kendala dalam penyediaan dana baik itu untuk pembangunan jalan maupun pemeliharannya.

Untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk menurut tingkat pendapatan baik itu di RW I maupun di RW IV dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut ini.



Sumber : Data primer diolah, 2008

GAMBAR 3.9
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDAPATAN

B. Status Kepemilikan Rumah

1. Status Kepemilikan Rumah Penduduk RW I

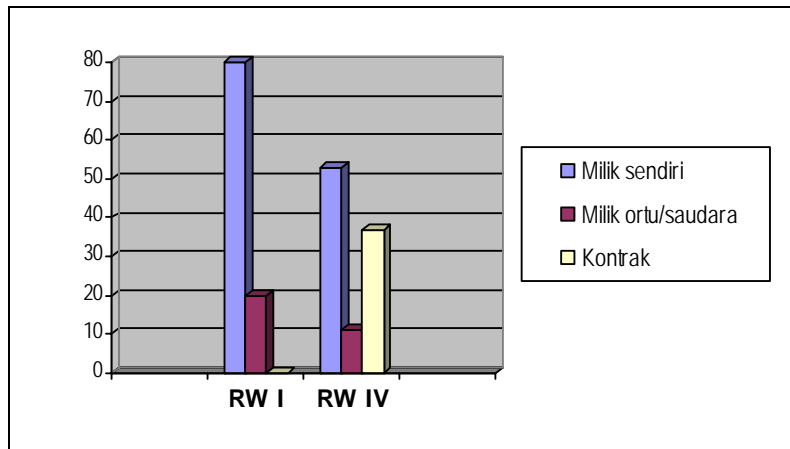
Dengan berdasarkan survei responden yang telah dilakukan, maka sebagian besar warga RW I hampir semuanya mengakui status huniannya milik sendiri 28 responden (80%) dan tidak ada yang mengontrak maupun numpang, hanya sebagian kecil 7 responden (20%) masih merupakan milik orang tua.

Kondisi awal kepemilikan tanah di RW I Gedawang ini dahulu kala hanya milik sekitar 5 orang (semuanya telah tua dan tidak diketahui tahun kelahirannya) yaitu: mbah Jono, mbah Sahar, mbah Kasdi, mbah Basiran dan mbah Karta, karena pada saat itu penduduk juga masih sedikit. Namun seiring perkembangan jaman dan adanya anak, cucu dan buyut, maka tanah tersebut kemudian dibagi-bagi sesuai jumlah anak dan cucunya. Sehingga kebanyakan penduduk asli Gedawang telah memiliki tanah dan rumah sendiri.

2. Status Kepemilikan Rumah Penduduk RW IV

Tidak demikian dengan penduduk RW IV yang kebanyakan penduduk pendatang dan menempati perumahan. Untuk memiliki rumah dan tanah yang mereka tempati harus dengan membeli lewat pengembang yang telah menyediakan rumah dan sarana prasarananya. Hal itu mengakibatkan status kepemilikan rumah di RW IV sangat beragam, yaitu milik sendiri sejumlah 24 responden (53%), milik orang tua/saudara sejumlah 5 responden (11%) dan sejumlah 16 responden kontrak (36%).

Untuk lebih detail tentang komposisi status kepemilikan rumah baik di RW I maupun RW IV dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Sumber : Data primer diolah, 2008

GAMBAR 3.10
PROSENTASE PENDUDUK
MENURUT STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

C. Lama Tinggal Penduduk di Kelurahan Gedawang

Lama tinggal penduduk atau lamanya menjadi anggota masyarakat dalam suatu wilayah dapat menunjukkan sebuah indikasi adanya keterikatan penduduk tersebut baik secara fisik dan non fisik terhadap wilayah yang ditempatinya. Dengan lamanya tinggal maka keterikatan dengan penduduk sekitarnya akan lebih kental sehingga akan terjalin rasa kebersamaan maupun kegotong-royongan. Demikian juga dalam pemeliharaan wilayahnya, seorang penduduk yang telah lama tinggal akan memiliki rasa ‘handarbeni’ atau memiliki terhadap wilayahnya.

1. Lama Tinggal Penduduk di RW I

RW I dahulunya merupakan cikal bakal keberadaan Kelurahan Gedawang selain RW II dan RW III. Hal ini disebabkan karena ada beberapa penduduk yang telah lama berdiam disitu jauh sebelum Kelurahan Gedawang masuk dalam wilayah administrasi kota Semarang. Di RW I sebagian besar penduduknya ting-

gal lebih dari 10 tahun bahkan sejak lahir banyak yang sudah tinggal di Gedawang khususnya RW I, seperti mbah Jono, mbah Sahar, mbah Kasdi, mbah Basiran, mbah Karta dan keturunannya serta hanya beberapa yang baru tinggal antara 5-10 tahun atau kurang dari 5 tahun.

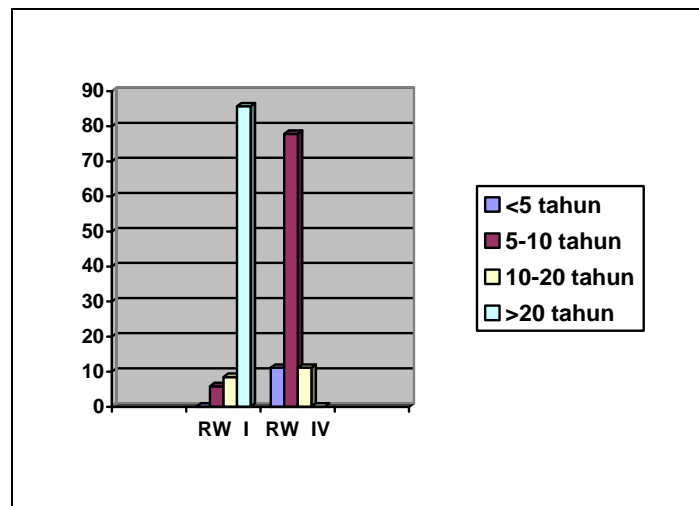
Berdasarkan data dari 35 responden, untuk penduduk yang tinggal diatas 20 tahun sejumlah 30 responden (85,7%), penduduk yang lama tinggal antara 10-20 tahun sejumlah 3 responden (8,5%), penduduk yang lama tinggal antara 5-10 tahun sejumlah 2 responden (5,8%). Hal ini tentunya menunjukkan tingginya tingkat keterikatan antar anggota masyarakat, sehingga dalam setiap kegiatan baik itu dalam ‘Jumpa Warga’ maupun kerja bakti mereka sangat rukun dan *guyub*.

2. Lama Tinggal Penduduk di RW IV

Penduduk RW IV yang sebagian besar penduduknya merupakan penduduk pendatang (perumahan) kebanyakan baru tinggal kurang dari 10 tahun bahkan banyak yang tinggal kurang dari 5 tahun. Penduduk pendatang tersebut menempati perumahan-perumahan yang ada di lingkungan RW IV yang baru didirikan pada tahun 1998. Namun demikian di lingkungan RW IV ini masih ada beberapa penduduk asli sejumlah 5 orang dan juga kami jadikan sebagai responden.

Untuk penduduk yang tinggal antara 10-20 tahun sejumlah 5 responden (11,1%), penduduk yang lama tinggal antara 5-10 tahun sejumlah 35 responden (77,8%) dan penduduk dengan lama tinggal kurang dari 5 tahun 5 responden (11,1%).

Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi/prosentase lama tinggal penduduk baik di RW I maupun di RW IV dapat dilihat pada Gambar 3.11.



Sumber : Data primer diolah, 2008

GAMBAR 3.11
PROSENTASE LAMA TINGGAL PENDUDUK

Berdasarkan data kondisi lama tinggal penduduk tersebut menunjukkan bahwa hampir semua penduduk yang tinggal di RW I diasumsikan memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan lingkungan yang ada karena telah lama tinggal didalamnya atau telah lama menjadi anggota masyarakat di RW I. Namun tidak demikian dengan penduduk di RW IV yang merupakan penduduk pendatang, mereka kurang memiliki keterikatan antar anggota masyarakat.

3.2.4 Kondisi Sosial

Kondisi sosial yang akan ditinjau kaitannya dengan penelitian pengelolaan dana Kontigensi ini hanya tingkat pendidikan penduduk. Hal ini kaitannya dengan karakteristik penduduk dalam pemahamannya terhadap proyek atau kegiatan pembangunan jalan yang akan dilangsungkan di wilayah mereka.

a. Tingkat Pendidikan Penduduk RW I

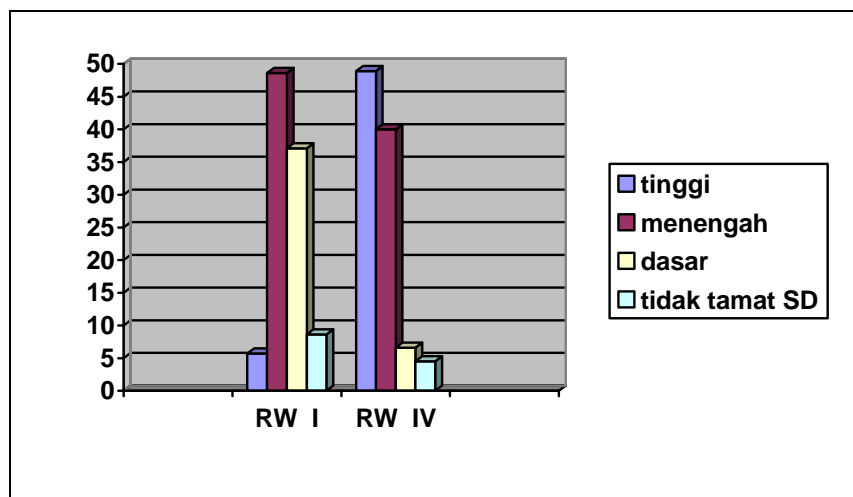
Tingkat pendidikan penduduk di RW I berdasarkan hasil survei respon-

den memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, 5,7% atau sejumlah 2 responden memiliki pendidikan tinggi, 48,6% atau sejumlah 17 responden memiliki pendidikan menengah, 37,1% atau sejumlah 13 penduduk memiliki tingkat pendidikan dasar dan 8,6% atau sejumlah 3 responden memiliki pendidikan tidak tamat SD.

b. Tingkat Pendidikan Penduduk RW IV

Kondisi tingkat pendidikan di RW IV juga bervariasi dan para responden sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Sejumlah 22 responden atau 48,9% responden memiliki tingkat pendidikan tinggi, selanjutnya sejumlah 18 responden atau 40% responden memiliki tingkat pendidikan menengah, sejumlah 3 responden atau 6,6% memiliki tingkat pendidikan dasar dan 2 responden 4,5% responden memiliki pendidikan tidak tamat SD.

Untuk lebih jelas tentang prosentase dan komposisi tingkat pendidikan penduduk baik itu di RW I maupun RW IV dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Sumber : Data primer diolah, 2008

GAMBAR 3.12
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk di RW I atau penduduk asli cenderung masih rendah karena didominasi pada tingkat pendidikan menengah dan dasar. Sedangkan pada RW IV atau penduduk pendatang relatif lebih tinggi karena didominasi pada tingkat pendidikan tinggi dan menengah.

3.3. Dana Kontigensi di Kelurahan Gedawang

Dana Kontigensi dari Pemerintah Kota Semarang dapat berupa: bantuan pembangunan prasarana umum wilayah (pembangunan jalan, saluran/gorong-gorong, talud, penyediaan air bersih), bantuan pembangunan tempat ibadah dan bantuan pembangunan rehabilitasi gedung sekolah (SD, MI, SMP, SMA, MA). Berdasarkan Buku Pembangunan Kelurahan Gedawang yang memuat kegiatan pembangunan mulai tahun 2001-2008, maka dapat diketahui data alokasi Dana Kontigensi pada Kelurahan Gedawang.

Dengan melihat tabel III.4 berikut, maka dapat diketahui bahwa Dana Kontigensi di Kelurahan Gedawang sangat beragam dan untuk alokasi perbaikan jalan (memperbaiki jalan yang rusak) dan peningkatan jalan (pembangunan jalan yang semula jalan tanah ditingkatkan menjadi jalan paving atau beton ataupun aspal) ternyata tiap tahun mendapat bantuan. Dari tabel tersebut, swadaya masyarakat ternyata juga mengimbangi setiap kegiatan pembangunan. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi warga Kelurahan Gedawang, karena dapat meningkatkan kehidupan mereka. Kegiatan perekonomianpun mulai ada pergerakan, seperti dengan dibangunnya pasar Gedawang pada tahun 2004, terminal bus dalam kota serta menjamurnya perumahan yang dibangun oleh para pengembang.

3.3.1 Dana Kontigensi di RW I

Sejak digulirkannya Dana Kontigensi oleh Walikota Semarang (dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang) yaitu pada tahun 2001 sampai tahun 2008 ini, maka RW I Kelurahan Gedawang selalu berusaha mengajukan permohonan bantuan. Permohonan bantuan yang berupa Proposal tersebut selalu memperoleh persetujuan meskipun tidak sesuai dengan jumlah bantuan dan jumlah alokasi yang mereka ajukan. Namun hal ini tidak menyurutkan warga untuk tetap membangun daerahnya.

Pembangunan jalan baru maupun peningkatan jalan yang semula jalan tanah atau jalan batu menjadi paving, beton maupun aspal selalu diupayakan tiap tahun. Warga dengan semangat menyusun perencanaan pada tiap pertemuan warga 'Jumpa Warga' serta melakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan kerja bakti yang diadakan secara rutin. Untuk mengetahui jumlah Dana Kontigensi pada pembangunan jalan yang dialokasikan tiap tahun di RW I serta jumlah swadaya dari masyarakat dapat dilihat pada tabel III.5.

TABEL III.5
DANA KONTIGENSI DAN SWADAYA MASYARAKAT RW I
PADA PEMBANGUNAN JALAN

NO	TAHUN	JUMLAH DANA		SPESIFIKASI	LOKASI
		DANA KONTIGENSI	SWADAYA		
1.	2001	Rp.25.000.000,-	Rp.4.400.000,-	Aspal ATB	Jalan utama
2.	2002	Rp.25.000.000,-	Rp.9.000.000,-	Aspal hotmix	Jalan utama
3.	2003	Rp. 7.000.000,-	Rp.5.200.000,-	Paving	Jalan lingk.
4.	2004	Rp. 7.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Paving	Jalan lingk.
5.	2005	Rp.10.000.000,- Rp. 4.000.000,-	Rp.10.000.000,- Rp. 2.500.000,-	Aspal hotmix Paving	Jalan utama Jalan lingk.
6.	2006	Rp.10.000.000,-	Rp. 0,-	Paving	Jalan lingk.
7.	2007	Rp. 9.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Paving	Jalan lingk.
8.	2008	Rp. 4.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Paving	Jalan lingk.

Sumber : Data primer diolah, 2008

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 dan 2002, RW I mendapat bantuan Dana Kontigensi yang cukup besar karena untuk pembangunan jalan utama Kelurahan Gedawang. Diharapkan dengan adanya pembangunan jalan tersebut dapat membuka akses RW I dengan RW yang lain maupun dengan wilayah sekitarnya. Karena merupakan jalan utama Kelurahan yang menghubungkan dengan kelurahan lain, maka konstruksi jalan yang digunakan adalah aspal.

Sedangkan untuk jalan lingkungan atau jalan didalam wilayah RW I atau jalan yang menghubungkan antar RT digunakan paving. Hal tersebut dipilih dengan pertimbangan karena proses pembangunan jalan dengan paving dapat dilakukan oleh penduduk sendiri. Pengerjaannyapun tidak harus sekali selesai, tetapi dapat dilakukan secara bertahap dalam acara kerja bakti.

3.3.2 Dana Kontigensi di RW IV

Berbeda dengan RW I, maka RW IV ini kurang terlalu membutuhkan dana bantuan untuk pembangunan wilayahnya terutama pembangunan jalan, sehingga ada beberapa tahun yang tidak memperoleh bantuan Dana Kontigensi. Hal ini memang tidak terlalu dipermasalahakan oleh penduduk RW IV karena RW IV ini didominasi oleh perumahan formal yang tadinya segala sarana dan prasarana disediakan oleh pengembang perumahan tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai alokasi Dana Kontigensi dan swadaya masyarakat RW IV dalam pembangunan jalannya dapat dilihat pada tabel III.6.

TABEL III.6
DANA KONTIGENSI DAN SWADAYA MASYARAKAT RW IV
PADA PEMBANGUNAN JALAN

NO	TAHUN	JUMLAH DANA		SPESIFIKASI	LOKASI
		DANA KONTIGENSI	SWADAYA		
1.	2001	-	-	-	-
2.	2002	-	-	-	-
3.	2003	Rp. 7.500.000,-	Rp.5.000.000,-	Aspal hotmix	Jalan utama
4.	2004	Rp. 7.000.000,-	Rp.6.500.000,-	Paving	Jalan utama perumahan
5.	2005	-	-	-	-
6.	2006	Rp. 3.500.000,-	Rp. 0,-	Paving	Jalan lingk.
7.	2007	Rp. 4.500.000,-	Rp.5.000.000,-	Paving	Jalan lingk.
8.	2008	Rp. 5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Paving	Jalan utama perumahan

Sumber : Data primer diolah, 2008

Berdasarkan data diatas, dari 8 (delapan) tahun sejak digulirkannya Dana Kontigensi, penduduk RW IV memperoleh bantuan dana hanya 5 (empat) tahun, yaitu tahun 2003, 2004, 2006, 2007 dan 2008. Kebutuhan akan bantuan dana tersebut dikarenakan jalan yang berada di lingkungan mereka telah rusak dan butuh perbaikan. Dalam hal ini perbaikan jalan sudah bukan menjadi tanggungan pihak pengembang, mengingat perumahan yang berada di RW IV yaitu Perumahan Gedawang Pesona Asri, Perumahan Gedawang Indah dan Perumahan Gedawang Permai I dan Gedawang Permai II telah berusia 10 tahun.

Sedangkan pada tahun 2003, RW IV memperoleh bantuan Dana Kontigensi sebesar Rp.7.500.000,- dan diimbangi dengan swadaya masyarakat sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembangunan jalan utama Kelurahan Gedawang, sehingga menggunakan aspal hotmix.

BAB IV

ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI PADA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN

4.1 Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana pembangunan pada dasarnya dapat dikenali dari bentuk peran serta yang terjadi dan seperti yang telah diuraikan diatas bahwa suatu kegiatan peran serta dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk, mulai bentuk pikiran, tenaga, barang/material dan dana. Bentuk kegiatan dalam peran serta dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Peran serta juga dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau diserahkan kepada pihak lain. Selain itu bentuk peran serta dapat dikenali dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

4.1.1 Bentuk Peran Serta Masyarakat RW I

Bentuk peran serta masyarakat RW I Kelurahan Gedawang yang merupakan pemukiman penduduk asli berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan semangat 'keguyuban' (kebersamaan) dan kegotong-royongannya. Hal ini sedikit banyak dilatarbelakangi karakteristik masyarakat baik itu sosial dan ekonomi yang berkembang di RW I, seperti dengan adanya adat istiadat yang masih berlangsung hingga saat ini, masih adanya hubungan kekerabatan dan lamanya mereka berdomisili atau menjadi anggota masyarakat. Tingkat pendapatan dan pendidikan juga memberikan pengaruh bentuk peran serta di RW I.

Untuk lebih jelas tentang bentuk peran serta masyarakat yang ada di RW I (pemukiman penduduk asli) ini dapat dilihat pada tabel IV.1.

TABEL IV.1
PENILAIAN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT
PADA PEMUKIMAN PENDUDUK ASLI (RW I)

NO.	BENTUK PERAN SERTA	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
I.	PIKIRAN			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam pertemuan		35	167
	a. Tidak ada warga yang hadir	1	0	0
	b. Sedikit warga yang hadir	2	0	0
	c. Separuh warga hadir	3	0	0
	d. Sebagian besar warga hadir	4	8	32
	e. Semua warga hadir	5	27	135
	2. Frekwensi usulan warga dalam rapat		35	161
	a. Tidak pernah ada yang usul	1	0	0
	b. Jarang sekali ada yang usul	2	0	0
	c. Kadang-kadang	3	4	12
	d. Sering	4	6	24
	e. Selalu	5	25	125
	3. Pelibatan warga dalam perencanaan jalan		35	170
	a. Tidak pernah	1	0	0
	b. Jarang sekali	2	0	0
	c. Kadang-kadang	3	0	0
	d. Sering	4	5	20
	e. Selalu	5	30	150
	Jumlah Nilai Pikiran			498
	Prosentase			94,8 %
II.	TENAGA			
	1. Kerelaan warga dalam kerja bakti		35	175
	a. Tidak suka sama sekali	1	0	0
	b. Terpaksa	2	0	0
	c. Biasa saja	3	0	0
	d. Agak suka kerja bakti	4	0	0
	e. Selalu berangkat dengan sukarela	5	35	175
	2. Kehadiran warga dalam kerja bakti		35	166
	a. Tidak pernah	1	0	0
	b. Jarang sekali	2	0	0
	c. Kadang-kadang	3	0	0
	d. Sering hadir	4	0	0
	e. Selalu hadir	5	9	36
			26	130

Lanjutan

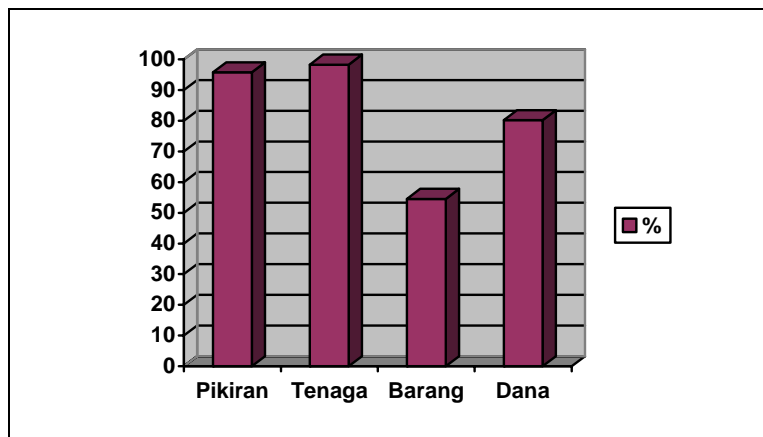
NO.	BENTUK PERAN SERTA	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
	3. Pembangunan dilaksanakan orang lain		35	175
	a. sangat setuju	1	0	0
	b. Setuju	2	0	0
	c. Sedikit setuju	3	0	0
	d. Kurang setuju	4	0	0
	e. Tidak setuju sama sekali	5	35	175
	Jumlah Nilai Tenaga Prosentase			516 98,3%
III.	BARANG/MATERIAL			
	1. Jenis sumbangan barang/material (bahan bangunan, snack, makan, minum)		35	78
	a. Tidak menyumbang sama sekali	1	6	6
	b. Menyumbang salah satu	2	21	42
	c. Menyumbang 2 diantaranya	3	4	12
	d. Menyumbang 3 diantaranya	4	2	8
	e. Menyumbang semuanya.	5	2	10
	2. Jumlah warga yang menyumbang barang		35	78
	a. Tidak ada	1	6	6
	b. Sedikit	2	21	42
	c. Separuh warga	3	4	12
	d. Hampir semua menyumbang	4	2	8
	e. Semua menyumbang	5	2	10
	3. Kerelaan warga untuk menyumbang:		35	130
	a. Tidak suka menyumbang	1	0	0
	b. Menyumbang tapi terpaksa	2	0	0
	c. Kadang-kadang menyumbang	3	18	54
	d. Sering menyumbang	4	9	36
	e. Selalu menyumbang	5	8	40
	Jumlah Nilai Barang/Material Prosentase			286 54,5%
IV.	DANA			
	1. Besaran sumbangan		35	87
	a. Tidak menyumbang	1	2	2
	b. s/d Rp.5.000,-	2	25	50
	c. Rp.5.000,- - Rp.10.000,-	3	0	0
	d. Rp.10.000,- - Rp.20.000,-	4	5	20
	e. Rp.20.000 keatas	5	3	15
	2. Jumlah warga yang menyumbang uang		35	172
	a. Tidak ada	1	0	0
	b. Sedikit	2	0	0
	c. Separuh warga	3	0	0
	d. Hampir semua menyumbang	4	3	12
	e. Semua menyumbang	5	32	160

Lanjutan

NO.	BENTUK PERAN SERTA	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
	3. Keaktifan membayar iuran		35	162
	a. Sangat rendah	1	0	0
	b. Rendah	2	0	0
	c. Sedang	3	4	12
	d. Tinggi	4	5	20
	e. Sangat tinggi	5	26	130
	Jumlah Nilai Dana			421
	Prosentase			80,2%

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Untuk memperjelas tabel penilaian bentuk peran serta masyarakat pada penduduk RW I dapat dilihat pada gambar 4.1 tentang prosentase masing-masing bentuk peran serta masyarakat. Prosentase tersebut merupakan jumlah nilai pada masing-masing bentuk peran serta terhadap jumlah nilai maksimalnya yaitu 525 yang diperoleh dari jumlah pertanyaan (3) dikalikan skala nilai tertinggi (5) dikalikan jumlah rsponden (35).



Sumber : Hasil Analisa, 2008

GAMBAR 4.1
PROSENTASE BENTUK PERAN SERTA RW I

Dengan memperhatikan hasil kuesioner yang telah dilakukan analisa diatas maka bentuk peran serta yang paling dominan pada RW I berupa tenaga

yaitu sebesar 98,3%. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Kerelaan warga RW I yang selalu berangkat kerja bakti dengan sukarela yaitu sebanyak 35 responden atau sebesar 100%. Hal yang sangat mendukung kegiatan-royongan warga RW I untuk selalu dapat berangkat kerja bakti adalah:
 - Adanya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap daerah yang akan mereka bangun, karena telah lama mereka tinggal di wilayah itu dan juga karena merupakan hasil perencanaan mereka bersama dalam 'Jumpa Warga'.
 - Adanya waktu dan peralatan untuk bekerja bakti, karena pekerjaan mereka sehari-hari kebanyakan sebagai petani dan buruh tani.
2. Ketidaksetujuan warga RW I apabila pekerjaan pembangunan jalan diserahkan pihak lain (pemborong) yaitu sebanyak 35 responden atau sebesar 100%. Mereka lebih senang apabila pekerjaan tersebut mereka laksanakan sendiri meskipun dengan kerja bakti siang dan malam. Hal ini mereka laksanakan apabila material telah tersedia.



Sumber :Hasil Observasi, 2008

GAMBAR 4.2
PEMBANGUNAN JALAN DI RW I DENGAN KERJA BAKTI

Sebenarnya kegiatan kerja bakti secara rutin dilakukan satu minggu sekali pada hari Minggu untuk pekerjaan pemeliharaan jalan, saluran dan lain-lain. Namun apabila Dana Kontigensi tersebut telah turun, maka penduduk RW I segera melaksanakan kerja bakti siang dan malam agar material yang telah mereka siapkan tidak rusak. Kerja bakti tersebut dilakukan penduduk secara bergantian, yaitu apabila warga tersebut telah melaksanakan kerja bakti pada siang hari, maka pada malam harinya tidak terlalu diwajibkan untuk hadir.

Penduduk RW I pun tidak mempermasalahkan apabila pekerjaan jalan tersebut memakan waktu lama dan hasil pembangunannya pun tidak bisa rapi seperti apabila diserahkan kepada pemborong. Hal ini mengingat mereka bukan orang yang ahli dalam pekerjaan pembangunan jalan.



Sumber :Hasil Observasi, 2008

GAMBAR 4.3
KONDISI JALAN DI RW I YANG KURANG RAPI

Setelah bentuk peran serta berupa tenaga yang paling dominan, maka bentuk peran serta yang juga mendominasi pada kegiatan pembangunan jalan di RW I berikutnya adalah berupa pikiran yaitu sebesar 94,8%. Tingginya angka prosentase pada pikiran tersebut dapat dilihat dari:

1. Selalu dilibatkannya penduduk dalam setiap kegiatan pembangunan, yaitu sebanyak 30 responden menjawab selalu dilibatkan atau sebesar 97%.
2. Jumlah warga yang hadir dalam setiap pertemuan, yaitu sebanyak 27 responden menjawab selalu hadir dan 8 responden menjawab sering hadir atau sebesar 95%.

Hal-hal yang sangat mendukung tingginya nilai dalam bentuk peran serta pikiran ini adalah:

- Penduduk RW I berusaha meluangkan waktu untuk mengikuti ‘Jumpa Warga’ karena mereka merasa memiliki tanah dan sangat ingin dilibatkan dalam kegiatan pembangunan untuk melihat kemajuan apalagi di wilayah mereka, karena mereka merasakan manfaat yang besar dari adanya dana Kontigensi (harga tanah mereka menjadi mahal).
- Kebanyakan warga RW I pada siang hari bekerja di kebun atau sawah sebagai petani sehingga mereka memiliki waktu untuk hadir di ‘Jumpa Warga’ di malam hari dan pertemuan tersebut juga sebagai ajang silaturahmi karena mereka juga jarang bertemu sehari-harinya (jarak rumah saling berjauhan).
- Rata-rata warga RW I memiliki pendidikan tingkat menengah, sehingga mereka merasa sama pengetahuannya, maka dalam berdiskusi tidak ada rasa sungkan dan mereka tidak takut-takut untuk memberikan usulan.

Bentuk peran serta masyarakat di RW I yang menempati urutan ketiga yaitu berupa dana sebesar 80,2%. Tingginya prosentase pada bentuk peran serta dana ini bukan karena besarnya jumlah uang yang mereka sumbangkan, akan tetapi terletak pada jumlah warga yang menyumbang uang, yaitu sejumlah 32 responden menyatakan semua warga menyumbang dan hanya 3 responden yang menyatakan hampir semua warga menyumbang atau sebesar 98,3%. Besaran sumbangan uang di RW I baik itu untuk iuran pembangunan jalan maupun untuk iuran pemeliharaan jalan ditetapkan sebesar Rp.5.000,-.

Pengurus RT di lingkungan RW I tidak ingin memberatkan warganya dengan iuran uang yang besar, mengingat kondisi perekonomian penduduk RW I yang bermata pencaharian kebanyakan sebagai pedagang (menjual hasil kebun ke pasar-pasar atau pedagang dari luar Gedawang), buruh industri (buruh pabrik), buruh bangunan/kuli bangunan, petani sendiri, buruh tani, dan lain-lain (buruh rumah tangga). Hal itu juga dipengaruhi besarnya pendapatan penduduk RW I yang berpenghasilan Rp1 juta–Rp.1,5 juta (sejumlah 20 responden atau 57,2%), berpenghasilan Rp.500 ribu–Rp.1 juta (sejumlah 11 responden atau 31,4%) dan hanya 4 responden yang menyatakan berpenghasilan diatas Rp.1,5 juta atau 11,4%.

Hal-hal yang mempengaruhi bentuk peran serta berupa dana di RW I ini adalah:

- Tingginya kesadaran warga RW I untuk ber iuran, karena mereka merasakan manfaat dari pembangunan melalui dana Kontigensi dan mereka tidak perlu iuran lebih untuk mengangsur kepada Pemerintah Kota seperti bantuan dana yang lain.

- Adanya sesepuh (orang yang dianggap tua dan berpengaruh dan kebetulan juga sebagai kyai di lingkungan tersebut) yang memberikan motivasi kepada warga untuk menyumbangkan uang dalam hal kebajikan. Hal ini sering disampaikan dalam acara pengajian rutin setiap malam Jum'at yang bergilir di rumah-rumah warga dan 'Mujahadah' atau pengajian tiap malam Jum'at wage di musholla setempat.

Bentuk peran serta berupa barang/material di RW I ini hanya mencapai prosentase sejumlah 54,5%. Hal ini mengingat lagi akan kondisi perekonomian penduduk RW I seperti disebutkan diatas. Dari sejumlah sumbangan barang/material yang berupa bahan bangunan, snack/makanan kecil, makan siang dan minuman, pada saat dilaksanakan kerja bakti, maka kebanyakan warga hanya menyumbang salah satu yaitu sebanyak 21 responden atau 60%. Jadi apabila ada acara kerja bakti salah satu warga sudah menyumbang minuman, maka kebanyakan mereka tidak akan mengeluarkan sumbangan yang lain. Hanya 2 responden yang mengeluarkan sumbangan semuanya, karena memang 2 responden tersebut dipandang mampu dari sisi ekonomi di lingkungan RW I tersebut dan responden tersebut antusias terhadap kegiatan yang dilaksanakan warga RW I.

4.1.2 Bentuk Peran Serta Masyarakat RW IV

Pemukiman RW IV didominasi oleh perumahan-perumahan formal dan merupakan pemukiman penduduk pendatang. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, maka penduduk R IV ini juga menunjukkan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan namun tidak setinggi penduduk RW I. Untuk lebih

jelasan tentang bentuk peran serta masyarakat RW IV (pemukiman penduduk pendatang) ini dapat dilihat pada tabel IV.2.

TABEL IV.2
PENILAIAN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT
PADA PEMUKIMAN PENDUDUK PENDATANG (RW IV)

NO.	BENTUK PERAN SERTA	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
I.	PIKIRAN			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam pertemuan		45	130
	a. Tidak ada warga yang hadir	1	0	0
	b. Sedikit warga yang hadir	2	12	24
	c. Separuh warga hadir	3	26	78
	d. Sebagian besar warga hadir	4	7	28
	e. Semua warga hadir	5	0	0
	2. Frekwensi usulan warga dalam rapat		45	135
	a. Tidak pernah ada yang usul	1	4	4
	b. Jarang sekali ada yang usul	2	6	12
	c. Kadang-kadang	3	25	75
	d. Sering	4	6	24
	e. Selalu	5	4	20
	3. Pelibatan warga dalam perencanaan jalan		45	143
	a. Tidak pernah	1	2	2
	b. Jarang sekali	2	3	6
	c. Kadang-kadang	3	31	93
	d. Sering	4	3	12
	e. Selalu	5	6	30
	Jumlah Nilai Pikiran			408
	Prosentase			60,4%
II.	TENAGA			
	1. Kerelaan warga dalam kerja bakti		45	122
	a. Tidak suka sama sekali	1	8	8
	b. Terpaksa	2	12	24
	c. Biasa saja	3	15	45
	d. Agak suka kerja bakti	4	5	20
	e. Selalu berangkat dengan sukarela	5	5	25
	2. Kehadiran warga dalam kerja bakti		45	135
	a. Tidak pernah	1	6	6
	b. Jarang sekali	2	8	16
	c. Kadang-kadang	3	17	51
	d. Sering hadir	4	8	32
	e. Selalu hadir	5	6	30

Lanjutan

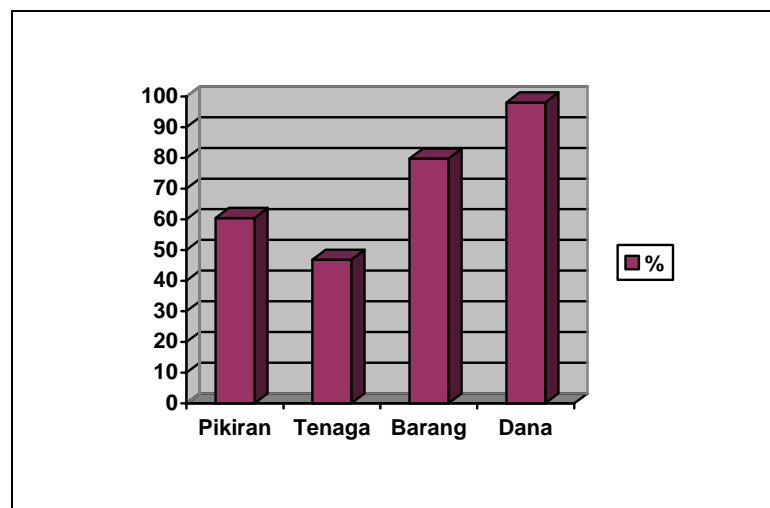
NO.	BENTUK PERAN SERTA	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
	3. Pembangunan dilaksanakan orang lain	1	45	45
	a. Sangat setuju	2	45	45
	b. Setuju	3	0	0
	c. Sedikit setuju	4	0	0
	d. Kurang setuju	5	0	0
	e. Tidak setuju sama sekali		0	0
	Jumlah Nilai Tenaga Prosentase			302 46,8%
III.	BARANG/MATERIAL			
	1. Jenis sumbangan barang (bahan bangunan, snack, makan, minum)		45	178
	a. Tidak menyumbang sama sekali	1	0	0
	b. Menyumbang salah satu	2	8	16
	c. Menyumbang 2 diantaranya	3	7	21
	d. Menyumbang 3 diantaranya	4	9	36
	e. Menyumbang semuanya.	5	21	105
	2. Jumlah warga yang menyumbang barang		45	185
	a. Tidak ada	1	0	0
	b. Sedikit	2	5	10
	c. Separuh warga	3	8	24
	d. Hampir semua menyumbang	4	9	36
	e. Semua menyumbang	5	23	115
	3. Kerelaan warga untuk menyumbang barang:		45	176
	a. Tidak suka menyumbang	1	0	0
	b. Menyumbang tapi terpaksa	2	0	0
	c. Kadang-kadang menyumbang	3	10	30
	d. Sering menyumbang	4	29	116
	e. Selalu menyumbang	5	6	30
	Jumlah Nilai Barang/Material Prosentase			539 79,8%
IV.	DANA			
	1. Besaran sumbangan		45	225
	a. Tidak menyumbang	1	0	0
	b. s/d Rp.5.000,-	2	0	0
	c. Rp.5.000,- - Rp.10.000,-	3	0	0
	d. Rp.10.000,- - Rp.20.000,-	4	0	0
	e. Rp.20.000 keatas	5	45	225
	2. Jumlah warga yang menyumbang uang		45	225
	a. Tidak ada	1	0	0
	b. Sedikit	2	0	0
	c. Separuh warga	3	0	0
	d. Hampir semua menyumbang	4	0	0
	e. Semua menyumbang	5	45	225

Lanjutan

NO.	BENTUK PERAN SERTA	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
	3.Keaktifan membayar iuran		45	212
	a.Sangat rendah	1	0	0
	b.Rendah	2	0	0
	c.Sedang	3	4	12
	d.Tinggi	4	5	20
	e.Sangat tinggi	5	36	180
	Jumlah Nilai Dana Prosentase			662 98,1%

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Untuk memperjelas tabel penilaian bentuk peran serta masyarakat pada penduduk RW IV ini maka dapat dilihat pada Gambar 4.4 tentang prosentase masing-masing bentuk peran serta masyarakatnya. Prosentase tersebut merupakan jumlah nilai pada masing-masing bentuk peran serta terhadap jumlah maksimalnya yaitu dengan nilai 675 yang diperoleh dari jumlah pertanyaan (3) dikalikan skala nilai tertinggi (5) dan dikalikan jumlah responden (45).



Sumber : Hasil Analisa, 2008

GAMBAR 4.4
PROSENTASE BENTUK PERAN SERTA RW IV

Dengan memperhatikan hasil kuesioner yang telah melalui proses analisa diatas maka bentuk peran serta yang paling dominan pada RW IV ini berupa dana yaitu sebesar 98,1%. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Besaran sumbangan yang diberikan warga yaitu sebesar Rp.20.000,- keatas sebanyak 45 responden atau sebesar 100%.
2. Jumlah warga yang memberikan sumbangan uang yaitu dari 45 responden semuanya menjawab menyumbang atau sebesar 100%

Tingginya bentuk peran serta berupa dana di RW IV ini didukung oleh:

- Kesadaran warga RW IV bahwa dengan membayar iuran, mereka tetap mempunyai rasa ‘memiliki’ terhadap wilayah mereka, sehingga pada saat ada jalan yang rusak maka mereka segera berswadana untuk mendampingi dana Kontigensi yang tidak cukup untuk membangun jalan.
- Tingkat pendidikan (kebanyakan sarjana) dan tingkat pendapatan yang rata-rata menengah keatas, membuat warga merasa ‘sama’. Hal inilah yang membuat warga ‘guyub’ dan ada rasa kebersamaan.
- Besarnya jumlah sumbangan dan semua warga dapat memberikan sumbangan tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor perekonomian penduduk RW IV. Seperti telah diuraikan pada bagian data Bab III, kebanyakan penduduk RW IV bekerja di bidang lain-lain, pegawai negeri sipil/ABRI/dosen, buruh industri/pegawai pabrik, pengusaha dan pedagang. Hal ini didukung pula dengan tingkat pendapatan penduduk RW IV yang sebagian besar berpenghasilan Rp1 juta–Rp.1,5 juta yaitu sejumlah 5 responden (11,1%) dan berpenghasilan diatas Rp1,5 juta sejumlah 40 responden (88,9%).

Bentuk peran serta yang menempati urutan kedua setelah bentuk dana adalah bentuk sumbangan barang/material yaitu sebesar 79,8%. Hal ini juga masih terkait dengan faktor perekonomian penduduk RW IV, seperti jumlah warga yang menyumbang material sejumlah 23 responden atau 51,1% menyatakan semua warga bersedia menyumbang barang. Hanya 5 responden atau 11,1% yang karena ketidaktahuannya (karena jarang bermasyarakat) yang menyatakan bahwa warga yang menyumbang barang sedikit. Responden yang lain yaitu sejumlah 8 responden menyatakan separuh warga dan 9 responden menyatakan hampir semuanya menyumbang barang. Namun untuk jenis sumbangan barang apabila diadakan kerja bakti yang berupa bahan bangunan, snack/makanan kecil, makan siang dan minuman sejumlah 21 responden atau 46,7% menyatakan menyumbang keempat materi tersebut. Ternyata kondisi bentuk peran serta yang berupa barang/material di RW IV sangat variatif. Hal ini tentunya berkaitan dengan latar belakang budaya masing-masing penduduk yang akhirnya berpengaruh dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Bentuk peran serta masyarakat yang menempati urutan ketiga di RW IV ini adalah bentuk pikiran yaitu sebesar 60,4%. Bentuk peran serta pikiran ini hanya memperoleh nilai sebesar 60,4% karena seperti telah diuraikan diatas, yaitu adanya latar belakang budaya, latar belakang individu masing-masing penduduk yang sedikit banyak berpengaruh dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dari 45 responden kebanyakan menyatakan sikap netral dalam mengisi kuesioner untuk bentuk peran serta pikiran ini, seperti:

1. Tanggapan responden terhadap jumlah warga yang hadir tiap kali diadakan

pertemuan warga, yaitu sejumlah 26 responden atau sebanyak 57,8% menyatakan separuh warga hadir.

2. Tanggapan responden terhadap frekuensi usulan dari warga dalam pertemuan, yaitu sejumlah 25 responden atau sebanyak 55,5% menyatakan kadang memberikan usulan.
3. Tanggapan responden tentang pelibatan warga dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, yaitu sejumlah 31 responden atau sebanyak 68,9% menyatakan kadang-kadang dilibatkan.

Hal-hal yang mempengaruhi warga RW IV dalam memberikan bentuk peran serta berupa pikiran ini adalah:

- Tidak adanya waktu untuk menghadiri pertemuan, karena rata-rata mereka pulang bekerja sudah magrib dan merasa capek. Apabila pertemuan dilaksanakan Minggu malam, mereka juga berdalih besok sudah bekerja lagi sehingga mereka tidak dapat hadir.
- Pengurus RT dan RW mempunyai perasaan, karena warga RW IV ini merupakan orang-orang pintar (sarjana) jadi mereka kadang tidak mau hadir pada acara pertemuan karena mereka merasa pintar sehingga tidak mau diatur atau dipintari oleh pengurus yang sama-sama sarjana.
- Warga banyak yang tidak mau dilibatkan dalam perencanaan, karena kalau sudah terjun atau ikut 'cawe-cawe' dalam perencanaan, nantinya takut dijadikan sebagai pengurus pembangunan jalan, sehingga akan menyita waktu.

Untuk bentuk peran serta berupa tenaga hanya mendapat nilai 46,8% dari responden di RW IV. Hal yang sangat menonjol pada bentuk tenaga di RW IV

ini adalah banyaknya responden yang menyatakan sangat setuju apabila pekerjaan pembangunan jalan dilaksanakan oleh pihak lain atau pemborong, yaitu 35 responden atau sebesar 77,8%. Sedangkan tanggapan untuk pertanyaan lain oleh responden kebanyakan bersikap netral, seperti: kerelaan warga apabila diadakan kerja bakti baik itu dalam pembangunan jalan maupun pemeliharaan jalan, yaitu sejumlah 15 responden atau sebanyak 33,3% menyatakan biasa saja. Demikian juga untuk tanggapan kehadiran responden apabila diadakan kerja bakti yaitu sejumlah 17 responden atau sebanyak 37,8% menyatakan kadang berangkat, kadang tidak berangkat.

Penduduk warga RW IV ini menyatakan memang karena kesibukannya yang tiap hari sudah bekerja dari pagi sampai sore dan untuk hari Minggu mereka khususkan untuk acara keluarga, maka kebanyakan mereka memilih apabila ada pembangunan jalan lebih baik diserahkan kepada pihak lain atau pemborong, meskipun mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut dipikul bersama dengan cara iuran sebesar Rp.100.000,- apabila ada pembangunan, bahkan ada beberapa warga yang rela membayar lebih karena mereka mempunyai rasa 'memiliki'. Dipilih pemborong untuk melaksanakan pembangunan dengan pertimbangan, hasil pekerjaan jalan akan lebih baik dan rapi karena dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Selain itu apabila dikerjakan oleh pemborong waktu yang dibutuhkan lebih singkat, karena pemborong terkait dengan biaya yang akan mereka keluarkan untuk membayar tenaga, sehingga lingkungan mereka bisa cepat kembali rapi.

Untuk lebih jelas kondisi jalan di RW IV dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Sumber :Hasil Observasi, 2008

GAMBAR 4.5
KONDISI JALAN DI RW IV YANG RAPI

4.1.3 Kesimpulan Bentuk Peran Serta Masyarakat

A. Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW I

RW I yang merupakan pemukiman penduduk asli dengan karakteristik masyarakat yang masih sederhana, maka bentuk peran serta yang dapat diberikan berupa tenaga dan pikiran, namun demikian mereka juga rela dan aktif untuk membayar iuran sebesar Rp.5.000,- tiap bulan. Dengan beberapa keterbatasan seperti: tingkat pendidikan yang rendah, mata pencaharian sebagai petani, pedagang dari hasil kebun dan buruh, namun mereka memiliki semangat untuk memajukan wilayahnya. Hal-hal yang mendorong semangat berpartisipasi itu adalah:

- Kerelaan dalam melakukan kerja bakti karena adanya rasa *rumangsa melu handarbeni* atau merasa ikut terlibat dalam mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan dan mempunyai rasa memiliki dengan memberikan sumbangan tenaga dalam kerja bakti.

- Penduduk RW I berusaha meluangkan waktu untuk mengikuti ‘Jumpa Warga’ karena mereka merasa memiliki tanah dan sangat ingin dilibatkan dalam kegiatan pembangunan untuk melihat kemajuan apalagi di wilayah mereka, karena mereka merasakan manfaat yang besar dari adanya Dana Kontigensi (dengan adanya jalan, maka harga tanah mereka menjadi mahal).
- Adanya sesepuh (orang yang dianggap tua dan berpengaruh dan kebetulan juga sebagai kyai di lingkungan tersebut) yang memberikan motivasi kepada warga untuk menyumbangkan uang dalam hal kebajikan. Hal ini sering disampaikan dalam acara pengajian rutin setiap malam Jum’at yang bergilir di rumah-rumah warga dan ‘Mujahadah’ atau pengajian tiap malam Jum’at wage di musholla setempat.

B. Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW IV

RW IV yang merupakan pemukiman perumahan formal dengan karakteristik masyarakat pendatang, bentuk peran serta yang dapat diberikan adalah dana. Hal ini didukung dengan tingkat perekonomian/penghasilan warga yang sudah tinggi yaitu 88,9% warga berpenghasilan diatas Rp.1,5 juta dan semua warga dengan kerelaan dan kesadaran yang tinggi untuk membayar iuran tiap bulan. Hal ini menunjukkan wujud kegotong-royongan warga bukan dalam bentuk fisik namun secara non fisik (iuran dana).

4.2 Analisis Pengelolaan Dana Kontigensi

Warga atau masyarakat akan semakin terlibat atau berperan serta dalam kegiatan pembangunan apabila ada faktor yang mendukung. Dukungan yang diharapkan oleh masyarakat adalah perhatian dari Pemerintah berupa bantuan baik itu

bantuan material maupun dana.

Dana Kontigensi adalah merupakan bentuk bantuan dana maupun material dari Pemerintah Kota Semarang yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini tingkat RT, RW dan Kelurahan yang membutuhkan. Bantuan tersebut diberikan karena skala prioritas tingkat Kelurahan sangat diperlukan oleh masyarakat namun tidak masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) pembangunan Kota.

Analisis pengelolaan Dana Kontigensi Kelurahan Gedawang adalah merupakan tindak lanjut dan berkaitan erat dengan analisis bentuk peran serta masyarakat yang telah diuraikan diatas. Dikatakan berkaitan erat dengan analisis bentuk peran serta masyarakat, karena didalam tiap tahapan tersebut berisi tanggapan responden yang mengandung unsur peran serta, seperti: pikiran (dalam tahap perencanaan), tenaga (dalam tahap pembangunan dan pemeliharaan), barang/material (dalam tahap pembangunan dan pemeliharaan) serta dana (dalam tahap pembangunan dan pemeliharaan). Selain itu analisis pengelolaan Dana Kontigensi dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat pada tiap tahapan pembangunan sesuai bentuk peran serta pada masyarakat tersebut.

4.2.1 Pengelolaan Dana Kontigensi di RW I

Di wilayah Kelurahan Gedawang, RW I adalah RW yang paling aktif dalam mengajukan dana bantuan kepada pemerintah. Hal ini tidak hanya didukung oleh aparat di tingkat RT, RW maupun Kelurahan saja namun juga sangat didukung oleh seluruh warga RW I. Penduduk RW I ini menyadari kondisi fisik wilayah mereka yang relatif susah serta kondisi perekonomian mereka yang tergolong masih rendah, sehingga mereka bergotong-royong dan sepaham dalam upaya me-

majukan daerahnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengelolaan Dana Kontigensi di RW I dapat dilihat pada tabel IV.3.

TABEL IV.3
PENILAIAN PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI
PADA PEMUKIMAN PENDUDUK ASLI (RW I)

NO.	PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
I.	TAHAP PERENCANAAN			
	1. Manfaat dana Kontigensi		35	175
	a. Tidak ada	1	0	0
	b. Kurang bermanfaat	2	0	0
	c. Cukup bermanfaat	3	0	0
	d. Bermanfaat	4	0	0
	e. Sangat bermanfaat	5	35	175
	2. Jumlah usulan warga dalam pertemuan		35	161
	a. Tidak ada usulan	1	0	0
	b. Jarang sekali ada usulan	2	0	0
	c. Kadang-kadang	3	4	12
	d. Sering	4	6	24
	e. Selalu	5	25	125
	3. Kesesuaian lokasi pembangunan dengan aspirasi warga:		35	169
	a. Tidak tepat sama sekali	1	0	0
	b. Kurang tepat	2	0	0
	c. Sedikit tepat	3	0	0
	d. Tepat	4	6	24
	e. Sangat tepat	5	29	145
	4. Frekwensi kehadiran warga tiap pertemuan		35	166
	a. Tidak pernah hadir	1	0	0
	b. Jarang sekali hadir	2	0	0
	c. Kadang-kadang	3	1	3
	d. Sering hadir	4	7	28
	e. Selalu hadir	5	27	135
	5. Kerelaan kehadiran warga pada pertemuan		35	167
	a. Tidak suka/tidak pernah berangkat	1	0	0
	b. Berangkat dengan terpaksa	2	0	0
	c. Kadang hadir, kadang tidak	3	0	0
	d. Berangkat bila tidak ada acara lain	4	8	32
	e. Selalu berangkat dengan suka rela	5	27	135
	Jumlah Nilai Tahap Perencanaan			838
	Prosentase dari Nilai Keseluruhan			38,9%

Lanjutan

NO.	PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
II.	TAHAP PEMBANGUNAN			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam kerja bakti pembangunan jalan		35	170
	a. Tidak ada warga yang hadir	1	0	0
	b. Sedikit warga yang hadir	2	0	0
	c. Separuh warga hadir	3	0	0
	d. Sebagian besar warga hadir	4	5	20
	e. Semua warga hadir	5	30	150
	2. Kerelaan warga untuk hadir		35	175
	a. Tidak suka kerja bakti pembangunan jalan	1	0	0
	b. Terpaksa	2	0	0
	c. Kadang hadir, kadang tidak	3	0	0
	d. Berangkat bila tidak ada acara lain	4	0	0
	e. Selalu berangkat dengan suka rela	5	35	175
	3. Sumbangan dalam pembangunan jalan (minuman, snack, makan siang, material)		35	82
	a. Tidak menyumbang sama sekali	1	2	2
	b. Menyumbang salah satu	2	25	50
	c. Menyumbang 2 diantaranya	3	4	12
	d. Menyumbang 3 diantaranya	4	2	8
	e. Menyumbang semuanya	5	2	10
	4. Besaran iuran pembangunan jalan		35	87
	a. Tidak iuran	1	2	2
	b. s/d Rp.5.000,-	2	25	50
	c. Rp.5.000,- - Rp.10.000,-	3	0	0
	d. Rp.10.000,- - Rp.20.000,-	4	5	20
	e. Rp.20.000 keatas	5	3	15
	5. Ketepatan warga dalam iuran pembangunan		35	166
	a. Sangat rendah	1	0	0
	b. Rendah	2	0	0
	c. Sedang	3	2	6
	d. Tinggi	4	5	20
	e. Sangat tinggi	5	28	140
	Jumlah Nilai Tahap Pembangunan			680
	Prosentase dari Nilai Keseluruhan			31,8%
III.	TAHAP PEMELIHARAAN/PERBAIKAN			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam kerja bakti pemeliharaan jalan		35	139
	a. Tidak ada warga yang hadir	1	0	0
	b. Sedikit warga yang hadir	2	0	0
	c. Separuh warga hadir	3	4	12
	d. Sebagian besar warga hadir	4	28	112
	e. Semua warga hadir	5	3	15

Lanjutan

NO.	PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
	2. Kerelaan warga untuk hadir		35	169
	a. Tidak suka kerja bakti	1	0	0
	b. Terpaksa	2	0	0
	c. Kadang hadir, kadang tidak	3	0	0
	d. Berangkat bila tidak ada acara lain	4	6	24
	e. Selalu berangkat dengan suka rela	5	29	145
	3. Sumbangan dalam pemeliharaan jalan (minuman, snack, makan siang, material)		35	86
	a. Tidak menyumbang sama sekali	1	0	0
	b. Menyumbang salah satu	2	27	54
	c. Menyumbang 2 diantaranya	3	3	9
	d. Menyumbang 3 diantaranya	4	3	8
	e. Menyumbang semuanya	5	2	15
	4. Besaran iuran pemeliharaan jalan		35	87
	a. Tidak iuran	1	2	2
	b. s/d Rp.5.000,-	2	25	50
	c. Rp.5.000,- - Rp.10.000,-	3	0	0
	d. Rp.10.000,- - Rp.20.000,-	4	5	20
	e. Rp.20.000 keatas	5	3	15
	5. Ketepatan warga dalam iuran pemeliharaan		35	145
	a. Sangat rendah	1	2	2
	b. Rendah	2	3	6
	c. Sedang	3	4	12
	d. Tinggi	4	5	20
	e. Sangat tinggi	5	21	105
	Jumlah Nilai Tahap Pemeliharaan/Perbaikan Prosentase dari Nilai Keseluruhan			626 29,3%
	JUMLAH KESELURUHAN			2.139

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Analisis pengelolaan Dana Kontigensi di RW I dilakukan pada kegiatan pembangunan jalan di RT 04, karena pada tahun 2008 ini yang mendapat bantuan Dana Kontigensi untuk pembangunan jalan berlokasi di RT 04 dengan panjang jalan 100 meter dan lebar 2 meter. Jumlah dana dari Pemerintah Kota Semarang adalah sebesar Rp.4.500.000,- dari pengajuan semula Rp.10.000.000,-. Sedangkan swadaya dari masyarakat sebesar Rp.1.500.000,-. Bantuan swadaya tersebut tidak berujud semuanya uang. Hal ini dengan pengertian bahwa semua bentuk sumbangan dari warga baik itu berupa material bahan bangunan, tenaga uang dinilai

dalam bentuk uang atau di-rupiahkan senilai Rp.1.500.000,-.

Dengan melihat tabel penilaian pengelolaan Dana Kontigensi di RW I diatas, maka yang mencapai nilai paling tinggi adalah pada tahap perencanaan yang merupakan wujud eksplorasi dari bentuk peran serta berupa 'pikiran'. Tahap perencanaan di RW I mencapai nilai sejumlah 838 atau sebesar 38,9% dari perolehan nilai keseluruhan. Hal ini merupakan wujud dari selalu diadakannya pertemuan warga yang disebut 'Jumpa Warga' pada tiap Sabtu malam minggu pertama setiap bulannya, mereka lakukan untuk membahas kegiatan pembangunan dan sosial di tingkat RT yang ditindaklanjuti pada malam Minggu berikutnya untuk tingkat RW. Mereka sangat antusias dengan adanya Dana Kontigensi yang mereka rencanakan bersama mulai dari penyusunan Proposal sampai perencanaan fisiknya, sehingga 100% responden menyatakan bahwa Dana Kontigensi sangat bermanfaat dalam memajukan wilayah mereka, juga kesesuaian lokasi pembangunan dengan aspirasi warga, sejumlah 29 responden atau sebesar 82,8% menyatakan sangat tepat.

Dalam proses perencanaan tersebut yang dilakukan pada 'Jumpa Warga' kehadiran penduduk di tiap kali diadakan pertemuan sangat antusias yaitu 27 responden atau sebesar 77% warga selalu hadir dan menyatakan selalu berangkat tanpa adanya rasa keterpaksaan. Demikian juga dengan jumlah usulan, 25 responden atau sebesar 71,4% menjawab selalu memberikan usulan.

Tahap pembangunan Dalam pengelolaan dana Kontigensi di RW I memiliki total nilai 680 atau sebesar 31,8% hanya dapat menempati urutan kedua

setelah perencanaan. Padahal dengan melihat tabel diatas, dari sisi bentuk peran serta berupa 'tenaga', di RW I ini memiliki nilai yang tinggi, seperti:

- Jumlah warga yang hadir tiap kali diadakan kerja bakti pembangunan jalan, yaitu sejumlah 30 responden atau sebesar 85,7% menyatakan bahwa semua hadir, meski itu dengan bergiliran waktunya, yaitu ada yang kerja bakti pada pagi-siang hari dan ada yang kerja bakti pada malam harinya.
- Kerelaan warga untuk hadir pada acara kerja bakti pembangunan jalanpun disampaikan 35 responden atau 100% menjawab selalu berangkat kerja bakti dengan suka rela tanpa ada paksaan.
- Ketepatan warga dalam membayar iuran disampaikan oleh 28 responden atau sebesar 80%, warga sangat tepat dalam membayar iuran pembangunan.

Namun dalam tahap pembangunan, selain bentuk peran serta 'tenaga' juga berperan serta bentuk 'material' dan 'uang'. Bentuk peran serta berupa sumbangan dalam kerja bakti pembangunan jalan oleh 27 responden dijawab kebanyakan warga hanya menyumbang salah satu barang, seperti apabila warga sudah menyumbang minuman maka warga yang lain akan menyumbang makanan kecil atau makan siang atau material bangunan. Demikian juga dalam bentuk 'dana' sejumlah 25 responden menjawab Rp.5.000,-.

Untuk tahap pemeliharaan/perbaikan jalan dalam pengelolaan Dana Kontigensi di RW I ini memiliki nilai yang rendah yaitu hanya 626 atau 29,3%. Dalam tahap pemeliharaan ini bentuk peran serta masyarakat yang ada sama dengan pada tahap pembangunan jalan, yaitu tenaga, material/barang dan dana. Rendahnya nilai pada tahap pemeliharaan ini karena warga tidak seantusias waktu

pembangunan jalan. Pemeliharaan jalan dilakukan warga RW I pada hari Minggu setelah malamnya dilakukan 'Jumpa Warga'. Pemeliharaan tersebut dilakukan antara lain pada jalan atau paving yang sudah mulai rusak/pecah sehingga perlu perbaikan, memperbaiki kunci paving yang juga mulai hancur, membersihkan paving dari rumput atau lumut supaya tidak licin, dan lain sebagainya.

Dalam pemeliharaan jalan ini sejumlah 28 responden atau sebesar 80% menyatakan apabila ada kerja bakti pemeliharaan/perbaikan jalan yang hadir hanya sebagian besar warga, namun responden tersebut juga menyatakan bahwa mereka yang hadir datang dengan suka rela tanpa keterpaksaan. Demikian pula dalam membayar iuran pemeliharaan jalan yang dipungut pada saat pertemuan 'Jumpa Warga', sejumlah 21 responden menyatakan warga tetap tepat waktu dalam membayar iuran. Hanya 2 responden yang menyatakan mereka dibebaskan dari iuran pemeliharaan jalan karena sudah tua dan pendapatannya sangat rendah. Untuk bentuk peran serta berupa 'material/barang' dan 'dana' pada tahap pemeliharaan ini hampir sama dengan tahap pembangunan jalan.

4.2.2 Pengelolaan Dana Kontigensi di RW IV

RW IV yang terdiri dari perumahan-perumahan formal, pengajuan Dana Kontigensi mereka peruntukkan pada perumahan yang sudah tidak lagi menjadi tanggungan pengembang, seperti perumahan Gedawang Pesona Asri, Gedawang Permai I dan Gedawang Permai II. Berdasarkan data Dana Kontigensi Kelurahan Gedawang tahun 2001-2008, maka alokasi Dana Kontigensi di RW IV ini kebanyakan untuk sarana dan prasarana yang melayani skala tingkat Kelurahan, seperti pembangunan jalan utama RW IV dengan konstruksi aspal hotmix untuk menghu-

bungkan wilayah Gedawang dengan kelurahan Padangsari, kelurahan Banyumanik dan jalan raya Semarang-Solo, pembangunan Masjid dan TPQ As-Salam dan peningkatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) ABA. Sehingga dapat dikatakan kebanyakan Dana Kontigensi di RW IV tersebut merupakan *top down* dari pihak Kelurahan, karena memang untuk memajukan wilayah dan kualitas penduduk Kelurahan Gedawang. Untuk lebih jelas tentang penilaian pengelolaan Dana Kontigensi di RW IV ini dapat dilihat pada tabel IV.4.

TABEL IV.4
PENILAIAN PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI
PADA PEMUKIMAN PENDUDUK PENDATANG (RW IV)

NO.	PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
I.	TAHAP PERENCANAAN			
	1. Manfaat dana Kontigensi		45	187
	a. Tidak ada	1	0	0
	b. Kurang bermanfaat	2	0	0
	c. Cukup bermanfaat	3	13	39
	d. Bermanfaat	4	12	48
	e. Sangat bermanfaat	5	20	100
	2. Jumlah usulan warga dalam pertemuan		45	134
	a. Tidak ada usulan	1	0	0
	b. Jarang sekali ada usulan	2	15	30
	c. Kadang-kadang	3	20	60
	d. Sering	4	6	24
	e. Selalu	5	4	20
	3. Kesesuaian lokasi pembangunan dengan aspirasi warga:		45	191
	a. Tidak tepat sama sekali	1	0	0
	b. Kurang tepat	2	0	0
	c. Sedikit tepat	3	0	0
	d. Tepat	4	34	136
	e. Sangat tepat	5	11	55

Lanjutan

NO.	PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
	4. Frekwensi kehadiran warga tiap pertemuan		45	128
	a. Tidak pernah hadir	1	2	2
	b. Jarang sekali hadir	2	12	24
	c. Kadang-kadang	3	22	66
	d. Sering hadir	4	9	36
	e. Selalu hadir	5	0	0
	5. Kerelaan kehadiran warga pada pertemuan		45	136
	a. Tidak suka/tidak pernah berangkat	1	2	2
	b. Berangkat dengan terpaksa	2	6	12
	c. Kadang hadir, kadang tidak	3	15	30
	d. Berangkat bila tidak ada acara lain	4	18	72
	e. Selalu berangkat dengan suka rela	5	4	20
	Jumlah Nilai Tahap Perencanaan			776
	Prosentase dari Nilai Keseluruhan			31%
II.	TAHAP PEMBANGUNAN			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam kerja bakti pembangunan jalan		45	157
	a. Tidak ada warga yang hadir	1	0	0
	b. Sedikit warga yang hadir	2	0	0
	c. Separuh warga hadir	3	29	87
	d. Sebagian besar warga hadir	4	10	40
	e. Semua warga hadir	5	6	30
	2. Kerelaan warga untuk hadir		45	138
	a. Tidak suka kerja bakti pembangunan jalan	1	6	6
	b. Terpaksa	2	7	14
	c. Kadang hadir. Kadang tidak	3	16	48
	d. Berangkat bila tidak ada acara lain	4	10	40
	e. Selalu berangkat dengan suka rela	5	6	30
	3. Sumbangan dalam pembangunan jalan (minuman, snack, makan siang, material)		45	149
	a. Tidak menyumbang sama sekali	1	0	0
	b. Menyumbang salah satu	2	6	12
	c. Menyumbang 2 diantaranya	3	19	57
	d. Menyumbang 3 diantaranya	4	20	80
	e. Menyumbang semuanya	5	0	0
	4. Besaran iuran pembangunan jalan		45	225
	a. Tidak iuran	1	0	0
	b. s/d Rp.5.000,-	2	0	0
	c. Rp.5.000,- - Rp.10.000,-	3	0	0
	d. Rp.10.000,- - Rp.20.000,-	4	0	0
	e. Rp.20.000 keatas	5	45	225

Lanjutan

NO.	PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI	SKALA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI
	5. Ketepatan warga dalam iuran pembangunan	1	45	211
	a. Sangat rendah	2	0	0
	b. Rendah	3	0	0
	c. Sedang	4	4	12
	d. Tinggi	5	6	24
	e. Sangat tinggi		35	175
	Jumlah Nilai Tahap Pembangunan			880
	Prosentase dari Nilai Keseluruhan			35,1%
III.	TAHAP PEMELIHARAAN/PERBAIKAN			
	1. Jumlah warga yang hadir dalam kerja bakti pemeliharaan jalan		45	144
	a. Tidak ada warga yang hadir	1	0	0
	b. Sedikit warga yang hadir	2	6	12
	c. Separuh warga hadir	3	24	72
	d. Sebagian besar warga hadir	4	15	60
	e. Semua warga hadir	5	0	0
	2. Kerelaan warga untuk hadir		45	126
	a. Tidak suka kerja bakti	1	10	10
	b. Terpaksa	2	7	14
	c. Kadang hadir, kadang tidak	3	15	45
	d. Berangkat bila tidak ada acara lain	4	8	32
	e. Selalu berangkat dengan suka rela	5	5	25
	3. Sumbangan dalam pemeliharaan jalan (minuman, snack, makan siang, material)		45	143
	a. Tidak menyumbang sama sekali	1	0	0
	b. Menyumbang salah satu	2	17	34
	c. Menyumbang 2 diantaranya	3	11	33
	d. Menyumbang 3 diantaranya	4	9	36
	e. Menyumbang semuanya	5	8	40
	4. Besaran iuran pemeliharaan jalan		45	225
	a. Tidak iuran	1	0	0
	b. s/d Rp.5.000,-	2	0	0
	c. Rp.5.000,- - Rp.10.000,-	3	0	0
	d. Rp.10.000,- - Rp.20.000,-	4	0	0
	e. Rp.20.000 keatas	5	45	225
	5. Ketepatan warga dalam iuran pemeliharaan		45	211
	a. Sangat rendah	1	0	0
	b. Rendah	2	0	0
	c. Sedang	3	4	12
	d. Tinggi	4	6	24
	e. Sangat tinggi	5	35	175
	Jumlah Nilai Tahap Pemeliharaan/ Perbaikan			849
	Prosentase dari Nilai Keseluruhan			33,9%
	JUMLAH KESELURUHAN			2.505

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Analisis pengelolaan Dana Kontigensi di RW IV dilakukan pada kegiatan pembangunan jalan di RT 03, karena pada tahun 2008 ini yang mendapat bantuan Dana Kontigensi untuk pembangunan jalan berlokasi di RT 03. Kalau untuk tahun 2008 ini merupakan aspirasi dari warga RW IV karena jalan utama masuk lingkungan perumahan mereka sudah rusak. Panjang jalan yang akan di paving yaitu 80 meter dengan lebar 3 meter.

Jumlah dana dari Pemerintah Kota Semarang yang turun adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dari pengajuan semula Rp.10.000.000,-. Sedangkan swadaya dari masyarakat sebesar Rp.5.000.000,-. Bantuan swadaya tersebut berwujud iuran (uang) dari warga yang kemudian dalam pembangunannya seluruh dana tersebut diserahkan kepada pemborong.

Dengan melihat tabel penilaian pengelolaan Dana Kontigensi di RW IV diatas, maka yang mencapai nilai paling tinggi adalah pada tahap pembangunan. Tahap pembangunan adalah merupakan wujud eksplorasi dari bentuk peran serta berupa 'tenaga', 'barang/material' dan 'dana'. Tahap pembangunan di RW IV ini mencapai nilai sejumlah 880 atau sebesar 35,1% dari perolehan nilai keseluruhan. Hal ini dikarenakan tingginya nilai iuran pembangunan jalan yaitu 45 responden atau sebesar 100% menjawab Rp.20.000,- keatas dan keaktifan warga dalam membayar iuran pembangunan yaitu sejumlah 35 responden atau sebesar 77,8% menjawab selalu membayar tepat waktu. Iuran pembangunan di lingkungan RW IV memang ditetapkan minimum sebesar Rp.25.000,- namun karena kondisi perekonomian penduduk RW IV sudah tinggi, maka apabila ada pembangunan jalan kebanyakan memberikan sumbangan uang yang lebih yaitu Rp.100.000,- keatas.

Hal ini mereka pertimbangkan demi kenyamanan, kualitas lingkungan menjadi lebih baik dibandingkan jalan yang berlubang-lubang dan iuran pembangunan jalan bukan iuran rutin tetapi hanya insidental apabila ada pembangunan jalan saja, sehingga mereka rela untuk membayar lebih. Dengan beriuran pula, mereka merasa mempunyai rasa ‘memiliki’ terhadap jalan tersebut, meskipun yang mengerjakan pemborong.

Jumlah warga yang hadir pada kerja bakti pembangunan jalan dijawab 29 responden atau sebesar 64,4% hanya datang separuh, demikian juga dengan kerelaan warga apabila diharapkan hadir pada kerja bakti pembangunan jalan tersebut di RW IV ini sangat variatif, mulai dari tidak suka sama sekali kerja bakti, ada yang terpaksa, ada yang kadang-kadang berangkat, ada yang menjawab sering berangkat bahkan ada yang menjawab selalu berangkat. Kondisi ini memang dapat dimaklumi, karena dalam pembangunan jalan tersebut sudah mereka serahkan kepada pemborong. Jadi kedatangan mereka hanya untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pembangunan, istilahnya *ng-Guyubi*. Namun begitu dalam pembangunan jalan tersebut mereka tetap mengeluarkan sumbangan barang/material dan sejumlah 20 responden atau 44,4% mengeluarkan ke-tiga jenis sumbangan barang, seperti minuman, makanan dan makan siang.

Setelah tahap pembangunan, maka yang menempati urutan kedua dalam pengelolaan dana Kontigensi di RW IV ini adalah tahap pemeliharaan jalan. Kasusnya hampir sama dengan tahap pembangunan, maka yang memberikan andil atau nilai pada tahap pembangunan ini adalah besarnya dana iuran pemeliharaan jalan yaitu 45 responden atau sebanyak 100% menjawab besarnya iuran diatas

Rp.20.000,- dan ketepatan waktu warga dalam membayar iuran pemeliharaan yaitu 35 responden atau 77,8% menjawab tepat waktu atau sangat tinggi.

Iuran pemeliharaan jalan di RW IV ini sebenarnya tidak khusus disediakan untuk pemeliharaan jalan saja, namun didalamnya juga untuk kegiatan pemeliharaan yang lain seperti membenahi saluran, talud dan sebagainya, dan diberi nama iuran pembangunan yang bersifat rutin tiap bulan. Iuran pembangunan ditetapkan oleh pengurus masing-masing RT yang juga disepakati di tingkat RW adalah sebesar Rp.25.000,- dan dibayarkan pada saat pertemuan di tingkat RT.

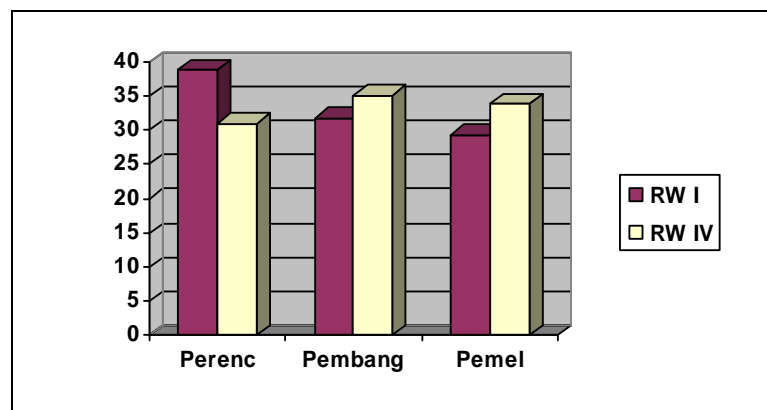
Untuk kehadiran warga dalam kerja bakti pemeliharaan jalan dan kerelaan warga untuk hadir dalam kerja bakti tersebut sangat variatif. 24 responden atau 53,3% menyatakan separuh warga hadir pada kerja bakti pemeliharaan jalan, 15 responden atau 66,6% menyatakan sebagian besar warga hadir. Demikian pula untuk kerelaan warga hadir dalam kerja bakti, paling banyak 15 responden atau 33,3 menyatakan kadang hadir kadang tidak. Hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas penduduk RW IV kerja di perkantoran, sehingga kerja bakti yang biasanya diadakan di hari Minggu jarang dapat mereka hadiri, karena bagi mereka hari Minggu merupakan hari keluarga yaitu hari mereka untuk berkumpul bersama keluarga.

Dari ketiga tahapan pembangunan tersebut yang mendapat nilai paling rendah dalam pengelolaan dana Kontigensi di RW IV adalah tahap perencanaan, yaitu dengan jumlah nilai 776 atau 31% dari nilai keseluruhan. Hal ini dikarenakan jumlah kehadiran warga dalam tiap kali diadakan pertemuan, hanya 22 responden atau 48,9% menjawab kadang hadir kadang tidak dan responden lainnya

menjawab sering hadir sejumlah 9 responden dan jarang sekali hadir 12 responden. Demikian pula tingkat kerelaan warga untuk hadir dalam pertemuan tersebut sangat variatif jawabannya, mulai dari yang tidak suka menghadiri pertemuan sampai yang sering hadir. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus RW IV (sekretaris RW), sedikitnya warga yang hadir tiap kali diadakan pertemuan dikarenakan selain kesibukan warga juga banyaknya warga RW IV yang merasa pintar dan mereka tidak mau digurui maupun diperintah oleh warga lain. Akibat dari hal tersebut, maka dalam pengajuan Dana Kontigensi mereka hanya usul saja bahwa jalan lingkungan mereka sudah rusak, namun yang menyusun Proposalnya dilakukan oleh pengurus yang merupakan wakil dari RT dan RW yang disebut LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan).

Namun demikian pada tahap perencanaan tentang tanggapan warga terhadap Dana Kontigensi sangat positif, yaitu sejumlah 20 responden atau sebesar 44,4% menyatakan sangat bermanfaat dan 12 responden 26,7% menyatakan bermanfaat. Demikian pula dengan ketepatan lokasi pembangunan dengan yang mereka usulkan yaitu sejumlah 34 responden atau 75,5% menyatakan tepat dan hanya 11 responden atau 24,5% menyatakan sangat tepat. Perbedaan dalam hal ini adalah kondisi tepat karena Dana Kontigensi yang turun biasanya bukan merupakan prioritas utama kebutuhan mereka, yang turun biasanya prioritas kedua ataupun ketiga sehingga mereka menyatakan hanya tepat saja.

Untuk menggambarkan secara jelas tentang tahapan pembangunan dalam pengelolaan Dana Kontigensi baik itu di RW I maupun di RW IV dapat dilihat pada Gambar 4.8 dibawah ini.



Sumber :Hasil Analisa, 2008

GAMBAR 4.6
PROSENTASE TAHAPAN PEMBANGUNAN DI RW I DAN RW IV
DALAM PENGELOLAAN DANA KONTIGENSI

4.2.3 Kesimpulan Pengelolaan Dana Kontigensi

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan Dana Kontigensi pada RW I dan RW IV yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Pengelolaan Dana Kontigensi di RW I

- Pengelolaan Dana Kontigensi yang paling optimal adalah tahap perencanaan. Hal ini didukung dengan pengetahuan warga tentang manfaat Dana Kontigensi, sehingga mereka aktif hadir dan berdiskusi dalam ‘Jumpa Warga’ untuk merencanakan pembangunan jalan mulai dari penyusunan Proposal sampai perencanaan fisiknya.
- Dalam tahap pembangunan dan pemeliharaan nilainya rendah karena terkendala faktor ekonomi untuk sumbangan barang/material serta besaran iuran.

B. Pengelolaan Dana Kontigensi di RW IV

- Pengelolaan Dana Kontigensi yang paling optimal adalah pada tahap pemba-

ngunan. Hal ini didukung dengan karakteristik penduduk yang kuat di perekonomian, sehingga mereka dapat memberikan iuran untuk pembangunan jalan sebesar Rp.100.000,-/KK, dan pelaksanaannya kemudian diborongkan.

- Dalam tahap perencanaan di RW IV rendah, karena warga hanya usul saja tetapi yang menyusun Proposal Dana Kontigensi sampai perencanaan fisik oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

4.3 Analisis Tingkat Partisipasi

Analisis tingkat partisipasi adalah merupakan suatu upaya untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau program pembangunan. Alat untuk mengukur tingkat partisipasi ini adalah dengan menggunakan matriks dari Nabeel Hamdi dan Reinhard Goethert, mulai dari tingkat tidak ada peran serta, peran serta secara tidak langsung, masyarakat hanya sebagai konsultatif, pengendalian terbagi antara masyarakat dan program sampai dengan tahap pengendalian penuh (sumbu tegak) dan tahap pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemeliharaan (sumbu mendatar).

Tahap pembangunan yang berhubungan dengan kegiatan atau program pembangunan dalam penelitian ini digunakan tahapan pembangunan dalam pengelolaan Dana Kontigensi, sehingga untuk sumbu mendatar telah diperoleh hasilnya dari analisis pengelolaan Dana Kontigensi baik itu di RW I maupun di RW IV seperti yang telah diuraikan diatas.

Sedangkan tingkat partisipasi sebagai sumbu tegak diperoleh dari jumlah nilai keseluruhan tahapan pembangunan yang diperoleh terhadap nilai total yang seharusnya diperoleh. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi adalah merupakan

peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam keseluruhan tahapan kegiatan pembangunan.

4.3.1 Tingkat Partisipasi di RW I

Tingkat partisipasi masyarakat di RW I diperoleh berdasarkan hasil analisis pengelolaan Dana Kontigensi seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu dari nilai total keseluruhan pengelolaan Dana Kontigensi atau penjumlahan dari nilai tahap perencanaan, nilai tahap pembangunan dan nilai tahap pemeliharaan terhadap nilai maksimal yang seharusnya dapat dihasilkan oleh RW I dalam pengelolaan dana Kontigensi.

Nilai maksimal yang seharusnya dapat dihasilkan oleh RW I dalam pengelolaan Dana Kontigensi adalah:

$$5 \text{ pertanyaan} \times 5 \text{ jawaban} \times 3 \text{ tahap pembangunan} \times 35 \text{ responden} \\ \text{adalah : } 2.625$$

Berdasarkan teori Tingkat Partisipasi yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan partisipasi, maka dapat diperhitungkan nilai masing-masing tingkatan dengan interval nilai $2.625 : 5 = 525$, adalah sebagai berikut:

Tingkat pengendalian penuh	: 2.100 – 2.625
Tingkat pengendalian terbagi	: 1.575 – 2.100
Tingkat konsultatif	: 1.050 – 1.575
Tingkat partisipasi tidak langsung	: 525 – 1.050
Tingkat tidak ada partisipasi	: 0 - 525

Sedangkan nilai total keseluruhan berdasarkan analisis pengelolaan Dana Kontigensi di RW I adalah sebesar 2.139 (2.100-2.625), maka dengan melihat tingkatan diatas dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di RW I

sudah mencapai tahap tertinggi, yaitu tingkat Pengendalian Penuh. Didalam teori tingkat Pengendalian Penuh (*full control*) ini dikatakan bahwa: masyarakat mendominasi kegiatan pembangunan dan program pembangunan hanya sebagai penyedia sumber daya (dana).

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian tingkat partisipasi sudah pada tahap tertinggi karena Dana Kontigensi dikelola dengan melibatkan seluruh warga RW I, mulai tahap perencanaan/penyusunan Proposal sampai perencanaan fisik yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga dan dilaksanakan dengan ‘guyub’ dan gotong royong berupa kerja bakti pada tahap pembangunan dan pemeliharaan.

4.3.2 Pada Pemukiman Penduduk Pendetang (RW IV)

Demikian pula untuk perhitungan tingkat partisipasi masyarakat di RW IV diperoleh berdasarkan hasil analisis pengelolaan Dana Kontigensi seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu dari nilai total keseluruhan pengelolaan Dana Kontigensi atau penjumlahan dari nilai tahap perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan terhadap nilai maksimal yang seharusnya dapat dihasilkan oleh RW IV. dalam pengelolaan Dana Kontigensi.

Nilai maksimal yang seharusnya dapat dihasilkan oleh RW IV dalam pengelolaan Dana Kontigensi adalah:

<p>5 pertanyaan x 5 jawaban x 3 tahap pembangunan x 45 responden adalah : 3.375</p>

Berdasarkan teori Tingkat Partisipasi yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan partisipasi, maka dapat diperhitungkan nilai masing-masing tingkatan dengan in-

terval nilai $3.375 : 5 = 675$, adalah sebagai berikut:

Tingkat pengendalian penuh	: 2.700 – 3.375
Tingkat pengendalian terbagi	: 2.025 – 2.700
Tingkat konsultatif	: 1.350 – 2.025
Tingkat partisipasi tidak langsung	: 675 – 1.350
Tingkat tidak ada partisipasi	: 0 - 675

Sedangkan nilai total berdasarkan analisis pengelolaan Dana Kontigensi di RW IV adalah sebesar 2.505(2.025-2.700) , maka dengan melihat tingkatan diatas dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di RW IV sudah mencapai tingkat Pengendalian Terbagi. Didalam teori tingkat Pengendalian Terbagi (*shared control*) ini dikatakan bahwa: masyarakat dan program pembangunan berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan. Pengambilan keputusan terbagi dalam kelompok untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Dalam pembahasan perlu memasukkan kelompok inti atau *stakeholders* yang mewakili bermacam-macam kepentingan di masyarakat.

Berdasarkan analisis pengelolaan Dana Kontigensi di RW IV seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa warga RW IV dalam mengelola Dana Kontigensi belum terlibat secara penuh dan dalam setiap tahapan pembangunan perlu ada atau harus didampingi *stakeholders* atau suatu kelompok agar kegiatan dapat berjalan. Hal ini terlihat pada tahap perencanaan atau penyusunan Proposal pengajuan Dana Kontigensi berikut rencana fisiknya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan adanya pemborong dalam kegiatan pembangunan jalan.

4.3.3 Kesimpulan Tingkat Partisipasi

Berdasarkan hasil analisis tingkat partisipasi dan analisis pengelolaan Dana Kontigensi pada RW I dan RW IV diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Tingkat Partisipasi di RW I

Tingkat partisipasi masyarakat di RW I dalam pengelolaan Dana Kontigensi sudah mencapai tingkat pengendalian penuh (*full control*), karena Dana Kontigensi dikelola dengan perencanaan yang melibatkan seluruh warga mulai penyusunan Proposal sampai perencanaan fisik, sehingga sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Pada tahap pembangunan dan pemeliharaan, dilaksanakan dengan ‘guyub’ dan gotong-royong (kerja bakti/swakarya) serta adanya kesadaran untuk memelihara hasil pembangunan jalan tersebut.

B. Tingkat Partisipasi di RW IV

Tingkat partisipasi masyarakat di RW IV dalam pengelolaan Dana Kontigensi mencapai tingkat pengendalian terbagi (*shared control*) karena dalam mengelola Dana Kontigensi tidak terlalu banyak warga yang terlibat. Pada tahap perencanaan, warga hanya memberikan usulan tetapi yang menyusun Proposal sampai perencanaan fisik dilaksanakan oleh LPMK. Sedangkan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan, meskipun telah melakukan iuran dana tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemborong.

4.4 Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis bentuk peran serta masyarakat, analisis pengelolaan Dana Kontigensi dan analisis tingkat partisipasi pada pembangunan jalan

lingkungan, baik itu di RW I maupun di RW IV, maka dapat diperoleh kesimpulan sementara dari analisis bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan sebagai berikut:

A. RW I

- Merupakan pemukiman penduduk asli dengan karakteristik masyarakat yang homogen (merupakan penduduk yang telah lama tinggal di RW I), dengan tingkat pendidikan dasar sampai menengah dan tingkat penghasilan menengah kebawah sehingga memiliki pola pikir yang masih sederhana dan ‘guyub’ (adanya rasa kebersamaan, sama dan sejajar). Pembangunan jalan lingkungan dapat terwujud dengan tingkat partisipasi masyarakat sudah tinggi mencapai tahap pengendalian penuh (*full control*). Hal ini didukung dengan pengelolaan Dana Kontigensi yang melibatkan seluruh warga mulai tahap perencanaan yang direncanakan sesuai prioritas kebutuhan melalui penyusunan Proposal sampai perencanaan fisiknya, dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan dilaksanakan dengan kerja bakti.
- Kualitas hasil pembangunan jalan dibawah persyaratan teknis karena:
 1. Dikerjakan warga sendiri yang tidak memiliki kemampuan/keahlian;
 2. Dalam pelaksanaannya tidak ada bimbingan teknis dari Pemerintah Kota Semarang;
 3. Dana yang tersedia Rp.6.000.000,- (Kontigensi Rp.4.500.000,- + iuran warga Rp.1.500.000,-) dilaksanakan dengan mengejar kuantitas jalan sepanjang 100 meter dan lebar 2 meter dengan pertimbangan supaya jalan yang berpaving tambah panjang, maka digunakan paving dengan kualiti-

tas rendah ketebalan 4 cm yang harganya Rp.30.000,-/meter. Warga berasumsi yang lewat hanya kendaraan roda 2.

B. RW IV

- Merupakan pemukiman penduduk pendatang dengan karakteristik masyarakat yang heterogen, dengan tingkat pendidikan relatif tinggi dan tingkat penghasilan menengah keatas ternyata pembangunan jalan lingkungan juga dapat terwujud, dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi mencapai tahap pengendalian terbagi (*shared control*). Hal ini dikarenakan dalam mengelola Dana Kontigensi tidak terlalu melibatkan seluruh warga, baik itu dalam tahap perencanaan (penyusunan Proposal dan rencana fisiknya diserahkan kepada LPMK), pembangunan maupun pemeliharaan/perbaikan jalan dilakukan dengan *sharing* dana yang kemudian diserahkan kepada pemborong. Warga menyadari bahwa mereka tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan pembangunan jalan sendiri dan tidak adanya waktu untuk kerja bakti maupun menghadiri pertemuan. Namun demikian dengan melakukan iuran, warga tetap mempunyai rasa ‘rumangsa melu handarbeni’ terhadap kegiatan yang dikerjakan bersama tersebut.
- Kualitas hasil pembangunan jalan sesuai persyaratan teknis jalan, karena:
 1. Dilaksanakan oleh pemborong, yang tentunya memiliki keahlian;
 2. Dilaksanakan dengan dana yang tersedia Rp.10.000.000,- dengan panjang jalan 80 meter dan lebar 3 meter, digunakan paving dengan kualitas untuk kendaraan roda 4 ketebalan 6 cm seharga Rp.35.000,-/meter.

Dengan melihat hasil/manfaat dan biaya untuk pembangunan jalan di ke-

dua pemukiman RW I dan RW IV diatas, maka secara sederhana dapat dilakukan evaluasi pada kedua lokasi pembangunan untuk mengetahui keefektifannya. Dengan Teori Analisis Manfaat dan Biaya dari Dr. Guritno Mangkoesobroto, M.Sc dapat digunakan untuk mengevaluasi mengenai penggunaan sumber ekonomi agar dapat dilakukan secara efisien, sebab Pemerintah mempunyai banyak program yang harus dilaksanakan sedangkan biaya sangat terbatas. Pada dasarnya evaluasi ini dilaksanakan dengan menimbang manfaat dan biaya dari suatu kegiatan.

A. Evaluasi Manfaat dan Biaya Pembangunan Jalan di RW I

Dengan biaya sebesar Rp.6.000.000,- diperoleh jalan seluas 200m² tapi kualitas rendah. Manfaat langsung yang dapat diperoleh adalah kelancaran transportasi yang dapat menunjang kegiatan perekonomian warga. Sedangkan manfaat tidak langsungnya adalah naiknya harga tanah, tetapi tetap lebih murah dibanding RW IV karena lingkungan belum tertata sehingga banyak orang luar yang mulai membeli tanah di lingkungan RW I.

Sedangkan dampak dari kualitas jalan yang rendah/tidak memenuhi persyaratan teknis adalah akan mengakibatkan paving mudah rusak sehingga umur jalan tidak lama/awet, karena asumsi semula hanya untuk konstruksi roda 2 ternyata setelah adanya jalan paving banyak kendaraan roda 4 yang lewat. Hal ini tentunya akan membutuhkan biaya untuk perbaikannya.

B. Evaluasi Manfaat dan Biaya Pembangunan Jalan di RW IV

Dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- diperoleh jalan seluas 240m² dengan kualitas memenuhi persyaratan teknis. Manfaat langsung yang dapat diperoleh adalah kelancaran transportasi yang dapat menunjang kegiatan perekonomian

warga. Sedangkan manfaat tidak langsungnya adalah iuran warga untuk pemeliharaan/perbaikan jalan bisa dialihkan untuk sarana dan prasarana lainnya.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil analisis bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan baik itu di RW I maupun RW IV dapat dilihat pada Gambar 4.7 Hasil Temuan di RW I, gambar 4.8 Hasil Temuan di RW IV dan Tabel IV.5 Perbandingan Hasil Temuan Dalam Pengelolaan Dana Kontigensi Pada Pembangunan Jalan Lingkungan antara RW I dan RW IV.

AB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Gedawang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Masyarakat:

- RW I, dengan karakteristik masyarakat yang homogen ditunjukkan dengan masih adanya hubungan kekerabatan antar warga dan lamanya tinggal warga, 'guyub' dengan adanya rasa kebersamaan, sederhana dengan tingkat pendidikan dasar sampai menengah dan tingkat penghasilan menengah ke bawah (bekerja sebagai buruh dan petani) serta masih berlangsungnya kegiatan adat budaya Jawa, seperti: acara Punden, slametan, punggahan, resik-resik desa dan keagamaan, seperti: pengajian yang rutin dilakukan tiap malam Jum'at dan 'Mujahadah' tiap malam Jum'at wage;
- RW IV, dengan karakteristik masyarakat yang heterogen (warga berasal dari berbagai daerah), sudah mapan dengan tingkat pendidikan relatif tinggi dan tingkat penghasilan menengah keatas (bekerja sebagai karyawan swasta, PNS dan wiraswasta) sehingga tidak ada waktu untuk kegiatan sosial;

2. Bentuk Peran Serta Masyarakat:

- RW I, bentuk peran serta masyarakat yang dominan berupa tenaga, diwu-

judkan dengan kerelaan warga untuk melaksanakan pembangunan jalan sendiri (swakarya) dan kerja bakti pemeliharaan/perbaikan jalan yang rutin dilaksanakan tiap hari Minggu pertama.

- RW IV, bentuk peran serta masyarakat yang dominan berupa dana, diwujudkan dengan kerelaan seluruh warga membayar iuran sebesar Rp.25.000,- untuk pemeliharaan/perbaikan sarana/prasarana dan sosial.

3. Pengelolaan Dana Kontigensi:

- RW I, pengelolaan Dana Kontigensi yang paling optimal pada tahap perencanaan dengan dilibatkannya seluruh warga mulai penyusunan Proposal Dana Kontigensi sampai rencana teknis jalan yang direncanakan bersama dalam pertemuan 'Jumpa Warga'.
- RW IV, pengelolaan Dana Kontigensi yang paling optimal pada tahap pembangunan, didukung dengan kerelaan dan keaktifan warga untuk membayar iuran sebesar Rp.100.000,-/KK (swadana) untuk mendampingi Dana Kontigensi yang tidak mencukupi.

4. Tingkat Partisipasi:

- RW I, tingkat partisipasi mencapai tahap yang tertinggi yaitu Pengendalian Penuh (*full control*). Hal ini didukung dengan keterlibatan yang tinggi dari seluruh warga dalam pengelolaan Dana Kontingensi, dimulai pada tahap perencanaan dalam penyusunan Proposal pengajuan Dana Kontigensi sampai rencana teknis secara bersama pada pertemuan 'Jumpa Warga' dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan/perbaikan jalan dilaksanakan dengan kerja bakti (swakarya).

- RW IV, tingkat partisipasi mencapai tahap Pengendalian Terbagi (*shared control*), karena keterlibatan warga dalam mengelola Dana Kontigensi masih harus didampingi oleh *stakeholders*. Pada tahap perencanaan, warga hanya memberi usulan tentang kondisi jalan mereka yang sudah rusak sedangkan yang menyusun Proposal sampai rencana teknis dilaksanakan oleh LPMK. Pada tahap pembangunan dan pemeliharaan/perbaikan jalan, warga beriuran uang untuk kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada pemborong.
5. Dengan melihat bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi dan tingkat partisipasinya, maka alokasi Dana Kontigensi untuk RW I pada tahun-tahun berikutnya lebih tepat diberikan untuk kegiatan pembangunan. Hal ini dengan pertimbangan:
- Kondisi jalan masih banyak yang berupa jalan tanah/setapak;
 - Keaktifan warga dalam menyusun Proposal dalam ‘Jumpa Warga’, sehingga warga mengetahui kebutuhan prioritas jalan yang direncanakan.
 - Keaktifan warga untuk kerja bakti membangun jalan sendiri (swakarya), namun perlu ada bimbingan teknis dari Pemerintah Kota Semarang agar jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis;
 - Perlunya Dana Kontigensi yang lebih besar atau sesuai dengan pengajuan, karena apabila turunnya sedikit warga dalam membangun akan tetap memperbesar volumenya (karena ingin jalan yang berpaving tambah panjang). Hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas jalannya.
6. Dengan melihat bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi dan tingkat partisipasinya, maka alokasi Dana Kontigensi untuk RW

IV pada tahun-tahun berikutnya lebih tepat dilaksanakan untuk kegiatan pemeliharaan/perbaikan. Hal ini dengan pertimbangan:

- RW IV yang merupakan perumahan formal, jalan lingkungan telah disediakan oleh pengembang. Jadi warga hanya memelihara dan memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
- Bentuk peran serta yang diberikan oleh warga berupa dana, sehingga dengan alokasi Dana Kontigensi untuk kegiatan pemeliharaan/perbaikan jalan maka tidak akan terlalu banyak membutuhkan dana tambahan dari warga yang nantinya lama kelamaan akan memberatkan warga.

5.2 Rekomendasi

Dari analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan telah diperoleh temuan penelitian tentang perbedaan pemukiman asli (RW I) dan pendatang (RW IV) yang berupa: karakteristik masyarakat, bentuk peran serta masyarakat dan pengelolaan Dana Kontigensi, proses dan kualitas pembangunan serta hasil/produk. Berdasarkan hal itu, maka dapat disampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Semarang yang berupa usulan untuk keberlanjutan pemberian Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan yaitu:

1. Dalam memberikan bantuan untuk RW dengan karakteristik seperti RW I Kelurahan Gedawang, yaitu pemukiman asli, homogen dengan tingkat pendidikan dasar sampai menengah dan tingkat penghasilan menengah kebawah, bentuk peran serta berupa tenaga dan adanya keaktifan warga dalam proses peren-

canaan (penyusunan Proposal), maka Dana Kontigensi dapat dialokasikan untuk kegiatan pembangunan;

2. Sedangkan bantuan untuk RW dengan karakteristik seperti RW IV Kelurahan Gedawang, yaitu pemukiman pendatang/perumahan, karakteristik masyarakat heterogen dengan tingkat pendidikan menengah atas sampai tinggi dan tingkat penghasilan menengah keatas, bentuk peran serta berupa dana, maka Dana Kontigensi dapat dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan/perbaikan.
3. Selain memberikan Dana Kontigensi juga harus ada pendampingan/bimbingan teknis, supaya pembangunan jalan seperti yang dilaksanakan RW I sesuai dengan persyaratan teknis sehingga tidak mudah rusak, seperti ketebalan paving, ketebalan pasir dan pemasangan campuran pembatas paving;
4. Sebaiknya dalam mengelola Dana Kontigensi harus disesuaikan antara jumlah dana dengan hasil yang akan diperoleh/produk sehingga akan terjaga kualitas hasil pembangunan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hamdi, Nabeel dan Goethert, Reinhard, 1997, *Action Planning for Cities. A Guide to community practice*, John Wiley & Son.
- Kodoatie, 2005, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kountur, Ronny, 2007, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Percetakan Buana Printing.
- Muhadjir, Noeng, 1989, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mangkoesoebroto, Guritno, *Ekonomi Publik*-edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Nasir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tnggal Landas*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999, *Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) VII*, Semarang.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000-2010*, Semarang.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta.
- Rukmana, Nana, 1993, *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sastroputro, Santoso, 1986, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Schubeler, Peter, 1996, *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*, Washington DC, The World Bank.
- Sekretariat Daerah Kota Semarang, Bagian Pembangunan, 2007, *Dana Kontigensi*.
- Sevilla, Consuelo, et al, alih bahasa Tuwu, Alimuddin, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, 1987, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES.
- Soetrisno R, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philosophy Press.
- Sujamto, *Refleksi Budaya Jawa: Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Semarang: Dahara Prize.
- Sugiarto, et al, 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suparlan, Parsudi, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Yudhohusodo, Siswono dkk, 1991, *Rumah untuk Seluruh Rakyat*, Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

ARTIKEL

Peter, Schubeler, 1996, *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*, <http://www.worldbank.org/html>.

Sarwono, Bambang, 2004, *Model Kebijakan Publik: Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Daerah*, BKTRN.

Rotella, Carlo, 2007, *Journal of Urban History: Culture in the City*, <http://www.sagepublications.com>.

JURNAL

Rahdriawan, Mardwi dan Wahyuningsih, 2006, *Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan di Kelurahan Salaman Mloyo Kota Semarang*, Jurnal Teknik Universitas Diponegoro: vol.27.

Sunarti, 2003, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok*, Jurnal Tata Loka Planologi Undip: vol.5.

TESIS

Sihono, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo Surakarta*, Semarang, Magister Teknik Perencanaan Kota UNDIP.

Tri Wahyuni, 1997, *Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan di Perumahan, kasus perumahan sederhana di Kotamadya Semarang*, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana ITB.

